BKD
Provinsi Kalimantan Tengah

BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH

LKIP 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi atau kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target sebagaimana indikator kinerja yang ditetapkan.

Dengan maksud di atas maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengandung unsur-unsur :

a. Relevansi, yaitu berisi informasi yang relevan dengan pencapaian kinerja.
b. Keakuratan, yaitu penyajian LKIP bebas dari kesalahan perhitungan.
c. Konsistensi, yaitu menyajikan informasi-informasi yang konsisten antara bagian sah dengan bagian lainnya.
d. Varifiabilitas, yaitu informasi yang disajikan dalam LKIP dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendahulu.
e. Agregasi, yaitu menyajikan informasi secara seimbang, lengkap, padat dan ringkas.
f. Tepat waktu, yaitu LKIP disampaikan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk bahan pengambilan keputusan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun berjalan terhadap pelaksanaan program dan kinerja.

Atas segala upaya dan keterbatasan yang ada sehingga laporan kinerja SKPD ini dapat terwujud, tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas semua masukan dan partisipasinya baik itu materi maupun imaterial. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semua.

Palangka Raya, Februari 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ISNAR ARIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang telah disepakati antara Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Gubernur Kalimantan Tengah.

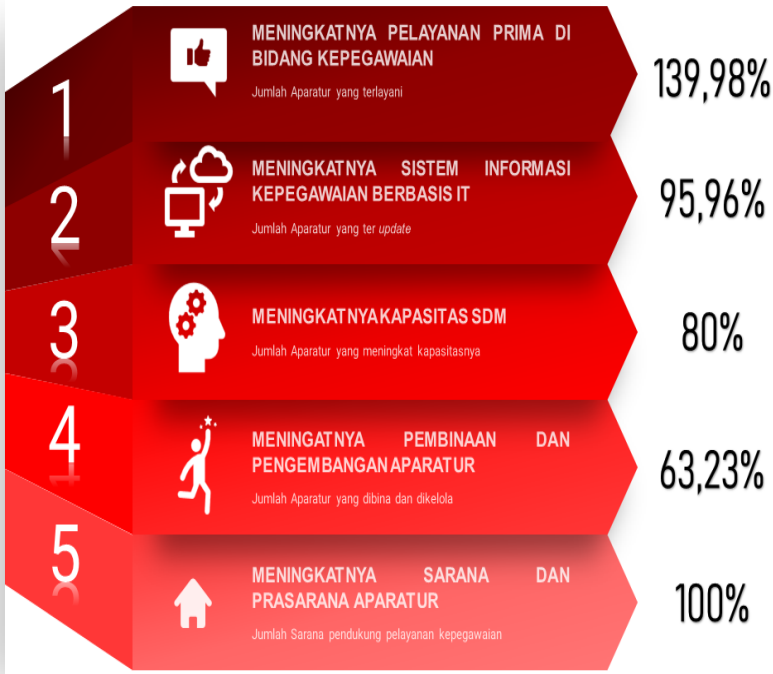

Terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Rata-rata pencapaian indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 126.31 persen atau masuk dalam kategori *Sangat Tinggi*. Meskipun terdapat satu indikator kinerja yang memiliki nilai kinerja dibawah 70 persen. Capaian pada Tahun 2021 ini mengalami kenaikan 20.31 persen dibandingkan dengan capaian misi Tahun 2020.

Capaian tertinggi diperoleh oleh IKU 1 (139.98%), yaitu jumlah aparatur yang terlayani telah melebihi target sedangkan yang paling rendah diperoleh IKU 4 (63.23%) yaitu jumlah aparatur yang dibina dan dikelola dikarenakan rasionalisasi anggaran sehingga terdapat beberapa paket kegiatan yang ditiadakan sehingga realisasi menjadi tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja BKD Tahun Anggaran 2021.

Gambar 1 Dokumentasi Apel Pagi BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 18 Mei 2021

Selain capaian IKU, ada beberapa kegiatan yang menjadi nilai tambah BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2021 ini, yaitu 1) Penerapan Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu; 2) Penerapan Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh BKD yaitu menu pelayanan kepegawaian mandiri bagi ASN Provinsi Kalimantan Tengah secara *online* dan *less paper*; 3) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEGDA); 4) Sistem Informasi Absensi Terpusat; 5) Website Resmi BKD Provinsi Kalimantan Tengah; 5) Pelaksanaan Ujian Dinas berbasis CAT serta dilakukan dilakukan secara daring (*online*); 6) Penerapan Asesmen untuk Mutasi ke Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; serta 7) Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi BKD Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi sebesar 33.68 atau 92.78% Kategori "AA".

Dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut, BKD Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 12.406.717.084,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 9.902.631.034,- atau 79.82 %.

Dari sisi akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi berupa rekomendasi dari KemenPAN RB atas implementasi SAKIP menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Terdapat 4 (empat) poin yang menjadi fokus perbaikan Provinsi Kalimantan Tengah. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan supervisi secara berkala terkait kinerja maupun anggaran terhadap pencapaian seluruh unit kerja pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **II**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. *Cascading* Kinerja dan Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah 1
C. Kelembagaan 4
D. Aspek Strategis Organisasi 10
E. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2021 15
F. Sistematika Penyajian 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA **18**

A. Rencana Strategis 18
A.1 Pernyataan Visi dan Misi *18*
A.2 Tujuan dan Sasaran *19*
B. Struktur Program dan Anggaran BKD Tahun 2021 22
C. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja 24
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 34
D.1 Sistem Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu *34*
D.2 Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SiTAGUH) BKD *35*
D.3 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEGDA) *36*
D.4 Sistem Informasi Absensi Terpusat *37*
D.5 Website Resmi BKD Provinsi Kalimantan Tengah *37*
D.6 Pelaksanaan seleksi yang berkaitan dengan pemenuhan kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) *38*

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **40**

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 40
A.1 Sasaran Strategis 1 ..... *44*
A.2 Sasaran Strategis 2 ..... *59*
A.3 Sasaran Strategis 3 ..... *63*
A.4 Sasaran Strategis 4 ..... *66*
A.5 Sasaran Strategis 5 ..... *72*
B. Capaian Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan Tahun 2021 76
B.1 Penilaian Manajemen ASN pada KORSUPGAH Korupsi Terintegrasi *77*
B.2 Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi *78*
C. Realisasi Anggaran Tahun 2021 79
D. Inovasi 86
D.1 Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah berbasis CAT *86*
D.2 BKD's Costumer Satisfaction of Service Index Tree *87*
D.3 Pelaksanaan Asesmen Mutasi *88*
D.4 SITAGUH BKD (Sistem Informasi Terampil dan Tangguh) *88*

BAB IV PENUTUP **90**

DAFTAR TABEL ..... **VI**

DAFTAR GAMBAR ..... **VII**

LAMPIRAN ..... **IX**

Daftar Tabel

TABEL 1 INVENTARISASI ASET BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 8
TABEL 2 ALOKASI APBD BELANJA LANGSUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 10
TABEL 3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKD (2016-2021) 20
TABEL 4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BKD (2016-2021) 20
TABEL 5 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 23
TABEL 7 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA 40
TABEL 8 CAPAIAN KINERJA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 41
TABEL 9 PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN UMUM BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021 43
TABEL 10 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA PELAYANAN PRIMA DI BIDANG KEPEGAWAIAN 44
TABEL 11 TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 TAHUN 2016-2021 47
TABEL 15 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS IT 60
TABEL 16 TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 TAHUN 2016-2021 61
TABEL 18 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 64
TABEL 19 TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 TAHUN 2016-2021 65
TABEL 20 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 67
TABEL 21 TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 TAHUN 2016-2020 68
TABEL 23 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 5 : MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR 74
TABEL 24 TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 TAHUN 2016-2021 74
TABEL 25 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PADA SASARAN STRATEGIS 5 75
TABEL 26 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA YANG RELEVAN TAHUN 2021 76
TABEL 33 PERBANDINGAN PENILAIAN MANAJEMEN ASN PADA SISTEM INFORMASI KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2020-2021 77
TABEL 34 PERBANDINGAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 78
TABEL 35 REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 84

Daftar Gambar

GAMBAR 1 DOKUMENTASI APEL PAGI BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 18 MEI 2021 III
GAMBAR 1 CASCADING KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2021 2
GAMBAR 2 PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2021 3
GAMBAR 3 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 5
GAMBAR 4 RASIO JUMLAH PEGAWAI BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BERDASARKAN 6
GAMBAR 5 JUMLAH PEGAWAI BKD BERDASARKAN USIA 6
GAMBAR 6 JUMLAH PEGAWAI BKD BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 7
GAMBAR 7 JUMLAH PEGAWAI BKD BERDASARKAN JABATAN 7
GAMBAR 8 JUMLAH PEGAWAI BKD BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG 7
GAMBAR 9 ISU-ISU AKTUAL BIDANG KEPEGAWAIAN 12
GAMBAR 10 MILESTONE REFORMASI PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (APRIL 2018-2021) 13
GAMBAR 11 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 25
GAMBAR 12 LAMPIRAN I PENJELASAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 26
GAMBAR 13 LAMPIRAN II PENJELASAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 27
GAMBAR 14 LAMPIRAN III PENJELASAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 28
GAMBAR 15 LAMPIRAN IV PENJELASAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 29
GAMBAR 16 LEMBAR 1 PERJANJIAN KINERJA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 30
GAMBAR 17 LEMBAR 2 PERJANJIAN KINERJA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 31
GAMBAR 18 LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 32
GAMBAR 19 LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 33
GAMBAR 22 RUANGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 34
GAMBAR 23 ALUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BKD 35
GAMBAR 24 APLIKASI SI TAGUH BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 35
GAMBAR 25 APLIKASI SIMPEGDA BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 36
GAMBAR 26 APLIKASI SIM ABSENSI TERPUSAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 37
GAMBAR 27 TAMPILAN WEBSITE BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 38
GAMBAR 28 UJIAN DINAS TINGKAT II MENGGUNAKAN CAT TAHUN 2020 39
GAMBAR 29 GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN UMUM BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 42
GAMBAR 30 GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 TAHUN 2016-2021 46
GAMBAR 31 PROSES BISNIS KENAIKAN PANGKAT DAN PENINJAUAN MASA KERJA ASN 48
GAMBAR 32 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS JUMLAH PENYELESAIAN PNS NAIK PANGKAT, KARPEG, MASA KERJA PNS 2016-2021 49
GAMBAR 33 PETA PROSES BISNIS SELEKSI PENETAPAN DAN MONITORING TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR 50
GAMBAR 34 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS JUMLAH PNS PROVINSI YANG LULUS SELEKSI UNTUK TUGAS BELAJAR, PENETAPAN DAN MONITORING TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR 2016-2021 51
GAMBAR 35 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS JUMLAH PNS YANG MENGAMBIL CUTI, YANG MEMBUAT KARIS/KARSU DAN SKP 2016-2021 52
GAMBAR 36 PETA PROSES BISNIS PELAYANAN KESEJAHTERAAN PNS, USUL SKP, DAN USUL CUTI PNS 53
GAMBAR 37 PETA PROSES BISNIS PENYELESAIAN SK MUTASI 54
GAMBAR 38 PETA PROSES BISNIS PENYELESAIAN SK PNS YANG MEMASUKI MASA PURNA TUGAS 56
GAMBAR 39 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS JUMLAH PENYELESAIAN SK PNS YANG MEMASUKI MASA PURNA TUGAS 2016-2021 57
GAMBAR 40 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS JUMLAH PNS YANG MENERIMA SATYALENCANA KARYA SATYA 58
GAMBAR 41 PETA PROSES BISNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS 59
GAMBAR 42 GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 TAHUN 2016-2021 60

GAMBAR 43 PETA PROSES BISNIS MENINGKATNYA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS IT....62
GAMBAR 44 PETA PROSES BISNIS MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA....63
GAMBAR 45 GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 TAHUN 2016-2021....65
GAMBAR 46 GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 TAHUN 2016-2021....67
GAMBAR 47 PETA PROSES BISNIS MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR....69
GAMBAR 48 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS JUMLAH KEBUTUHAN PNS PROVINSI DAN CPNS BARU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH 2016-2021....70
GAMBAR 49 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS JUMLAH PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN SECARA TEPAT WAKTU 2016-2021....71
GAMBAR 50 GRAFIK CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS JUMLAH PNS YANG BISA NAIK PANGKAT KARENA LULUS UJIAN DINAS 2016-2021....72
GAMBAR 51 PETA PROSES BISNIS MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR....73
GAMBAR 52 POHON PELAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU BKD....87
GAMBAR 53 PROSES LAYANAN SITAGUH....89

LAMPIRAN

- Pemetaan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 berdasarkan Jabatan Struktural
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
- Laporan Triwulan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
- Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2021
- SOP Pengumpulan Data Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. *Cascading* Kinerja dan Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah

Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2021. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

Gambar 1 Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021

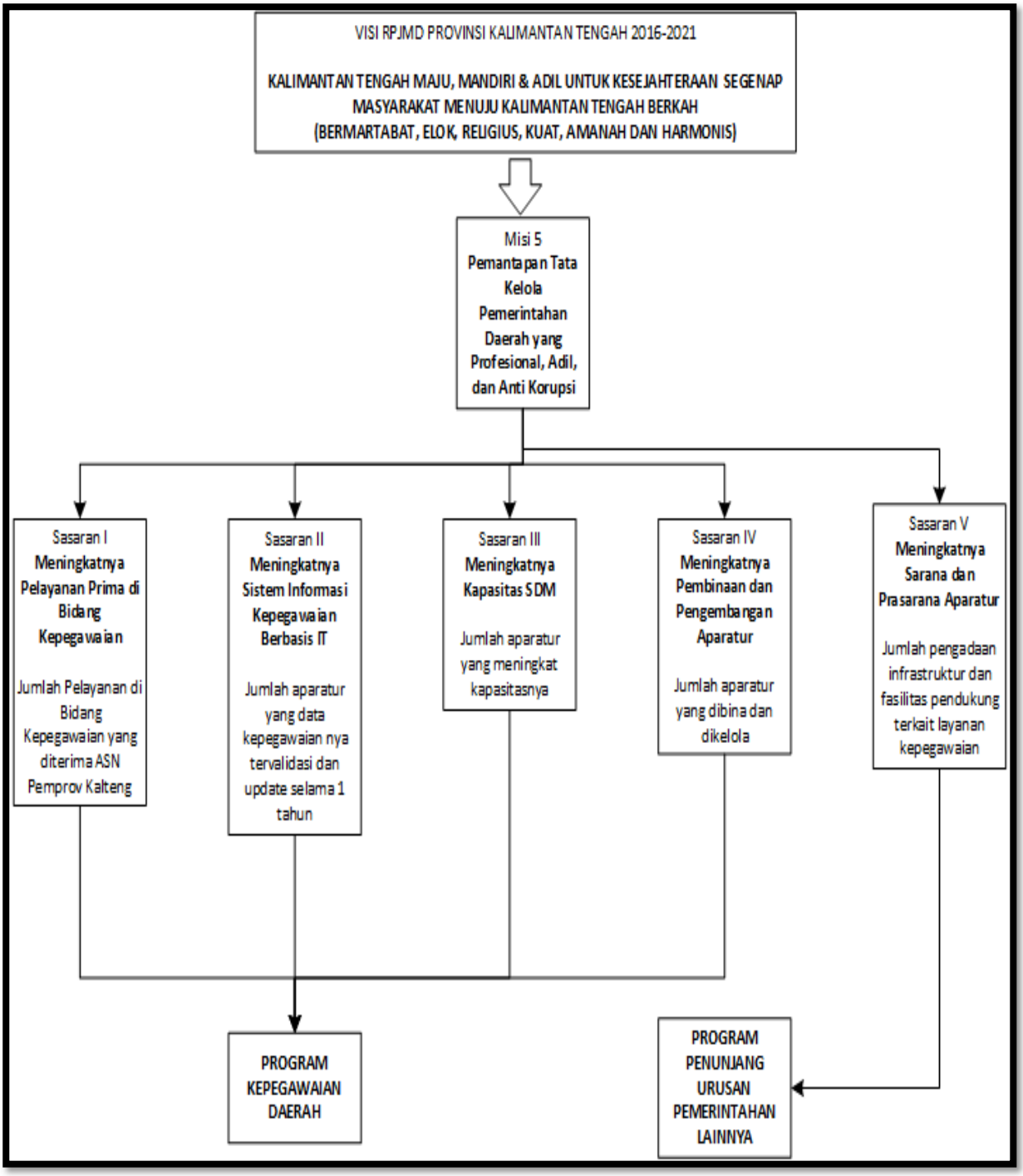

Sumber : Dokumen Proses Bisnis, BKD Prov Kalteng 2021

Suatu proses bisnis yang baik harus mempunyai tujuan mengefektifkan, mengefisienkan dan meningkatkan produktifitas dari suatu organisasi. Suatu organisasi secara umum tentu saja mempunyai tujuan agar dapat bertahan hidup selama mungkin dan selalu meningkat kinerja serta produktifitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka suatu organisasi membutuhkan suatu proses bisnis yang baik untuk mendukung berjalannya organisasi tersebut.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi publik membutuhkan suatu proses bisnis yang baik agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun proses bisnis pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 3 bagian antara lain sebagai berikut :

Gambar 2 Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021

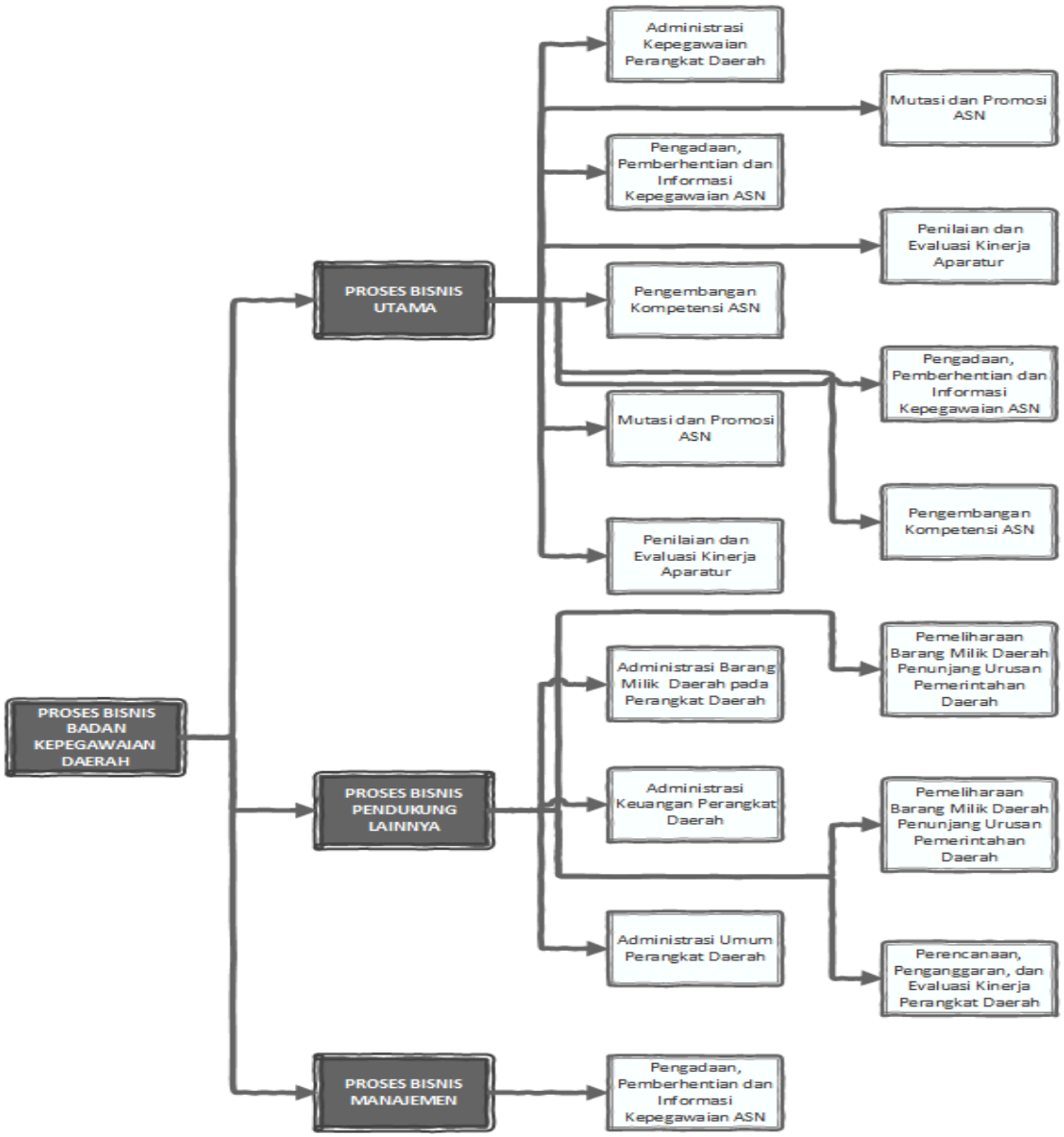

Sumber : Dokumen Proses Bisnis, BKD Prov Kalteng 2021

C. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kelembagaan itu sendiri menyangkut beberapa aspek, antara lain : **aspek organisasi, sumber daya manusia, serta pendanaan**.

Aspek Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah dalam sistem pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BKD Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas Manajemen Aparatur Sipil Negara Daerah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
2. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, peningkatan kesejahteraan dan bantuan sosial serta kewirausahaan bagi ASN;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kebugaran jasmani dan pembinaan mental kerohanian serta seni budaya bagi ASN;
7. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional;
8. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah; dan
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

BKD Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas yang diemban, Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdapat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah :

Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program Berdasarkan DUK SOPD BKD, BKD Prov. Kalteng 2021

Aspek Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah didukung sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan keadaan per 31 Januari 2022 sebanyak 79 orang (sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKD Prov Kalteng, 2021) dengan klasifikasi berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, jabatan dan jenis kelamin sebagaimana berikut :

Gambar 4 Rasio Jumlah Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin

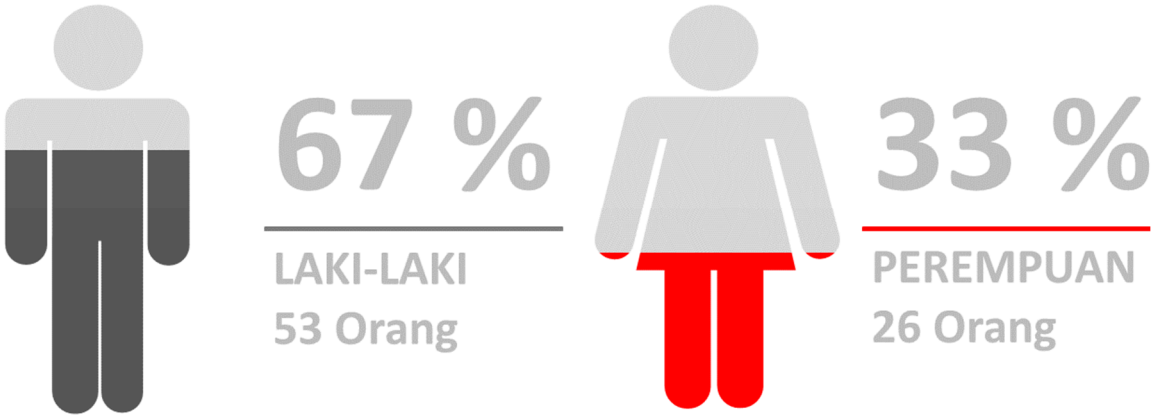

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD Prov Kalteng 2022

Gambar 5 Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Usia

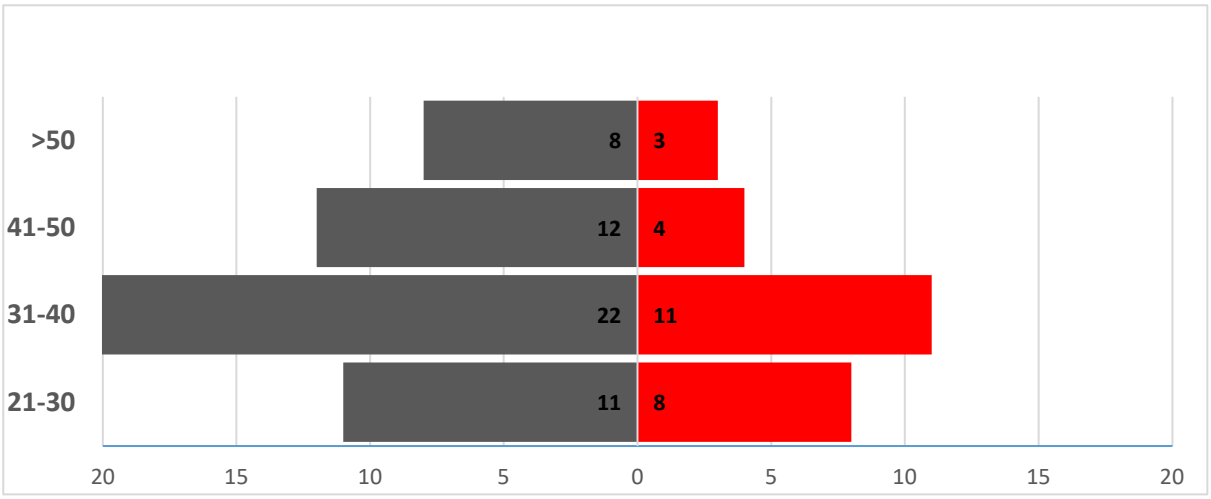

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD Prov Kalteng 2022

Gambar 6 Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

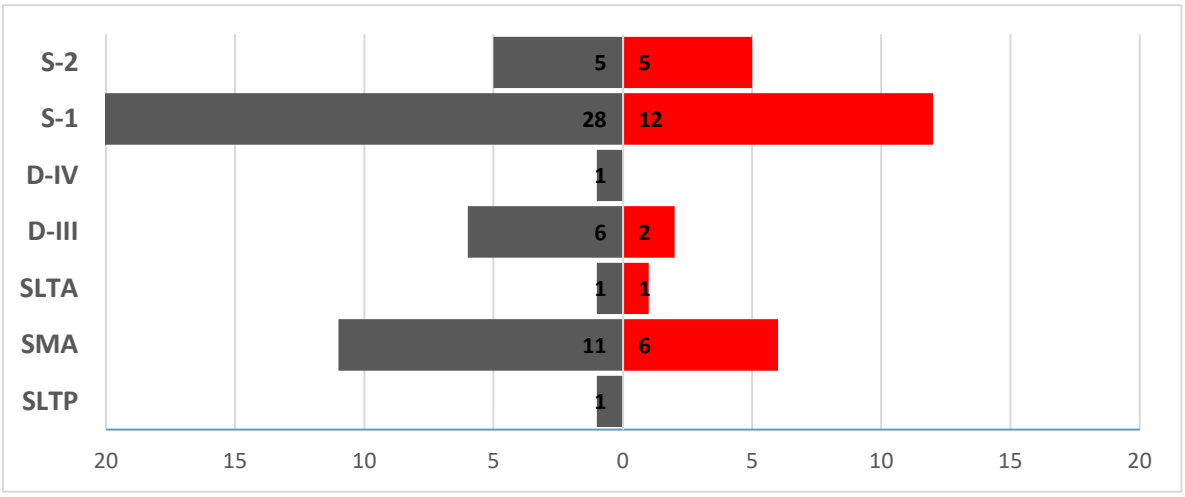

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD Prov Kalteng 2022

Gambar 7 Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Jabatan

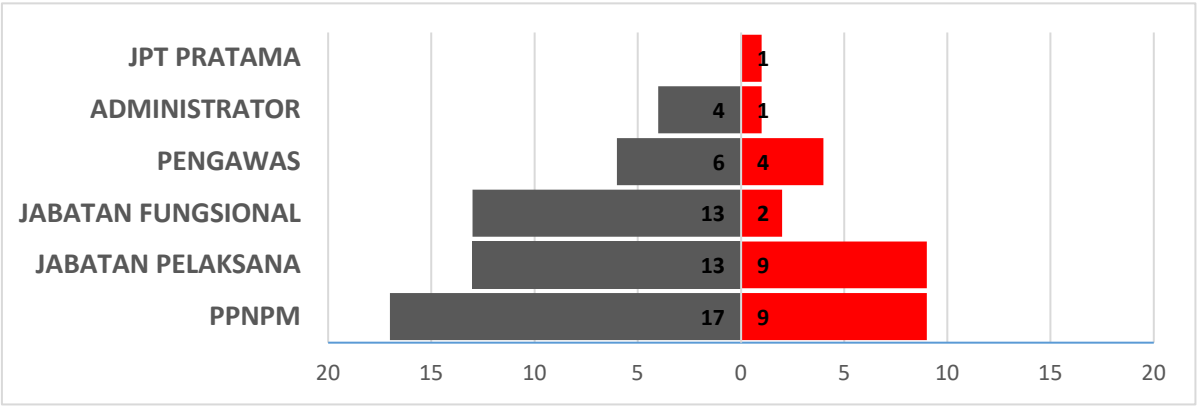

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD Prov Kalteng 2022

Gambar 8 Jumlah Pegawai BKD Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

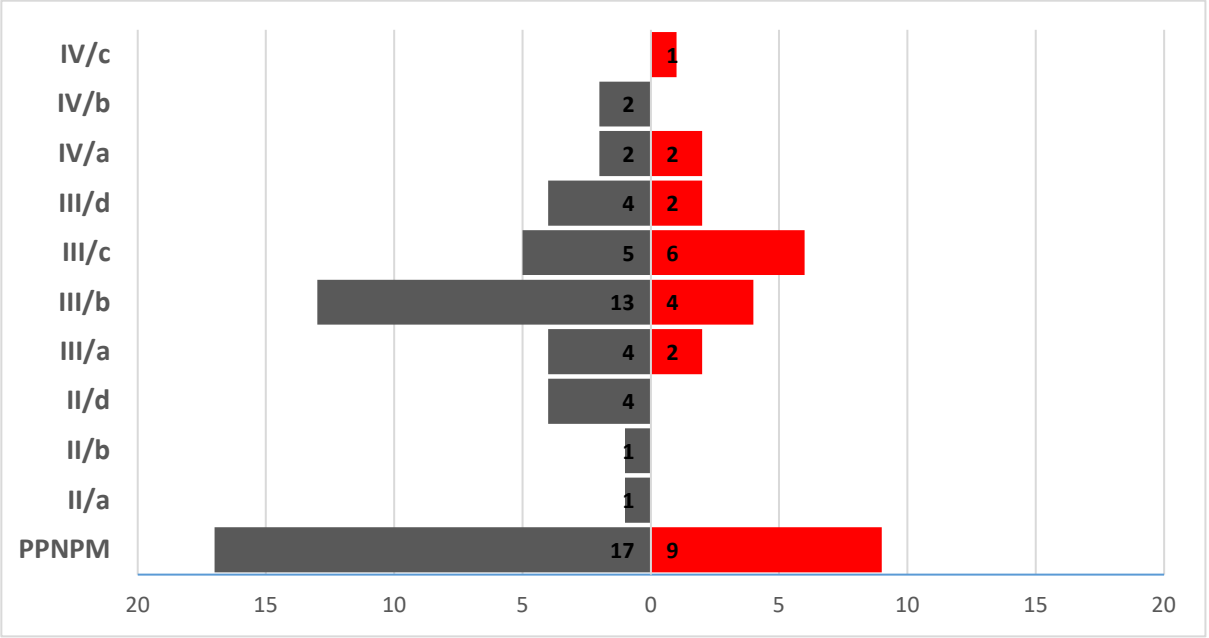

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD Prov Kalteng 2022

Aset yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Inventarisasi Aset Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No. Urut.	Kode	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	3	4	5	6	7
	1.3	***ASET TETAP***	***1,388***	***16,325,960,645.76***	
1	**1**	**TANAH**	**-**	**0**	
	1.01	TANAH	-	0	
2	**2**	**PERALATAN DAN MESIN**	**1,368**	**6,800,591,983.76**	
	2.01	ALAT BESAR	-	0	
	2.02	ALAT ANGKUTAN	34	2,235,905,011.00	
	2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	
	2.04	ALAT PERTANIAN	4	10,060,244.00	
	2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	939	2,111,719,257.76	
	2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	32	240,106,709.00	
	2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	
	2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	
	2.09	ALAT PERSENJATAAN	6	11,360,244.00	
	2.10	KOMPUTER	352	2,189,690,518.00	
	2.11	ALAT EKSPLORASI	-	0	
	2.12	ALAT PENGEBORAN	-	0	
	2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	0	
	2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	0	
	2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	0	
	2.16	ALAT PERAGA	-	0	
	2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	0	
	2.18	RAMBU-RAMBU	-	0	
	2.19	PERALATAN OLAH RAGA	1	1,750,000.00	
3	**3**	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**10**	**8,049,941,002.00**	
	3.01	BANGUNAN GEDUNG	9	8,001,112,202.00	
	3.02	MONUMEN	1	48,828,800.00	
	3.03	BANGUNAN MENARA	-	0	
	3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	0	
4	**4**	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**9**	**1,182,421,660.00**	
	4.01	JALAN DAN JEMBATAN	2	817,461,950.00	
	4.02	BANGUNAN AIR	-	0	
	4.03	INSTALASI	5	253,830,010.00	
	4.04	JARINGAN	2	111,129,700.00	

No. Urut	Kode	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
5	**5**	**ASET TETAP LAINNYA**	**1**	**293,006,000.00**	
	5.01	BUKU PERPUSTAKAAN	-		
	5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	0	
	5.03	HEWAN	-	0	
	5.04	BIOTA PERAIRAN	-	0	
	5.05	TANAMAN	1	293,006,000.00	
	5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	0	
	5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	0	
6	**6**	**KOSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**-**	**0**	
	6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	0	
	1.5	***ASET LAINNYA***	*276*	***1,673,157,053.92***	
1	**2**	**KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA**	**-**	**0**	
	2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	0	
2	**3**	**ASET TIDAK BERWUJUD**	**11**	**769,619,000.00**	
	3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	11	769,619,000.00	
3	**4**	**ASET LAIN-LAIN**	**265**	**903,538,053.92**	
	4.01	ASET LAIN LAIN	265	903,538,053.92	
TOTAL					

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset, BKD Prov Kalteng 2020

Kendaraan dinas terdiri dari 7 (tujuh) unit kendaraan dinas jabatan, 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional (pick up), 1 (satu) unit kendaraan roda tiga (angkutan barang), dan 22 (dua puluh dua) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip, pos jaga keamanan, ruang CAT, aula, ruang tunggu pelayanan terpadu satu pintu, ruang laktasi, mushola, gudang, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

Aspek Pendanaan

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun alokasi anggaran masing-masing unit kerja BKD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Alokasi APBD Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2016 - 2021

BIDANG	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sekretariat	3,195,542,400.00	3,180,423,465.00	3,757,687,841.00	4,643,672,100.00	2,770,298,549.00	9,386,040,034.00
Pengolahan Data Dan Pelayanan Informasi	811,465,085.00	627,426,500.00	1,178,985,150.00	798,530,900.00	310,414,050.00	159,591,750.00
Pengembangan	2,374,745,882.00	3,963,507,250.00	2,538,732,972.00	1,682,171,458.00	640,748,200.00	439,307,800.00
Mutasi	733,380,523.00	466,980,000.00	600,950,000.00	566,290,000.00	116,721,050.00	1,524,544,000.00
Disiplin Dan Kesejahteraan	560,488,110.00	1,841,598,285.00	3,701,948,243.00	1,829,129,000.00	311,581,500.00	897,233,500.00
TOTAL PAGU	7,675,622,000.00	10,079,935,500.00	11,778,304,206.00	9,519,793,458.00	4,149,763,349.00	12,406,717,084.00

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset, BKD Prov Kalteng 2021

D. Aspek Strategis Organisasi

Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai peran dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten, kompetitif, dan profesional melalui penyediaan pelayanan di bidang kepegawaian yang berkualitas.

Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan manajemen sumber daya maparatur terkait dengan pelaksanaan seleksi rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah yang bebas kepentingan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat terwujud.

Kemudian semakin mantapnya kebijakan pemberdayaan sumber daya aparatur yang memberi arahan pentingnya penggunaan pendekatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur guna meningkatkan kapasitas SDM aparatur sebagai proses integral yang tidak terpisahkan. Penerapan Sistem Merit yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam pemberdayaan sumber daya aparatur pemerintahan. Hal ini juga tidak terlepas dari tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang profesional dan berwawasan global.

Aspek strategis Badan Kepegawaian Daerah yang menjadi perhatian bagi peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian bagi sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Reformasi pelayanan kepegawaian meliputi rekonstruksi perencanaan, metode kerja, serta infrastruktur pelayanan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan saat ini. Hal ini dikarenakan masih cukup luasnya cakupan pelayanan bidang manajemen sumber daya aparatur guna mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang masuk kategori strategis;
2. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Saat ini masih belum terintegrasinya sistem pengembangan karier dengan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yaitu terkait penerapan e-Kinerja yang masih dalam proses;
3. Percepatan penerapan teknologi informasi dalam sistem kerja. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada aspek strategis perangkat daerah BKD Provinsi Kalimantan Tengah baik internal maupun eksternal, telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah serta telaahan Renstra Kementerian/Lembaga. Dari identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka berikut ini merupakan isu-isu strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah :

Gambar 9 Isu-Isu Aktual Bidang Kepegawaian

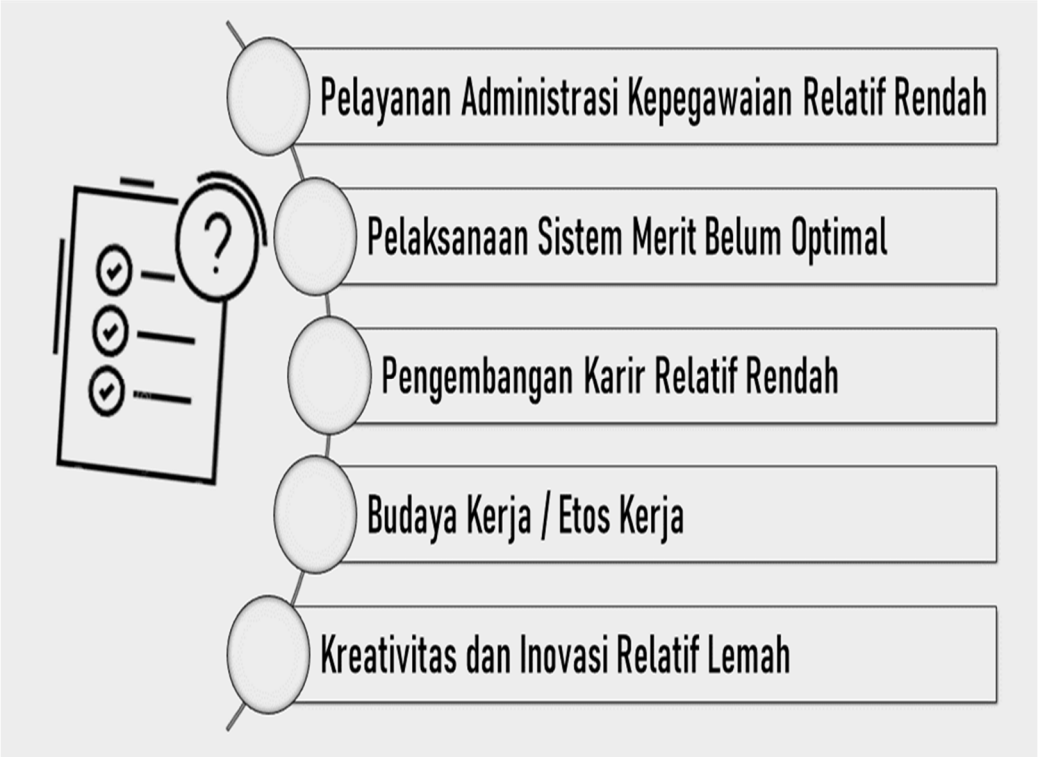

Sumber : Paparan Kepala BKD Prov. Kalteng dalam Pra Rakor Bidang Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2020, Palangka Raya 2020

Terdapat beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara bertahap untuk memecahkan permasalahan terkait isu-isu strategis yang ada pada saat ini diantaranya terangkum dalam *Milestone* Reformasi Pelayanan Kepegawaian serta beberapa upaya penyerta lainnya :

Gambar 10 Milestone Reformasi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah (April 2018-2021)

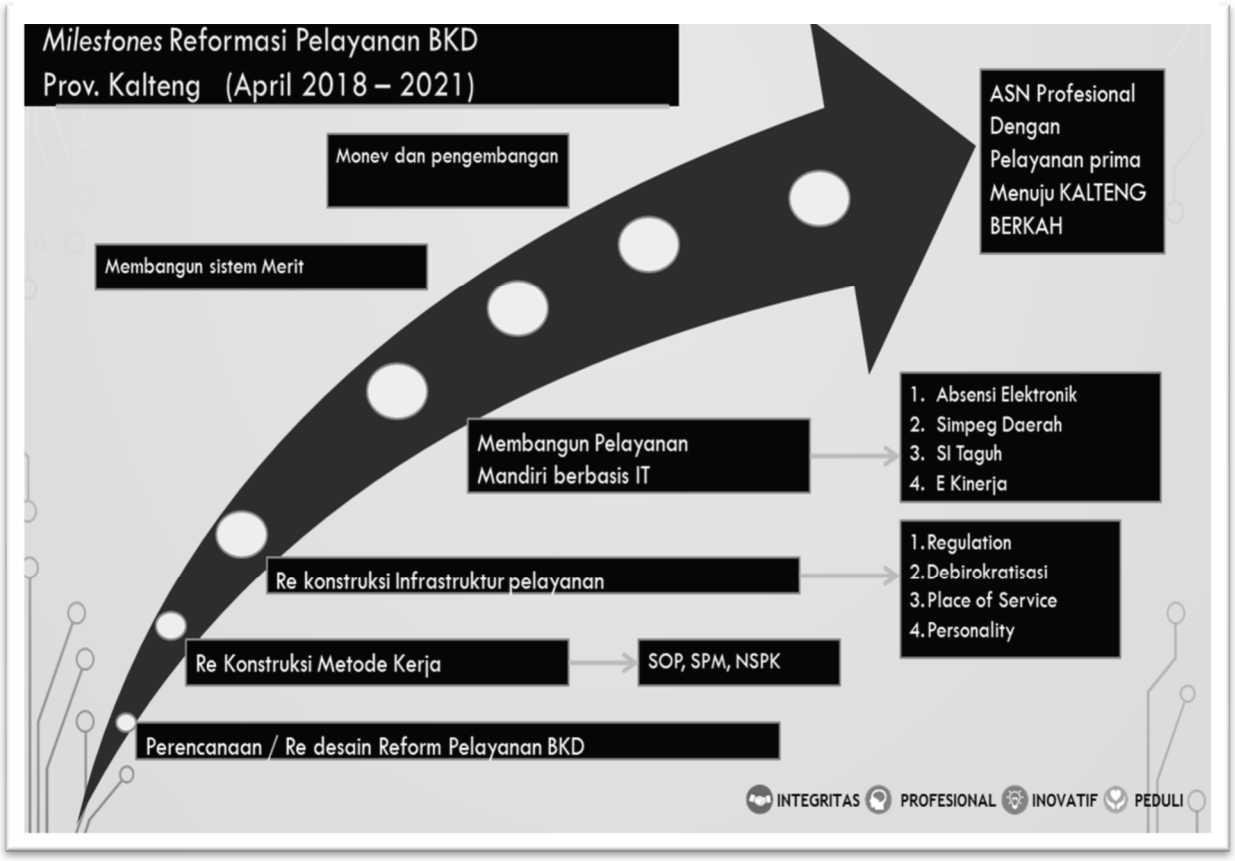

Sumber : Grand Design Program Kerja Kepala BKD Prov. Kalteng 2018-2021

Selain reformasi pelayanan kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan upaya dalam peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dan serta penguatan kelembagaan diantaranya :

1. Upaya peningkatan kualitas SDM aparatur atau Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten, kompetetif, dan profesional, ditetapkan kebijakan:
   a. Rekruitmen Aparatur Sipil Negara secara terbuka, transparan, objektif, bebas KKN melalui sistem CAT;
   b. Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara terbuka, dan objektif;
   c. Penataan dan pemberdayaan aparatur yang disesuaikan dengan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisis jabatan dan beban kerja, serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun;
   d. Memberikan kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan bagi aparatur sipil negara yang akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang menunjang tugas dan fungsi organisasi;

e. Penetapan jabatan administrasi, dan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Pengembangan sistem manajemen pengembangan aparatur berbasis merit sistem dan kompetensi;
g. Penyusunan pola karir Aparatur Sipil Negara;
h. Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan.

2. Upaya membentuk SDM yang bertanggung jawab, disiplin, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis ditetapkan kebijakan :
   a. Pembekalan bagi aparatur yang akan purna tugas;
   b. Pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara yang akan purna tugas;
   c. Pemberian tunjangan kinerja daerah dan tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan kinerja pegawai;
   d. Pengembangan nilai-nilai budaya kerja Aparatur Sipil Negara;
   e. Penyelenggaraan sosialisasi, desiminasi tentang kedudukan hak dan kewajiban aparatur sipil negara serta netralitas pegawai;
   f. Penegakkan peraturan disiplin aparatur, kode etik dan perilaku aparatur dan kode etik profesi;
   g. Pemberian perbaikan tambahan penghasilan dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Upaya mewujudkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pusat informasi kepegawaian di Kalimantan Tengah ditetapkan kebijakan:
   a. Pengembangan aplikasi SIMPEG sesuai dengan perkembangan dan perubahan teknologi informasi;
   b. Peningkatan kapasitas SDM yang langsung menangani sistem informasi berbasis WEB;
   c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja sistem informasi;
   d. Sinkronisasi database kepegawaian antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan data sistem maupun pengembangan aplikasi;
   e. Peremajaan data yang terprogram setiap triwulanan dalam 1 (satu) tahun;
   f. Optimalisasi jaringan yang mendukung kelancaran updating database, serta kerjasama dengan instansi terkait dalam penyediaan server database;
   g. Verifikasi database yang dapat mendukung Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar terintegrasi dengan database BKN dan Kabupaten/Kota;

h. Koneksisasi aplikasi sistem informasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan intansi terkait;
i. Penyelenggaraan pelayanan sistem informasi manajemen aparatur yang terintegrasi melalui penguatan database Aparatur Sipil Negara.

4. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kepegawaian ditetapkan kebijakan:
   a. Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen aparatur;
   b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)/Standar Pelayanan kepegawaian;
   c. Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan;
   d. Peningkatan standar mutu layanan kepegawaian dengan memperbaiki SOP pelayanan yang transparan, sederhana, dan mudah dimengerti;
   e. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik di bidang kepegawaian;
   f. Peningkatan kapasitas SDM aparatur yang terkait langsung dengan pelayanan.

E. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2021

Berdasarkan Laporan Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, Nomor : 700/50/LHE/2021/INSP, Tanggal : 5 Mei 2021, Untuk meningkatkan nilai kinerja Tahun 2021, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat yaitu sebagai berikut :

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	**Perencanaan Kinerja**	
a	Kinerja dalam Renstra tidak sepenuhnya sesuai dengan RPJMD karena beberapa hal	Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 memang tidak memuat indikator kinerja sasaran strategis bidang kepegawaian sehingga sasaran Strategis BKD hanya termuat dalam Renstra BKD menyesuaikan dengan misi ke-5 Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021.
b	Melakukan reviu secara berkala terhadap Renstra agar menghasilkan kondisi yang lebih baik dan relevan dengan kondisi saat ini	Sedang dalam proses membentuk Tim di SOPD untuk melakukan rapat monitoring dan evaluasi oleh Kepala SOPD, minimal semesteran, guna melakukan reviu terhadap Renstra dalam perencanaan kinerja agar terciptanya konsistensi dan relevansi antara

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Renstra dan kondisi saat ini
c	Target Kinerja harus berorientasi hasil	Target kinerja telah berorientasi dan dapat terukur, terlampir dalam perjanjian Kinerja SKPD BKD tahun 2021
d	Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun berikutnya agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Pemanfaatan Rencana Kinerja Tahunan dalam penyusunan anggaran sudah dimaksimalkan dan akan selalu dipastikan untuk lebih terperinci, relevan dan terukur dan mendorong untuk diterapkannya penyusunan anggaran berbasis kinerja
2	**Pengukuran Kinerja**	
a	Membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja	SOP telah dibuat dan terlampir
	Karena tidak ada SOP maka pengumpulan data kinerja tidak dapat diandalkan	SOP telah dibuat dan terlampir
b	Menerapkan pemberian penghargaan dan sanksi yang didasari dengan evaluasi pengukuran kinerja eselon III dan IV	Untuk pemberian reward dan punishment terkait capaian kinerja yang diperoleh, masih dalam tahap penyusunan tata cara/metode, terkait dengan ketersediaan dana yang ada.
c	Menerapkan reviu dokumen IKU secara berkala, sehingga dapat mengakomodir indikator kinerja pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMD	Reviu IKU ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, minimal semesteran, guna melakukan reviu terhadap IKU dalam perencanaan kinerja agar terciptanya konsistensi dan relevansi antara IKU dan kondisi saat ini
3	**Evaluasi Internal**	
a	Membuat bukti kesepakatan yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti	bukti kesepakatan terlampir
b	Menunjukkan bukti tindak lanjut hasil evaluasi program	bukti kesepakatan terlampir
4	**Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**	
a	Membuat upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya	Terlampir Instrumen pendukung Capaian Kinerja yang dimuat pada pada BAB II bagian D

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu media yang mengkomunikasikan pencapaian target kinerja organisasi di tahun 2021. Pencapaian target kinerja organisasi pada periode tersebut diukur melalui perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam satu tahun. Melalui analisis capaian target kinerja, BKD Provinsi Kalimantan Tengah akan mampu untuk mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) yang dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, sistematika penyajian LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta menjabarkan maksud, tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP tahun 2021.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Kinerja tahun 2021.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan analisis capaian kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, baik capaian kegiatan maupun sasaran strategis tahun 2021 termasuk akuntabilitas keuangan.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh serta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Selanjutnya, Renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

A. Rencana Strategis

A.1 Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 di buat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Sumber : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2016-2021

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, BKD Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian misi kelima yaitu Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dalam lingkup bidang kepegawaian misi ini mengisyaratkan perlunya Badan Kepegawaian Daerah selaku unsur penunjang bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

A.2 Tujuan dan Sasaran

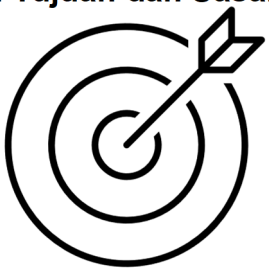

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan Tujuan Strategis berdasarkan visi dan misi. Rumusan tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran perwakilan merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Adapun isi sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. ***Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian***
2. ***Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT***
3. ***Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia***
4. ***Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur***
5. ***Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur***

Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD (2016-2021)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian	Jumlah aparatur yang terlayani	1050 Orang; 2720 SK	1350 Orang;; 2740 SK	1549 Orang; 2649 SK	1695 Orang; 3545 SK	2625 Orang; 4349 SK	4275 Orang; 4300 SK
		Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT	Jumlah Aparatur yang terdata	7000	8000	8500	9000	9500	10000
		Meningkatnya Kapasitas SDM	Jumlah aparatur yang berkualitas	200	225	250	275	300	325
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang dibina dan dikelola	840 Orang; 10 SK	854 Orang; 10 SK	904 Orang; 14 SK	920 Orang; 20 SK	1155 Orang; 20 SK	1240 Orang; 50 SK
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	6	6	7	7	8

Sumber : Dokumen Perubahan Rencana Strategis BKD Prov. Kalteng 2016-2021

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKD (2016-2021)

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	**Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian**	Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kepegawaian	Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen aparatur
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)/Standar Pelayanan kepegawaian
			Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan
			Peningkatan standar mutu layanan kepegawaian dengan memperbaiki SOP pelayanan yang transparan, sederhana, dan mudah dimengerti
			Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik di bidang kepegawaian

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan kapasitas SDM aparatur yang terkait langsung dengan pelayanan
2	**Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT**	Upaya mewujudkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pusat informasi kepegawaian di Kalimantan Tengah	Pengembangan aplikasi SIMPEG sesuai dengan perkembangan dan perubahan teknologi informasi
			Peningkatan kapasitas SDM yang langsung menangani sistem informasi berbasis WEB
			Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja sistem informasi
			Sinkronisasi database kepegawaian antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan data sistem maupun pengembangan aplikasi
			Peremajaan data yang terprogram setiap triwulanan dalam 1 (satu) tahun
			Optimalisasi jaringan yang mendukung kelancaran updating database, serta kerjasama dengan instansi terkait dalam penyediaan server database
			Verifikasi database yang dapat mendukung Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar terintegrasi dengan database BKN dan Kabupaten/Kota
			Koneksisasi aplikasi sistem informasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan intansi terkait
			Penyelenggaraan pelayanan sistem informasi manajemen aparatur yang terintegrasi melalui penguatan database Aparatur Sipil Negara
3	**Meningkatnya Kapasitas SDM**	Upaya membentuk SDM yang bertanggung jawab, disiplin, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis	Pembekalan bagi aparatur yang akan purna tugas
			Pemberian tunjangan kinerja daerah dan tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan kinerja pegawai
			Pengembangan nilai-nilai budaya kerja Aparatur Sipil Negara
			Penyelenggaraan sosialisasi, desiminasi tentang kedudukan hak dan kewajiban

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			aparatur sipil negara serta netralitas pegawai
			Penegakkan peraturan disiplin aparatur, kode etik dan perilaku aparatur dan kode etik profesi
			Pemberian perbaikan tambahan penghasilan dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Merit sesuai dengan kompetensi	Rekruitmen Aparatur Sipil Negara secara terbuka, transparan, objektif, bebas KKN melalui sistem CAT
			Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara terbuka, dan objektif
			Penataan dan pemberdayaan aparatur yang disesuaikan dengan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisis jabatan dan beban kerja, serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun
			Memberikan kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan bagi aparatur sipil negara yang akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang menunjang tugas dan fungsi organisasi
			Penetapan jabatan administrasi, dan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sumber : Dokumen Perubahan Rencana Strategis BKD Prov. Kalteng 2016-2021

B. Struktur Program dan Anggaran BKD Tahun 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Struktur Program dan Kegiatan yang terkait langsung dengan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
Meningkatnya Kapasitas SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48,855,000.00
Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	150,094,000.00
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	33,828,000.00
		Pengembangan Kompetensi ASN	22,060,000.00
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	83,382,000.00
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	1,389,972,000.00
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	974,686,800.00
		Pengembangan Kompetensi ASN	18,115,000.00
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	140,092,500.00
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36,718,000.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,355,277,752.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,025,568,228.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370,790,000.00

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,438,855,054.00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158,831,000.00
Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	159,591,750.00
JUMLAH			**12,406,717,084.00**

Sumber : DPPA APBD BKD Prov. Kalteng 2021

C. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Berdasarkan dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 11 Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. MUHAMAD KATMA F DIRUN, SE., MM**
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 7 Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE., MM
NIP. 19661022 199308 1 001

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Gambar 12 Lampiran I Penjelasan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas : Manajemen Aparatur Sipil Negara Daerah

Fungsi :

a. perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
b. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
c. penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, peningkatan kesejahteraan dan bantuan sosial serta kewirausahaan bagi ASN;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kebugaran jasmani dan pembinaan mental kerohanian serta seni budaya bagi ASN;
g. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional;
h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah; dan
i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	**Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian**	**Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian**	**Jumlah semua jenis kegiatan dan dokumen pelayanan kepegawaian yang dihasilkan dalam waktu 1 (satu) tahun**	**Rekapitulasi laporan bulanan tiap-tiap bidang pada Badan Kepegawaian Daerah yang menangani Pelayanan Kepegawaian**
		Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, Masa Kerja PNS	Jumlah SK kenaikan pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, SK Masa kerja PNS yang dihasilkan dalam waktu 1 (satu) tahun	Bidang Mutasi dan Pensiun, Bidang Disiplin dan Kesejahteraan

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Gambar 13 Lampiran II Penjelasan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Jumlah PNS Provinsi yang lulus seleksi untuk tugas belajar di luar daerah dan izin belajar sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan	Jumlah Dokumen SK tugas belajar, Surat Izin Belajar, Rekomendasi Tugas Belajar dan Surat Perjanjian Tugas Belajar	Bidang Pengembangan
		Jumlah PNS yang mengambil cuti, yang membuat KARIS/KARSU, dan SKP	Jumlah Dokumen PNS yang mengambil cuti, KARIS/KARSU dan SKP dalam waktu 1 (satu) tahun	Bidang Disiplin dan Kesejahteraan
		Jumlah PNS yang selesai proses penyelesaian SK mutasi	Jumlah Dokumen SK mutasi PNS yang terselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun	Bidang Mutasi dan Pensiun
		Jumlah penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas dapat diterima tepat waktu	Jumlah Dokumen SK PNS yang memasuki masa purna tugas yang terselesaikan dengan baik dan dapat diterima tepat waktu	Bidang Mutasi dan Pensiun
		Jumlah PNS yang menerima Satyalencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satyalencana Karya Satya dalam waktu 1 (satu) tahun	Bidang Disiplin dan Kesejahteraan
2	**Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT**	**Sistem Informasi Kepegawaian yang akuntabel dan dapat diakses publik**	**Terlaksananya proses update data PNS dan dokumen informasi lainnya yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun**	**Bidang Data dan Pelayanan Informasi**
		Tersedianya data PNS Pemprov Kalteng yang *up to date*	Jumlah *record* yang di *update* dari seluruh SKPD Pemprov Kalteng	Bidang Data dan Pelayanan Informasi
3	**Meningkatnya Kapasitas SDM**	**Jumlah PNS yang Meningkat Kapasitas SDM-nya**	**Jumlah PNS yang Meningkat Kapasitas SDM-nya melalui sosialisasi dan bimbingan teknis**	**Bidang Disiplin dan Kesejahteraan; Sekretariat**

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Gambar 14 Lampiran III Penjelasan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Terlaksananya sosialisasi dan meningkatnya kemampuan PNS pengelola kepegawaian pada SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisai peraturan kepegawaian	Bidang Disiplin dan Kesejahteraan
		Jumlah PNS yang meningkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme nya	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek/workshop/kursus/kursus singkat	Sekretariat
4	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Jumlah PNS yang Dibina dan Dikelola**	**Jumlah PNS yang Dibina dan Dikelola**	**Bidang Pengembangan ; Bidang Disiplin dan Kesejahteraan**
		Jumlah kebutuhan PNS provinsi dan CPNS baru sesuai dengan kebutuhan daerah	Jumlah Usulan Formasi Pegawai dan Jumlah CPNS yang sesuai dengan kebutuhan	Bidang Pengembangan
		Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu	Jumlah SK Pemberhentian PNS, Jumlah Laporan yang berkaitan dengan kedisiplinan, izin perceraian, PNS ke luar negeri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun	Bidang Disiplin dan Kesejahteraan
		Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian penyesuaian ijazah	Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian penyesuaian ijazah	Bidang Pengembangan
		Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian dinas	Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian dinas	Bidang Pengembangan
		Jumlah Capra IPDN sesuai alokasi formasi	Jumlah capra IPDN yang lulus dan diterima sesuai alokasi formasi	Bidang Pengembangan

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Gambar 15 Lampiran IV Penjelasan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
5	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor**	**Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor**	**Sekretariat**
		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat

Palangka Raya, 7 Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE., MM
NIP. 19661022 199308 1 001

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 16 Lembar 1 Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. MUHAMAD KATMA F DIRUN, SE., MM**
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 7 Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE., MM
NIP. 19661022 199308 1 001

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Gambar 17 Lembar 2 Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

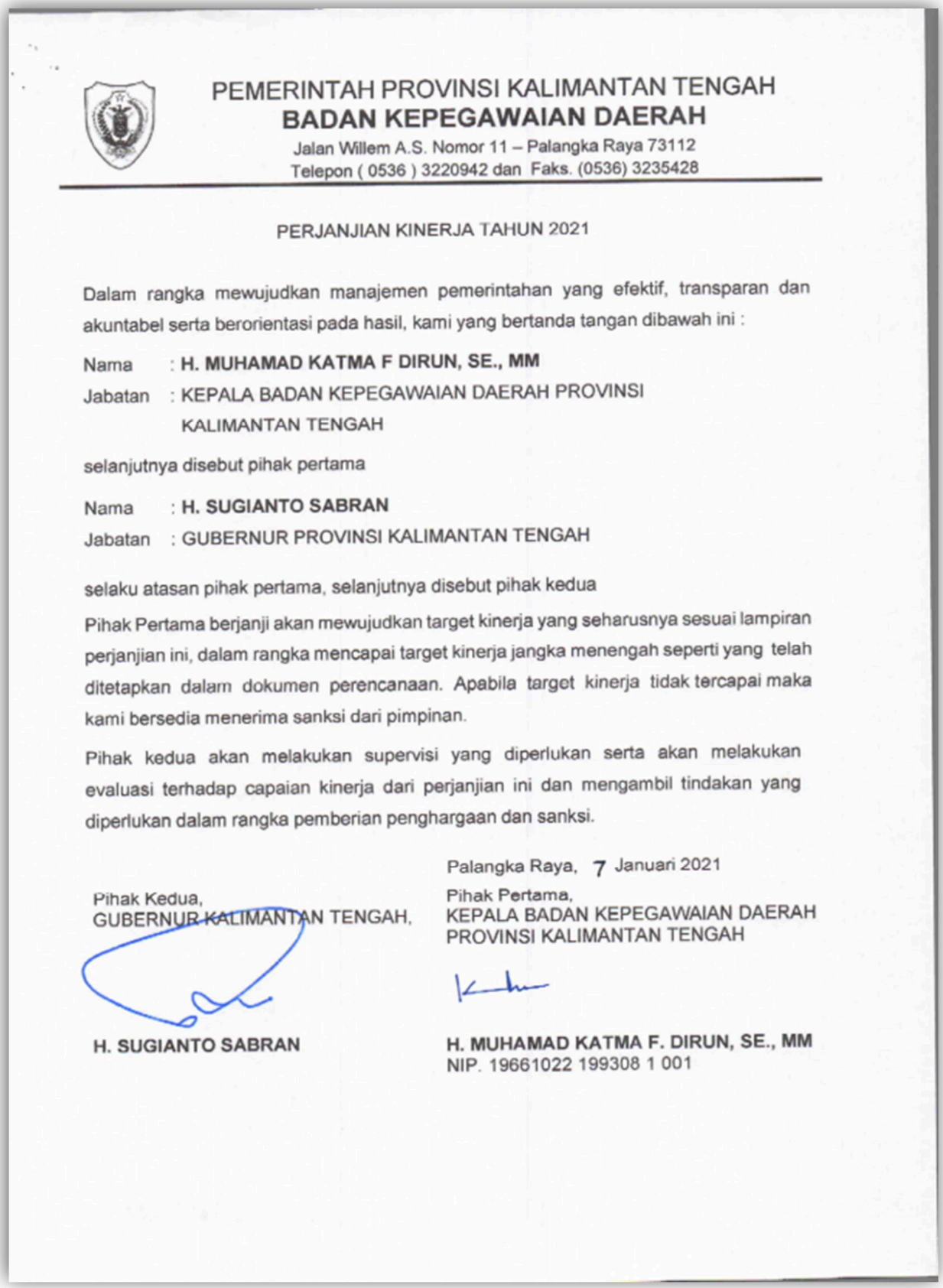

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. MUHAMAD KATMA F DIRUN, SE., MM**
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila target kinerja tidak tercapai maka kami bersedia menerima sanksi dari pimpinan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 7 Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE., MM
NIP. 19661022 199308 1 001

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Gambar 18 Lampiran I Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

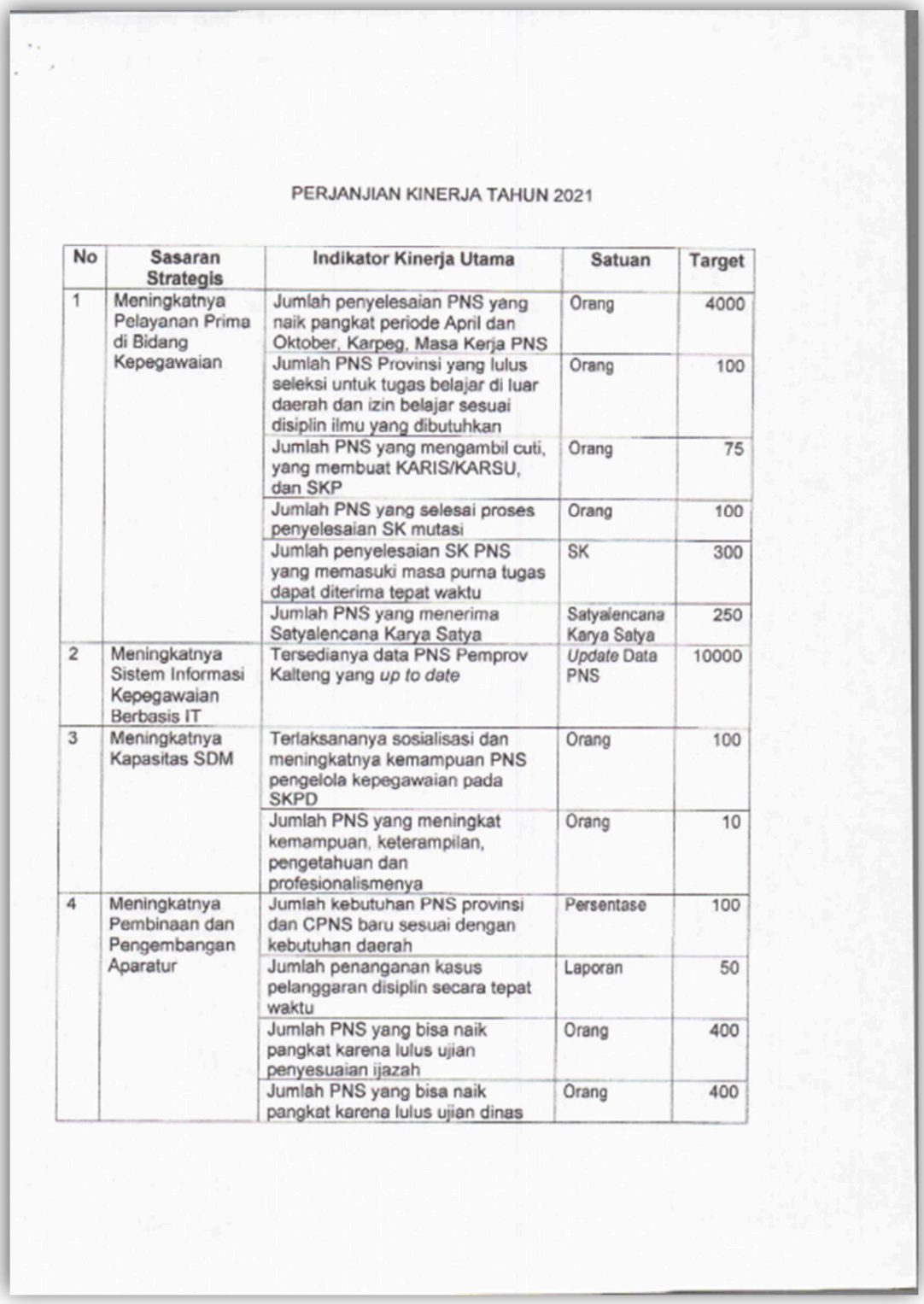

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian	Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, Masa Kerja PNS	Orang	4000
		Jumlah PNS Provinsi yang lulus seleksi untuk tugas belajar di luar daerah dan izin belajar sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan	Orang	100
		Jumlah PNS yang mengambil cuti, yang membuat KARIS/KARSU, dan SKP	Orang	75
		Jumlah PNS yang selesai proses penyelesaian SK mutasi	Orang	100
		Jumlah penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas dapat diterima tepat waktu	SK	300
		Jumlah PNS yang menerima Satyalencana Karya Satya	Satyalencana Karya Satya	250
2	Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT	Tersedianya data PNS Pemprov Kalteng yang *up to date*	*Update* Data PNS	10000
3	Meningkatnya Kapasitas SDM	Terlaksananya sosialisasi dan meningkatnya kemampuan PNS pengelola kepegawaian pada SKPD	Orang	100
		Jumlah PNS yang meningkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan profesionalismenya	Orang	10
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah kebutuhan PNS provinsi dan CPNS baru sesuai dengan kebutuhan daerah	Persentase	100
		Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu	Laporan	50
		Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian penyesuaian ijazah	Orang	400
		Jumlah PNS yang bisa naik pangkat karena lulus ujian dinas	Orang	400

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Gambar 19 Lampiran II Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

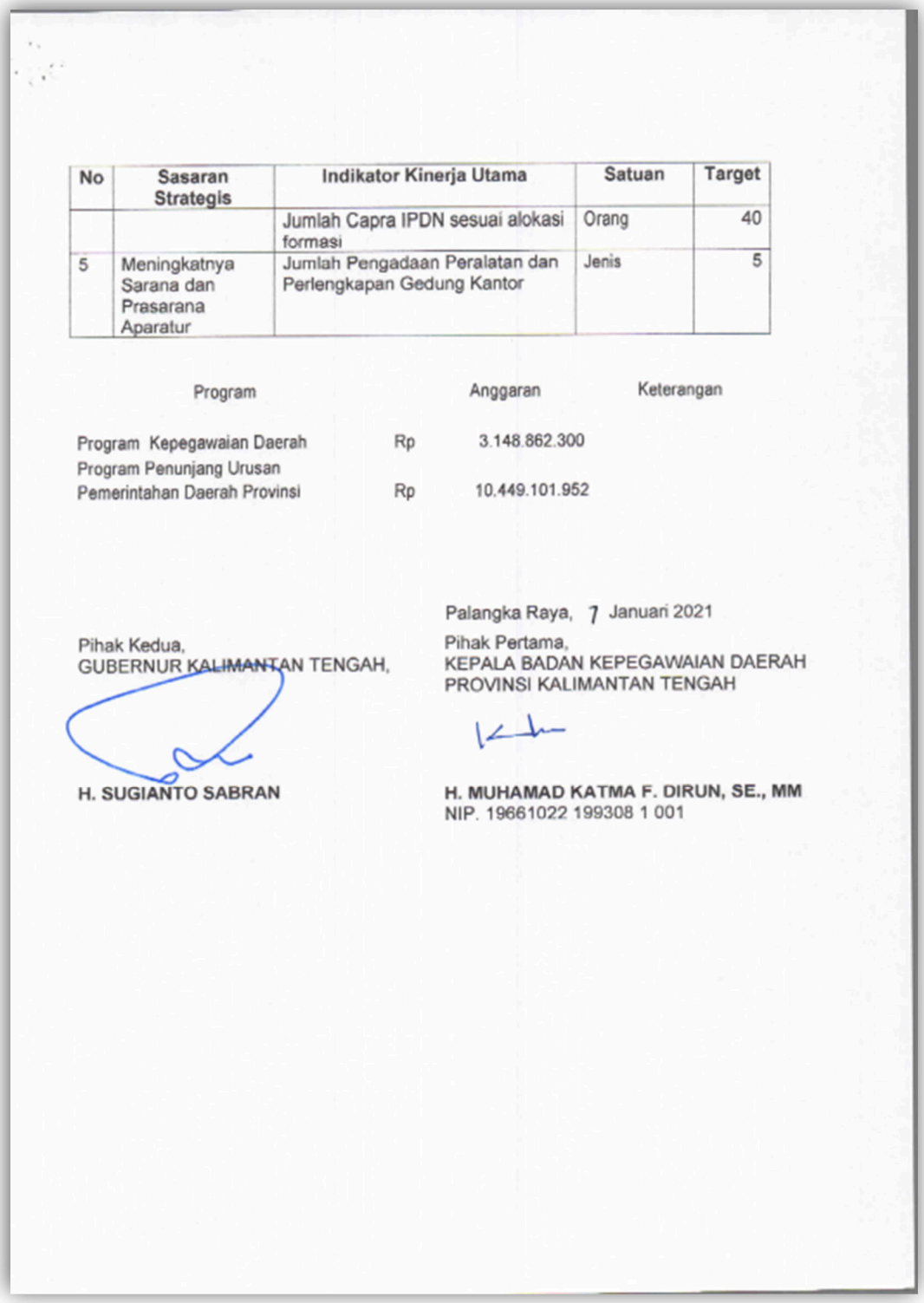

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
		Jumlah Capra IPDN sesuai alokasi formasi	Orang	40
5	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	5

Program		Anggaran	Keterangan
Program Kepegawaian Daerah	Rp	3.148.862.300	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	10.449.101.952	

Palangka Raya, 7 Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE., MM
NIP. 19661022 199308 1 001

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa sistem informasi yang membantu mewujudkan pelayanan prima dan layanan kepegawaian yang transparan bagi ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Instrumen pendukung capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

D.1 Sistem Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu

Dalam rangka mewujudkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik. Selama ini, pelayanan administrasi kepegawaian yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dirasa masih belum optimal karena sebelumnya untuk pelayanan konsultasi maupun pelayanan proses administrasi kepegawaian, dilakukan di ruang kerja masing-masing bidang. Sebagai bentuk inovasi maka disiapkan ruang pelayanan administrasi kepegawaian satu pintu yang disiapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dilengkapi dengan ruang tunggu dan ruang konseling. SOP pelayanan tersebut memiliki standar yang jelas, dari persyaratan, waktu serta tidak dipungut biaya.

Gambar 20 Ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKD Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Dokumentasi PPID, BKD 2021

Gambar 21 Alur Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKD

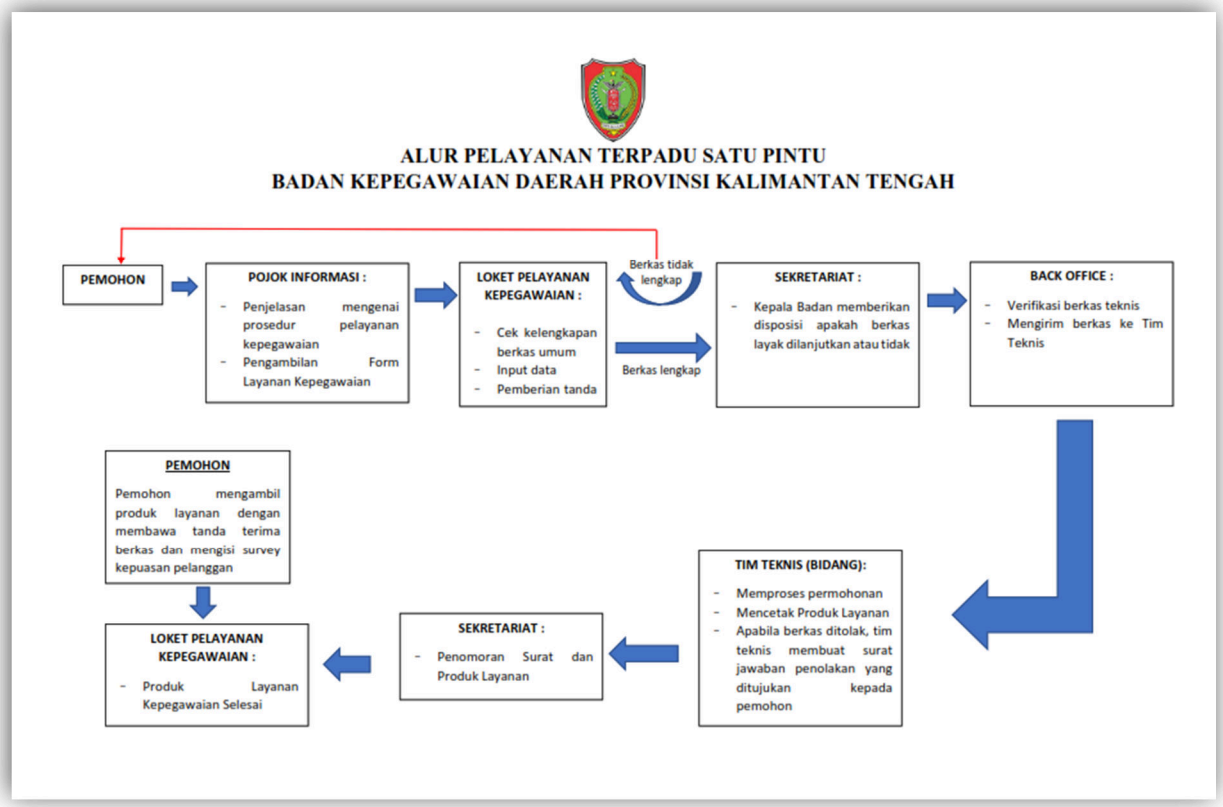

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BKD 2021

D.2 Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SiTAGUH) BKD

Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SITAGUH) merupakan Aplikasi Layanan Kepegawaian yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Aplikasi ini mencakup semua Pelayanan yang dilayani oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri. Gambaran Aplikasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 22 Aplikasi Si TAGUH BKD Provinsi Kalimantan Tengah

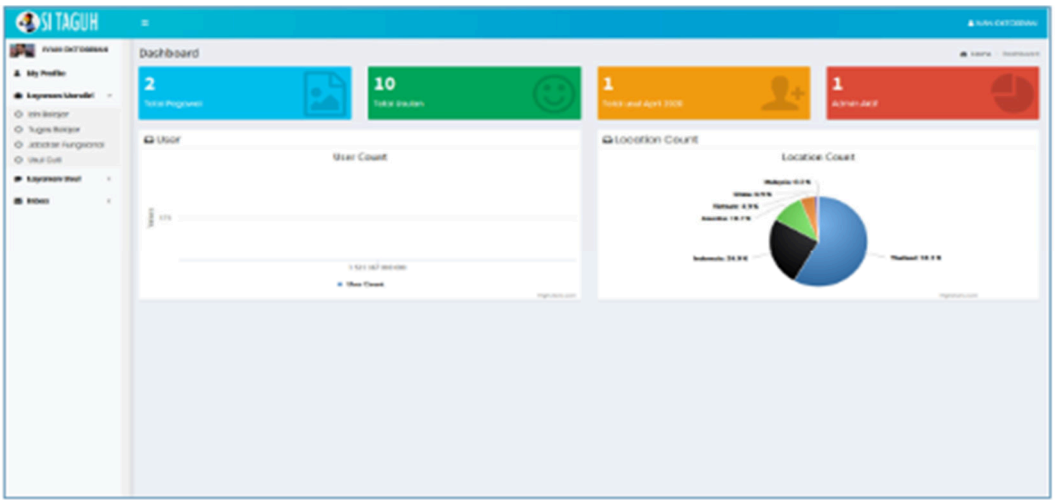

Sumber : Sub Bidang Pengolahanan Data, BKD 2021

Dalam aplikasi Si TAGUH terdapat layanan sebagai berikut :

a. Menu Layanan Mandiri meliputi
   i. Sub menu Izin Belajar
   ii. Sub menu Tugas Belajar
   iii. Sub menu Jabatan Fungsional

b. Menu Layanan Usul
   i. Sub Menu UKP
   ii. Sub Menu Mutasi PNS
   iii. Sub Menu Cantum Gelar
   iv. Sub Menu Karis/Karsu
   v. Sub Menu Perbaikan Data
   vi. Sub Menu Usulan Cuti
   vii. Sub Menu Usul Pensiun

D.3 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEGDA)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah atau yang diberi singkatan (SIMPEGDA) dibangun untuk memanajemen basis data kepegawaian yang terintegrasi dengan basis data Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Gambar 23 Aplikasi SIMPEGDA BKD Provinsi Kalimantan Tengah

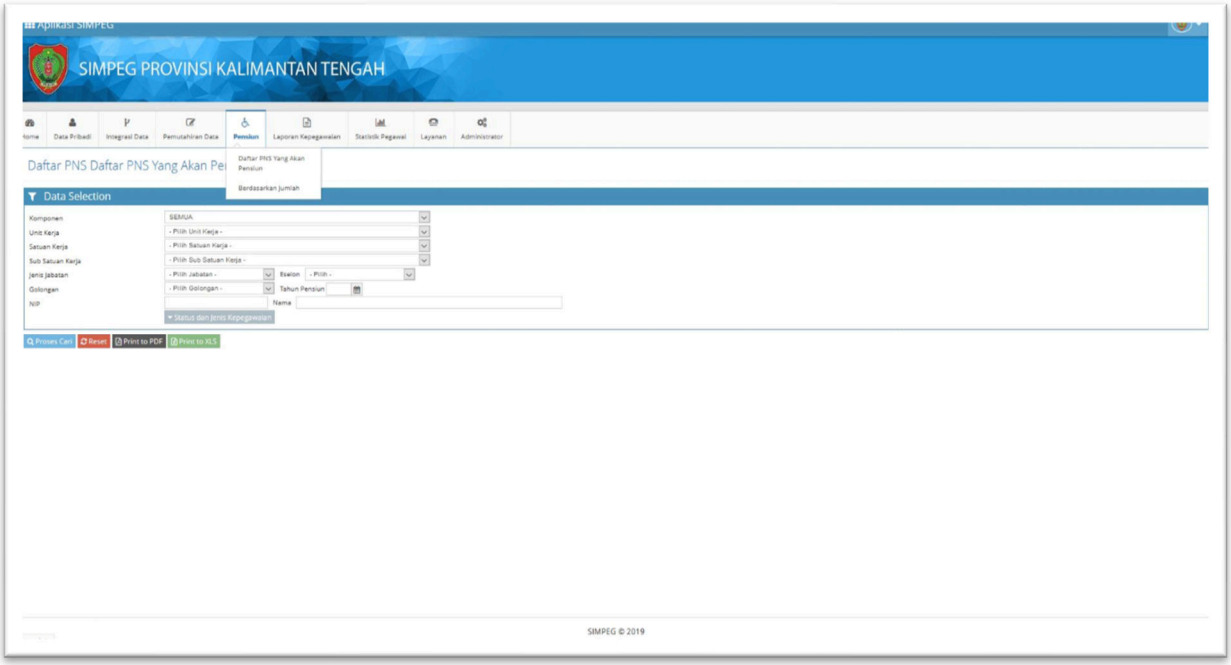

Sumber : Sub Bidang Pengolahanan Data, BKD 2021

D.4 Sistem Informasi Absensi Terpusat

Sistem Informasi Absensi Terpusat merupakan Absensi Online yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memanajemen data absensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 24 Aplikasi SIM Absensi Terpusat Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Sub Bidang Pengolahanan Data, BKD 2021

Aplikasi absensi online tersebut menjadi salah satu tolok ukur dalam mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* yang telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, seluruh SOPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara berkesinambungan melakukan koordinasi pengendalian administrasi dan teknis sistem daftar hadir elektronik (finger print) dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk pemotongan tunjangan kinerja melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

D.5 Website Resmi BKD Provinsi Kalimantan Tengah

Aplikasi website yang beralamat di bkd.kalteng.go.id yang menampilkan informasi terkait dengan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah baik itu dari bidang kepegawaian maupun informasi-informasi yang mendukung ketercapaian sasaran strategis.

Gambar 25 Tampilan Website BKD Provinsi Kalimantan Tengah

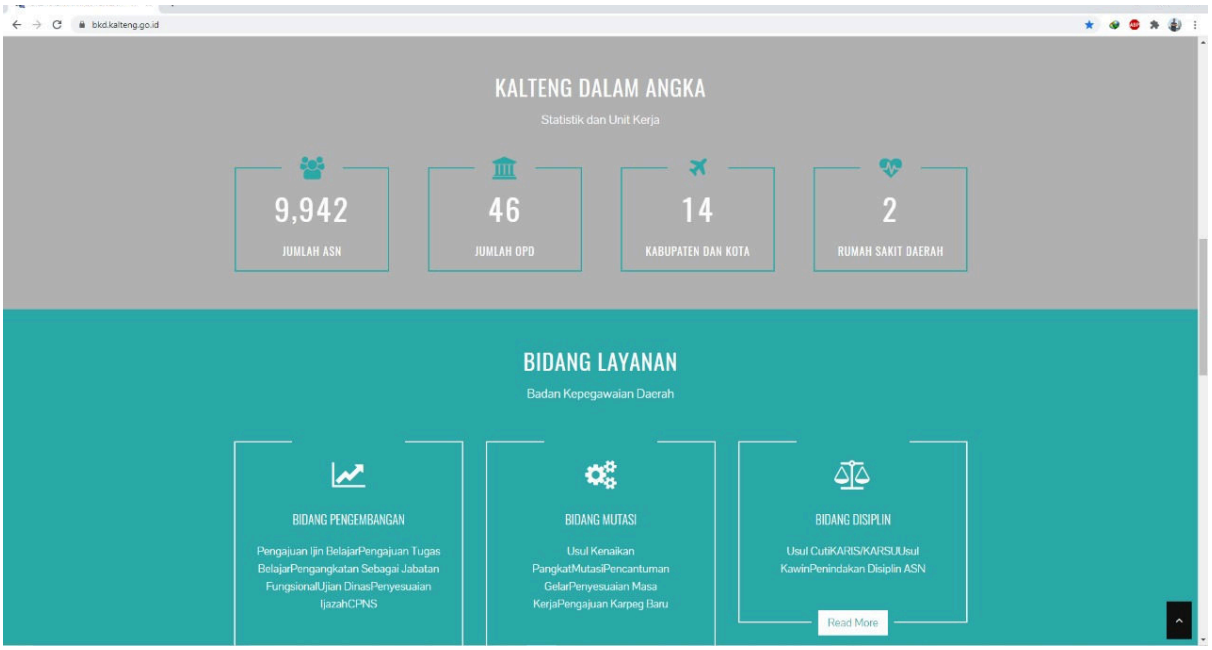

Sumber : Sub Bidang Pengolahanan Data, BKD 2021

D.6 Pelaksanaan seleksi yang berkaitan dengan pemenuhan kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT)

Computer Assisted Test didefinisikan sebagai suatu metode ujian dengan menggunakan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar maupun standar kompetensi kepegawaian. Protipe sistem CAT mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) Aplikasi menggunakan *platform windows* atau *open source* yang berbasis *website*; (2) Adanya narasi yang berisi petunjuk yang disajikan pada layar monitor komputer; (3) Aplikasi disertai video gerakan mouse untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya, dan (4) Dilengkapi tutorial dan teks yang berisi petunjuk pada layar monitor komputer agar semua peserta tes mudah dalam mengoperasikannya. Publikasi hasil tes dengan metode CAT meliputi publikasi hasil secara langsung bersamaan dengan waktu pelaksanan tes (*realtime*) melalui layar monitor yang disediakan di ruang monitoring dan ruang tunggu peserta. Selanjutnya publikasi hasil yang diterima oleh peserta pada layar monitor masing-masing komputer peserta. Selain itu, publikasi hasil tes juga dilakukan melalui papan pengumuman yang disediakan oleh panitia penyelenggara.

Gambar 26 Ujian Dinas Tingkat II menggunakan CAT Tahun 2020

Sumber : Dokumentasi PPID, BKD 2020

Ada beberapa kegiatan pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan BKD Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sistem CAT yaitu : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Asesmen Job Fit, Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I dan II, Seleksi CPNS, serta Asesmen Mutasi bagi ASN yang mengusulkan untuk beralih status kepegawaiannya menjadi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, hal ini bertujuan untuk memberikan pendekatan penilaian terhadap ASN sesuai dengan pemetaan kelembagaan yang diharapakan oleh pemangku kebijakan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin ketersediaan ASN yang professional dengan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara terencana dan terukur.

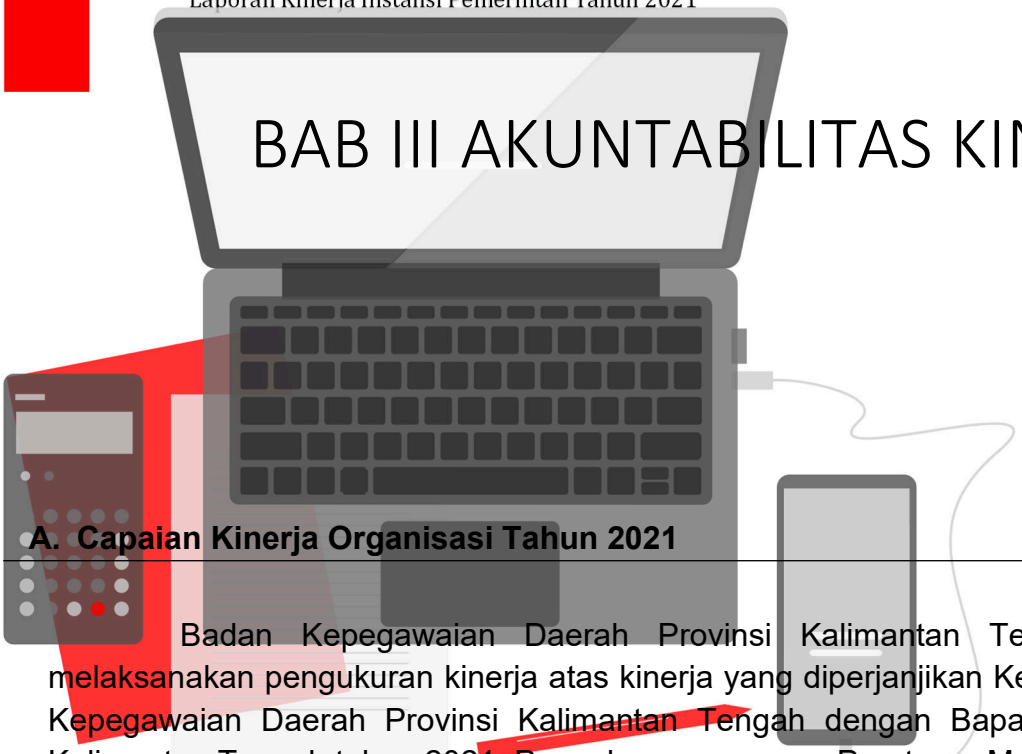

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Capaian	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 7 Capaian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Awal RPJMD	Target 2021	Capaian 2021	% Capaian 2021	Kriteria / kode	Target Akhir RPJMD
	Sasaran umum sesuai RPJMD 2016-2021 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	***Jumlah Aparatur yang mendapat pembinaan dan Pengembangan***	***Orang dan SK***	***2090 Orang ; 2750 SK***	***5790 Orang; 4600SK***	***6641 Orang; 6344 SK (114.70% dan 137.91%)***	***126.31***	***Sangat Tinggi***	***5840 Orang ; 4600 SK***
1	Meningkatnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	Jumlah Aparatur yang terlayani	Orang dan SK	1050 Orang; 2720 SK	4275 Orang; 4550 SK	6049 Orang; 6300 SK (141.50 % dan 138.46 %)	139.98	Sangat Tinggi	4275 Orang; 4300 SK
2	Meningkatnya sistem informasi kepegawaian berbasis IT	Jumlah Aparatur yang ter update	Update Data PNS/Tahun	7000	10000	9596	95.96	Sangat Tinggi	10000
3	Meningkatnya Kapasitas SDM	Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya	Orang	200	275	220	80	Tinggi	325
4	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah Aparatur yang dibina dan dikelola	Orang dan SK	900 Orang; 10 SK	1240 Orang; 50 SK	477 Orang; 44 SK (38.47% dan 88%)	63.23	Rendah	1240 Orang; 50 SK
5	Meningkatnya sarana dan prasarana	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan Kepegawaian	Jenis	5	5	5	100	Sangat Tinggi	8

Sumber : Laporan Triwulan BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Formulasi Indikator Sasaran Umum Daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

$$\frac{\left(\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ terlayani\ (Orang)}{Jumlah\ Target\ Sasaran\ (Orang)} \times 100\%\right) + \left(\frac{Jumlah\ Produk\ Layanan\ Kepegawaian\ yang\ dihasilkan\ (SK)}{Jumlah\ Target\ Sasaran\ (SK)} \times 100\%\right)}{2}$$

Selanjutnya akan ditampilkan perbandingan capaian Sasaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yaitu **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur** Pemerintahan berdasarkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Gambar 27 Grafik Perbandingan Capaian Sasaran Umum BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

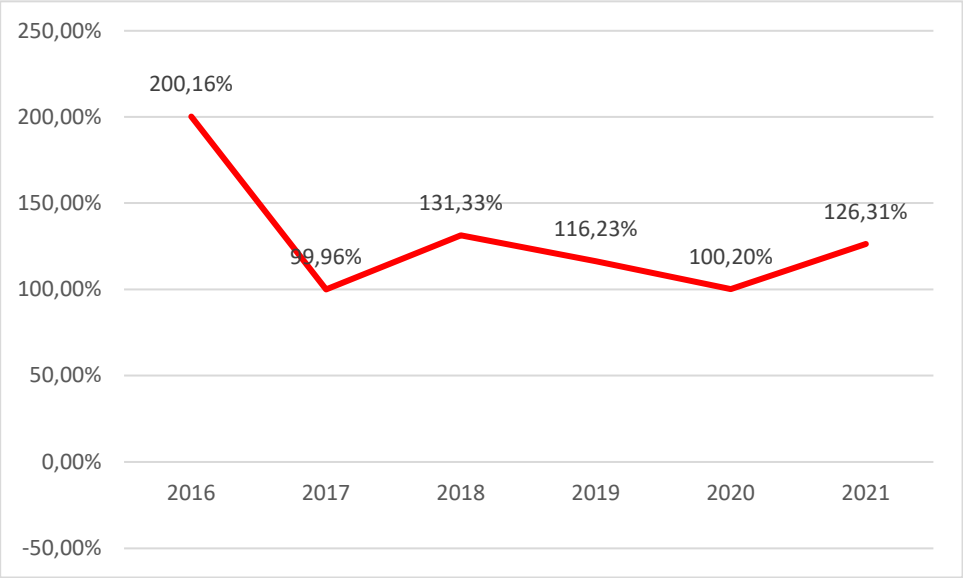

Sumber : Data diolah dari LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020, Laporan Kinerja 2021, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Tabel 8 Perbandingan Capaian Sasaran Umum BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

TAHUN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN AKHIR (%)	KATEGORI
2016	Jumlah Aparatur yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan	orang	2090	6672	319,23%	200.16*	SANGAT TINGGI*
		sk	2750	2230	81,09%		
2017	Jumlah Aparatur yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan	orang	2429	1748	71,96%	99.96	SANGAT TINGGI
		sk	2750	3519	127,96%		
2018	Jumlah Aparatur yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan	orang	2703	2253	83,35%	131.33	SANGAT TINGGI
		sk	2663	4775	179,31%		
2019	Jumlah Aparatur yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan	orang	2890	2332	80,69%	115.69	SANGAT TINGGI
		sk	3565	5372	150,69%		
2020	Jumlah Aparatur yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan	orang	3880	4330	111,60%	100,20	SANGAT TINGGI
		sk	4369	3880	88,81%		
2021	Jumlah Aparatur yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan	orang	5790	6641	114.70%	126.31	
		sk	4600	6344	137.91%		SANGAT TINGGI

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020, Laporan Kinerja 2021, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Berdasarkan data di atas, dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2020) capaian kinerja pada indikator Jumlah Aparatur yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 26.11% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dengan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan kepegawaian serta adanya reformasi sistem pelayanan kepegawaian yang handal dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan tuntutan zaman seperti penerapan sistem pelayanan jarak jauh melalui aplikasi SITAGUH BKD, konsultasi *online* dengan media sosial resmi BKD, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Adapun uraian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis perangkat daerah BKD Provinsi Kalimantan Tengah beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

A.1 Sasaran Strategis 1
"MENINGKATNYA PELAYANAN PRIMA DI BIDANG KEPEGAWAIAN"

Pelayanan kepegawaian merupakan suatu alat yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena produktivitas dari pelayanan kepegawaian dapat menjadi sebuah kriteria untuk memperoleh dukungan yang sangat besar dari masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, sangat diharapkan untuk mewujudkan semangat profesionalisme seluruh aparatur BKD sebagai perilaku mental yang memotivasi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi pegawai yang profesional yang mempunyai kemampuan tertentu untuk menjalankan roda administrasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

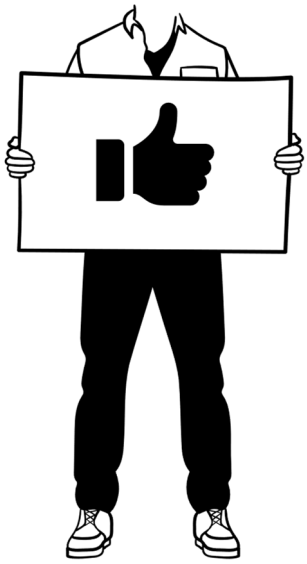

Kinerja sasaran strategis 1 : Meningkatnya Pelayananan Prima di Bidang Kepegawaian diukur dengan menggunakan indikator jumlah aparatur yang terlayani dengan satuan berupa jumlah orang serta jumlah SK yang dihasilkan sebagai output produk layanan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas indikator yang mendukung kinerja dari sasaran yang terdiri dari tabel berikut :

Tabel 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pelayanan Prima Di Bidang Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
I	**Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian** **Dengan meta indikator sebagai berikut :**	**Jumlah Aparatur yang terlayani serta dokumen yang dihasilkan dalam waktu 1 (satu) tahun**	**4275 Orang; 4550 SK**	**6049 Orang; 6300 SK** **(141.50% dan 138.46%)**	**139.98** **(Sangat Tinggi)**
I.1	Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, Masa Kerja PNS Keterangan : - PNS yang mengusul kenaikan pangkat dan PNS mengajukan usul Peninjauan Masa Kerja pada Tahun 2020 sejumlah 1629 Orang	Orang	4000	5599	139.98% (Sangat Tinggi)
	- SK yang dihasilkan dari kenaikan Pangkat dan	SK	4000	5599	139.98%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
	Peninjauan Masa Kerja sejumlah 1629 SK				(Sangat Tinggi)
I.2	Jumlah PNS Provinsi yang lulus seleksi untuk tugas belajar di luar daerah dan izin belajar sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan Keterangan : SK yang dihasilkan berupa SK Tugas Belajar; Surat Izin Belajar; serta SK Pengakuan Gelar sejumlah 239 SK	SK	100	182	182,00% (Sangat Tinggi)
I.3	Jumlah PNS yang mengambil cuti, yang membuat KARIS/KARSU, dan SKP	SK	75	200	266.6% (Sangat Tinggi)
I.4	Jumlah PNS yang selesai proses penyelesaian SK mutasi	SK	100	68	68% (Sedang)
I.5	Jumlah penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas dapat diterima tepat waktu	SK	300	473	157.67% (Sangat Tinggi)
I.6	Jumlah PNS yang menerima Satyalencana Karya Satya	SK	250	228	91.2% (Sangat Tinggi)

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020, Laporan Kinerja 2021, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Untuk formulasi indikator kinerja utama sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian” yaitu :

$$= \frac{\left(\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ terlayani\ (Orang)}{Jumlah\ Target\ Sasaran\ (Orang)} \times 100\%\right) + \left(\frac{Jumlah\ Produk\ Layanan\ Kepegawaian\ yang\ dihasilkan\ (SK)}{Jumlah\ Target\ Sasaran\ (SK)} \times 100\%\right)}{2}$$

$$= \frac{\left(\frac{6049}{4275} \times 100\%\right) + \left(\frac{6300}{4550} \times 100\%\right)}{2}$$

$$= 139.98\%$$

Untuk tahun 2021, rata-rata capaian sasaran strategis "Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian" adalah sebesar 139.98% dengan kategori Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 disajikan dalam bentuk grafik berikut ini :

Gambar 28 Grafik Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2016-2021

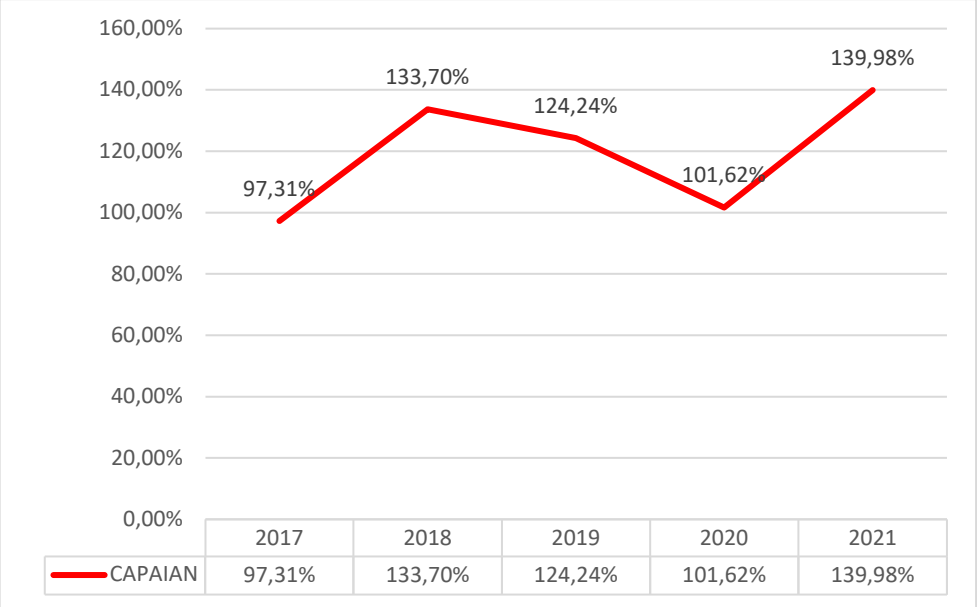

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020, Laporan Kinerja 2021, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Dari hasil perbandingan tersebut terlihat bahwa seiring dengan pertambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan.

Secara lebih terperinci akan ditampilkan perbandingan capaian kinerja pada indikator Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian pada tahun 2016-2021 dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 10 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2016-2021

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian per Satuan Target (%)	Rata-Rata Akhir Capaian (%)
2016	Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian	Orang	1.050	5.531	526,76%	302,35%* (Sangat Tinggi)
		SK	2.720	2.120	77,94%	
2017	Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian	Orang	1.350	898	66,52%	97,31% (Sangat Tinggi)
		SK	2.740	3.510	128,10%	
2018	Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian	Orang	1.549	1.358	87,67%	133,70% (Sangat Tinggi)
		SK	2.649	4.761	179,73%	
2019	Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian	Orang	1.695	1.650	97,35%	124,24% (Sangat Tinggi)
		SK	3.545	5.358	151,14%	
2020	Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian	Orang	2.625	2846	108,42%	101,62% (Sangat Tinggi)
		SK	4.349	4124	94,83%	
2021	Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian	Orang	4.275	6049	141.50%	139.98% *(Sangat Tinggi)*
		SK	4.550	6300	138.46%	

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2019, Laporan Kinerja 2020, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Adapun penjelasan masing-masing meta indikator adalah sebagai berikut :

a. **Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, Masa kerja PNS**

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Dasar hukum untuk Kenaikan Pangkat ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS.

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Adapun Peta Proses Bisnis Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat ASN maupun SK Peninjauan Masa Kerja dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 29 Proses Bisnis Kenaikan Pangkat dan Peninjauan Masa Kerja ASN

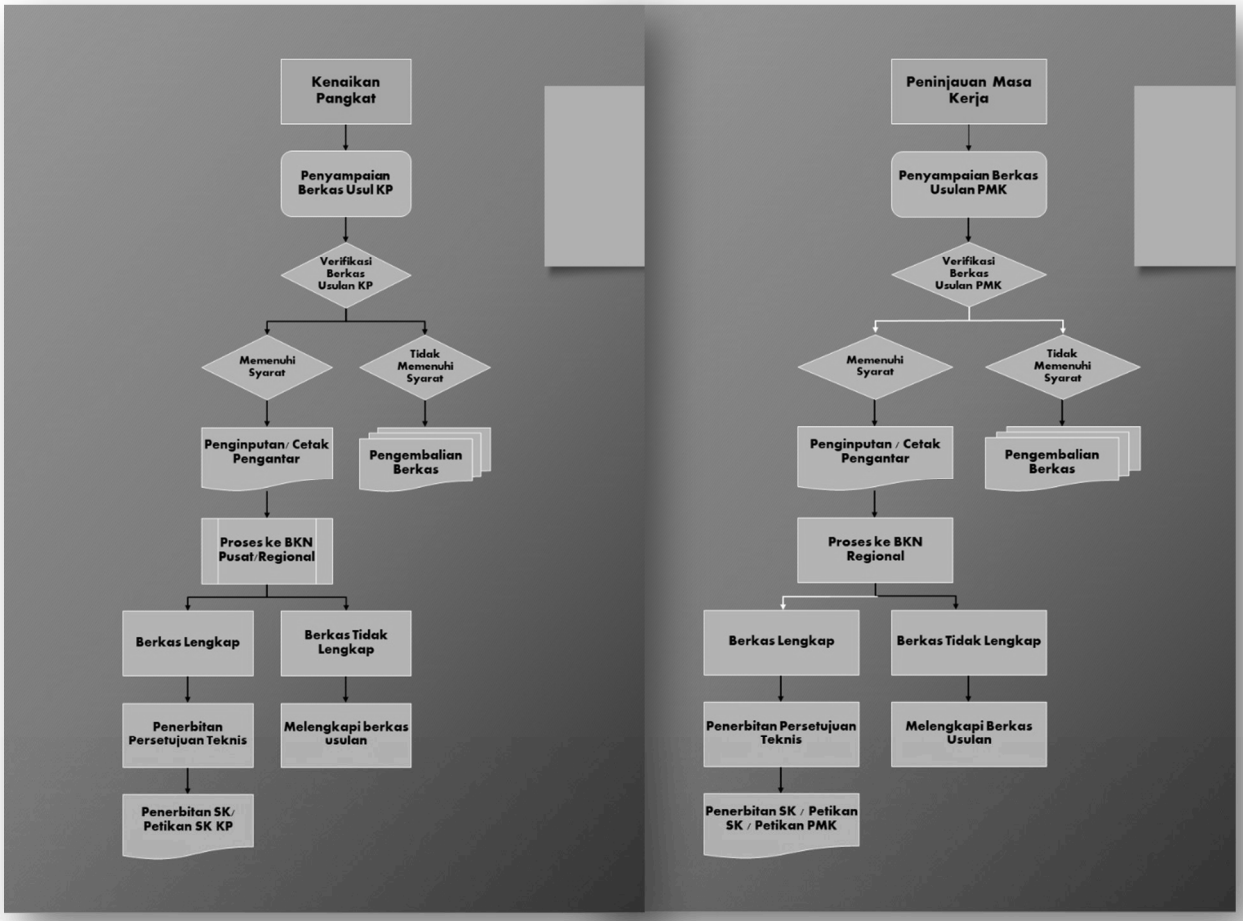

Sumber : Dokumen Peta Proses Bisnis BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Dokumen Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Hal ini diperlukan sebagai acuan bagi BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Untuk tahun 2021, rata-rata capaian dari meta indikator Jumlah penyelesaian PNS yang naik pangkat periode April dan Oktober, Karpeg, Masa kerja PNS adalah sebesar 139.98% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Kemudian perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 30 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jumlah Penyelesaian PNS Naik Pangkat, KARPEG, Masa Kerja PNS 2016-2021

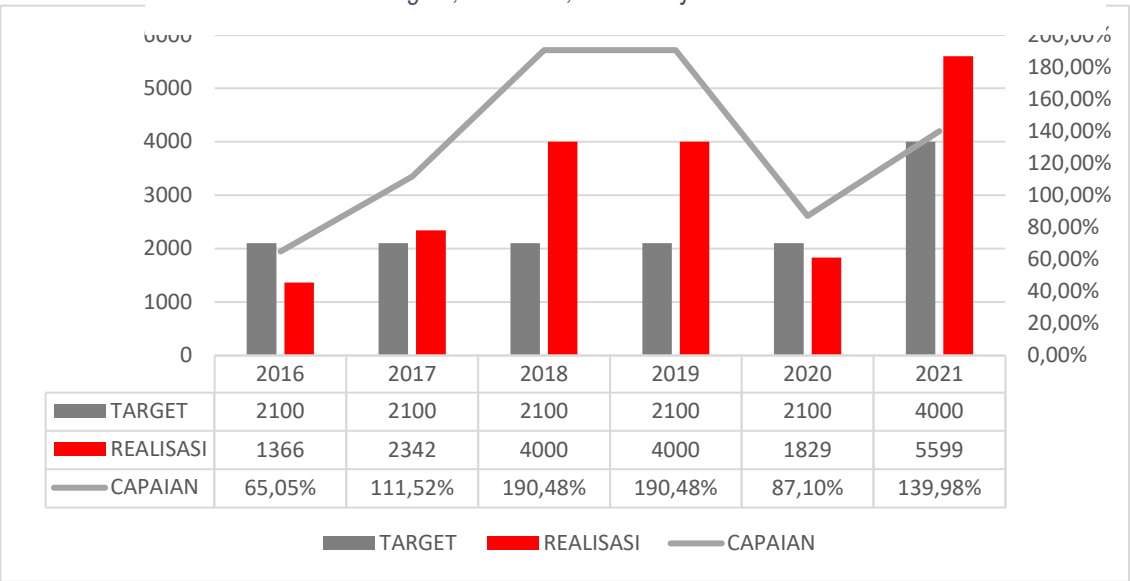

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TARGET	2100	2100	2100	2100	2100	4000
REALISASI	1366	2342	4000	4000	1829	5599
CAPAIAN	65,05%	111,52%	190,48%	190,48%	87,10%	139,98%

Sumber : Data diolah dari Dokumen Laporan Kinerja BKD 2016-2021

Dari sisi pencapaian kinerja tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Namun terdapat permasalahan yang telah dilaporkan secara berkala yaitu Beberapa pengelola kepegawaian di perangkat daerah mengusulkan kenaikan pangkat tidak sesuai dengan syarat dari BKD, solusi yang dilakukan oleh bidang teknis selama tahun berjalan yaitu mengharuskan ada verifikasi dokumen dari bagian kepegawaian SOPD yang bersangkutan sebelum diusulkan kenaikan pangkat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah berkas kenaikan pangkat ASN yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kemudian keterlambatan SK khususnya SK Kenaikan Pangkat dikarenakan untuk ASN dengan golongan IV/c ke atas harus ada rekomendasi dari pemerintah pusat, kesalahan tulis, salah NIP maupun adanya perubahan alamat terakhir yang seringkali tidak dilaporkan kembali saat pengurusan pensiun.

b. Jumlah PNS Provinsi Yang Lulus Seleksi Untuk Tugas Belajar, Penetapan Dan Monitoring Tugas Belajar Dan Izin Belajar

Meta Indikator kinerja kedua ini merupakan indikator yang dominan dalam pencapaian sasaran strategis pertama, pencapaian keberhasilan IKU ini juga berkorelasi secara langsung terhadap tercapainya IKU ketiga BKD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu “Meningkatnya Kapasitas SDM”. Kegiatan ini dilakukan untuk menyeleksi PNS yang berhak untuk melakukan tugas belajar dan melihat kelengkapan administrasi untuk tugas belajar dari masing-masing penerima tugas belajar. Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai perkembangan kualitas sumber daya manusia yang ada pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Dasar hukum pemberian Tugas Belajar

maupun Izin Belajar tertuang pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2010.

Adapun Peta Proses Bisnis Seleksi Penetapan dan Monitoring Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 31 Peta Proses Bisnis Seleksi Penetapan dan Monitoring Tugas Belajar dan Izin Belajar

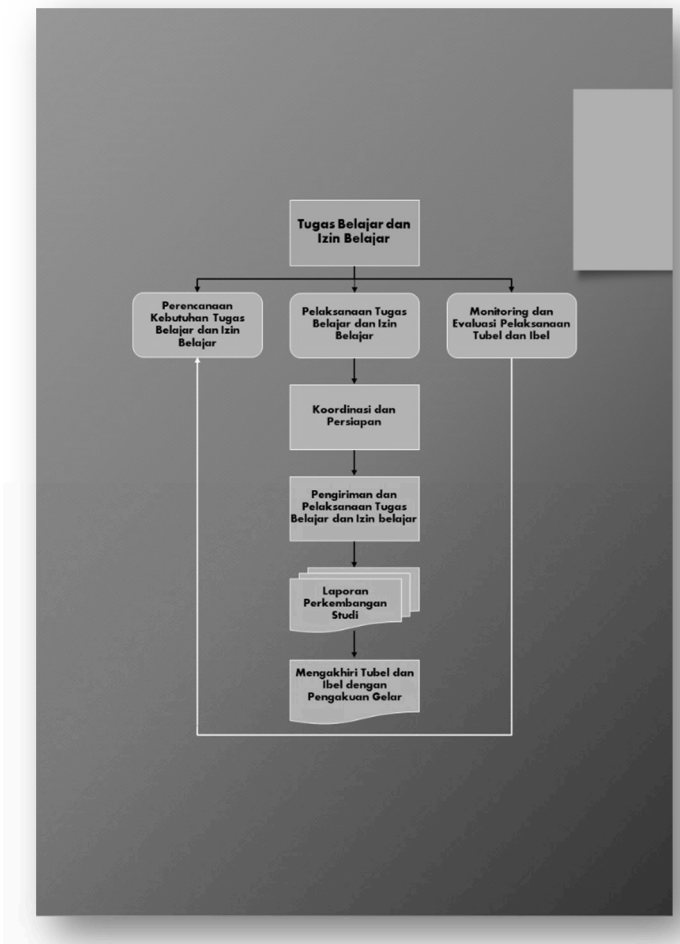

Sumber : Dokumen Peta Proses Bisnis BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Untuk indikator kinerja utama Jumlah PNS Provinsi yang Lulus Seleksi untuk Tugas Belajar di Luar Daerah dan Izin Belajar sesuai Disiplin Ilmu yang Dibutuhkan direalisasikan dalam program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yaitu pada kegiatan Seleksi Penetapan dan Monitoring Tugas Belajar dan Izin Belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi perangkat daerah serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir PNS.

Dengan adanya tugas belajar dan izin belajar akan memberi kesempatan kepada PNS untuk meningkatkan pendidikan yang akan

sekaligus membantu dalam meniti karier. Pendidikan menjadi menjadi salah satu dasar menentukan grading tunjangan dan juga pertimbangan mutasi/promosi.

Untuk tahun 2021, rata-rata capaian dari meta indikator Jumlah PNS Provinsi Yang Lulus Seleksi Untuk Tugas Belajar, Penetapan Dan Monitoring Tugas Belajar Dan Izin Belajar adalah sebesar 182% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah melampaui target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Gambar 32 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jumlah PNS Provinsi Yang Lulus Seleksi Untuk Tugas Belajar, Penetapan Dan Monitoring Tugas Belajar Dan Izin Belajar 2016-2021

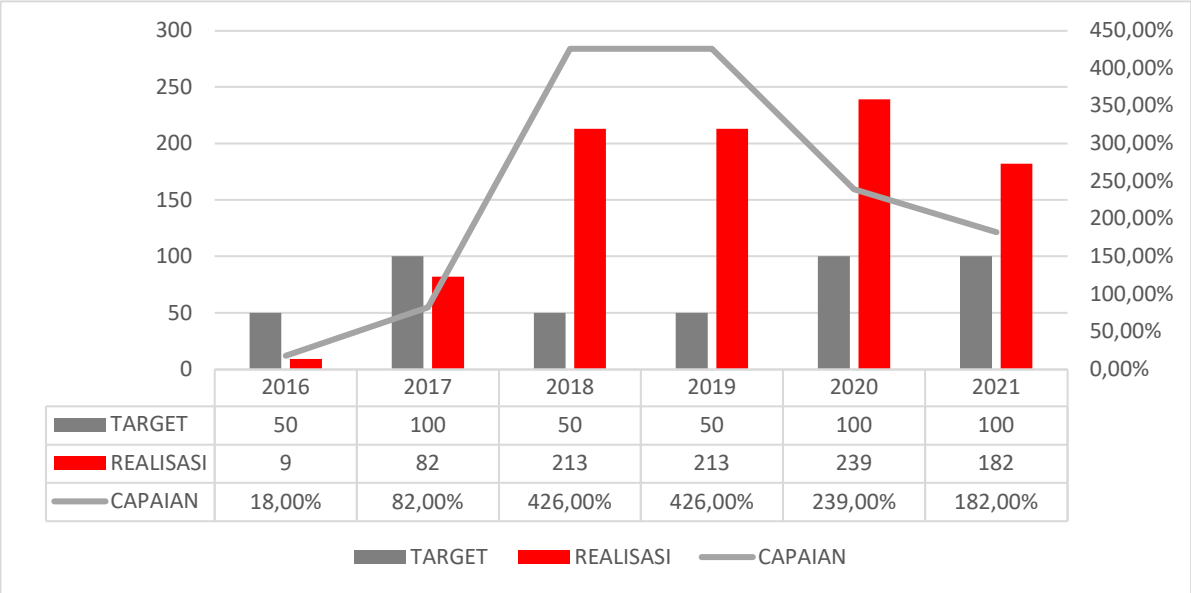

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TARGET	50	100	50	50	100	100
REALISASI	9	82	213	213	239	182
CAPAIAN	18,00%	82,00%	426,00%	426,00%	239,00%	182,00%

Sumber : Data diolah dari Dokumen Laporan Kinerja BKD 2016-2021

Dari sisi pencapaian kinerja sudah tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Namun terdapat permasalahan yang telah dilaporkan secara berkala yaitu ASN yang ingin melanjutkan Pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar sering terlambat melakukan pengurusan berkas usul SK Tugas Belajar atau SK Izin Belajar, kebanyakan yang terjadi pengusul sudah dalam proses perkuliahan baru mengajukan usul ke BKD. Solusi yang dilakukan oleh bidang teknis selama tahun berjalan yaitu memberikan pengarahan kepada bagian kepegawaian SOPD pengusul untuk lebih proaktif dalam menangani hal dimaksud. Hal ini bertujuan agar SK Tugas Belajar maupun SK Izin Belajar dapat diterima oleh ASN tepat waktu.

c. Jumlah PNS yang mengambil cuti, yang membuat KARIS/KARSU, dan SKP

Untuk tahun 2021, rata-rata capaian dari meta indikator Jumlah PNS yang mengambil cuti, yang membuat KARIS/KARSU, dan SKP adalah sebesar 266.67% dengan kategori Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah melampaui target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Pada tahun 2021 target kinerja mengalami pengurangan dikarenakan ada beberapa pertimbangan salah satunya adanya kebijakan PPKM level 3 sehingga aturan cuti asn lebih diperketat.

Gambar 33 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jumlah PNS yang Mengambil Cuti, yang Membuat KARIS/KARSU dan SKP 2016-2021

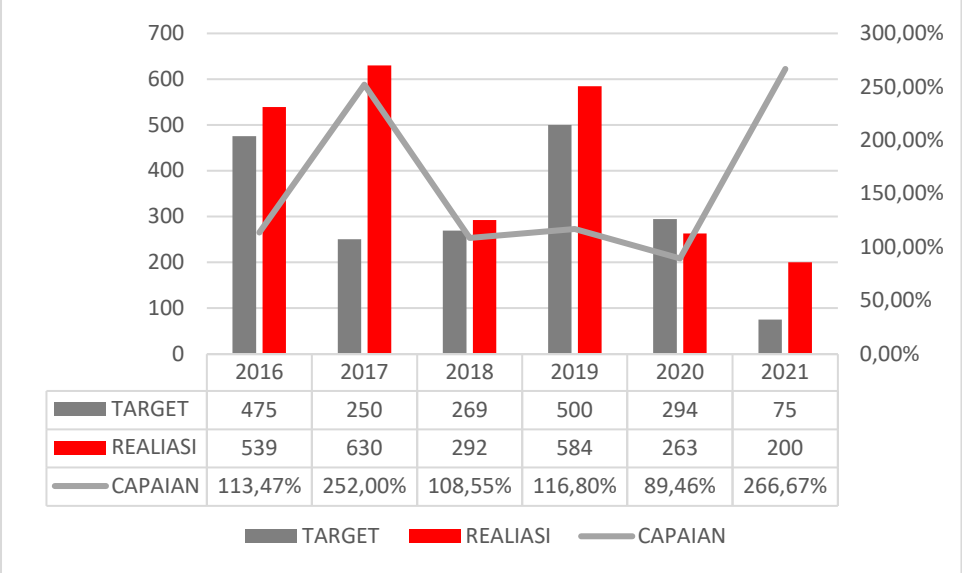

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TARGET	475	250	269	500	294	75
REALIASI	539	630	292	584	263	200
CAPAIAN	113,47%	252,00%	108,55%	116,80%	89,46%	266,67%

Sumber : Data diolah dari Dokumen Laporan Kinerja BKD 2016-2021

Peta proses bisnis untuk Cuti, KARIS/KARSU, serta SKP dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 34 Peta Proses Bisnis Pelayanan Kesejahteraan PNS, Usul SKP, dan Usul Cuti PNS

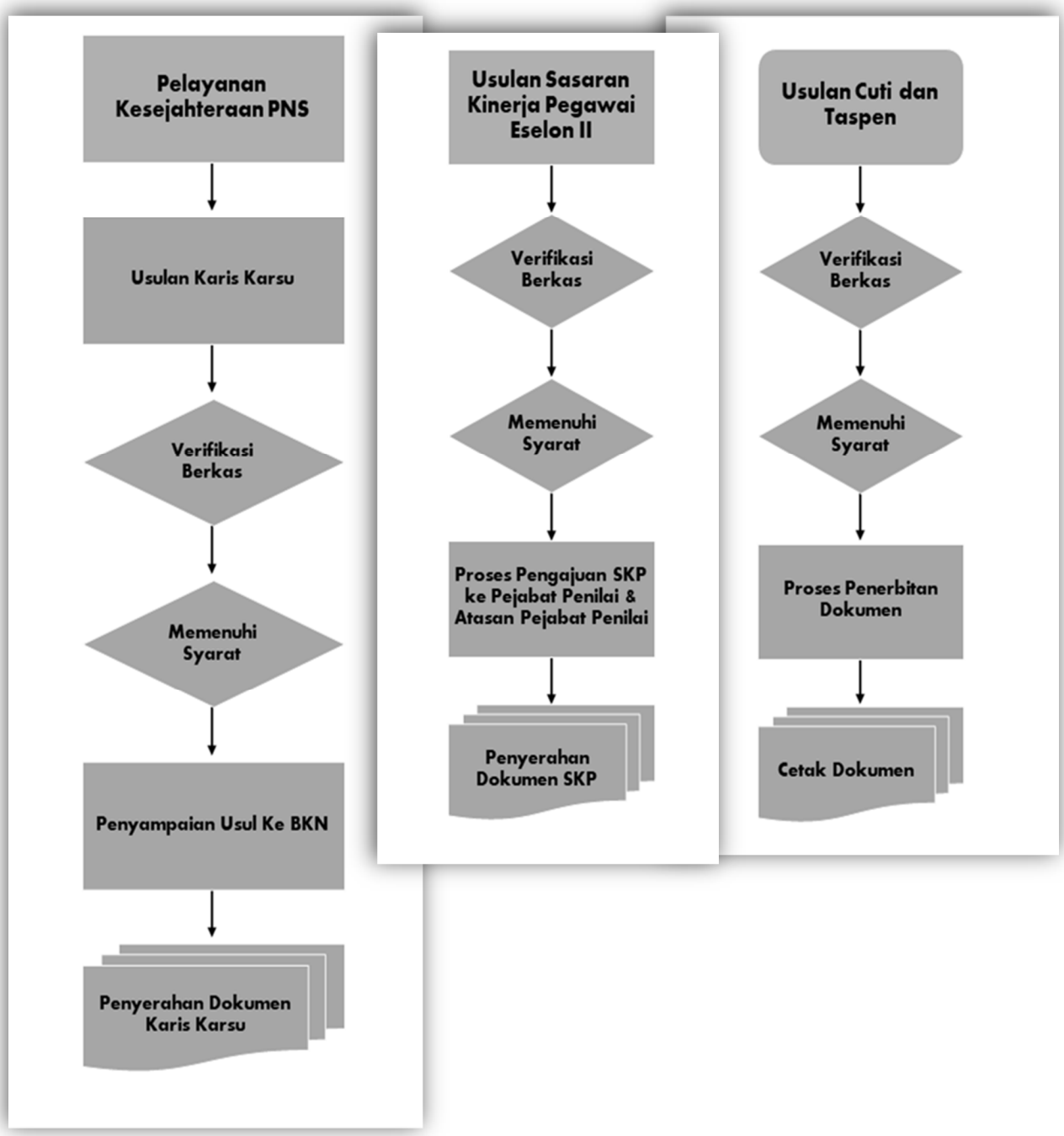

Sumber : Dokumen Peta Proses Bisnis BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

d. Jumlah PNS yang selesai proses penyelesaian SK mutasi

Meta Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat pelayanan kepindahan/mutasi PNS dari kabupaten/kota. Banyaknya usulan mutasi tersebut tidak semua dapat diakomodir. Meta Indikator ini dihitung dengan membandingkan antara realisasi laporan hasil penyelesaian SK mutasi dengan target SK mutasi yang ditentukan. Untuk tahun 2021, rata-rata capaian dari meta indikator Jumlah PNS yang selesai proses penyelesaian SK Mutasi adalah sebesar 68% dengan kategori Rendah.

Adapun peta proses bisnis Penyelesaian SK Mutasi dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 35 Peta Proses Bisnis Penyelesaian SK Mutasi

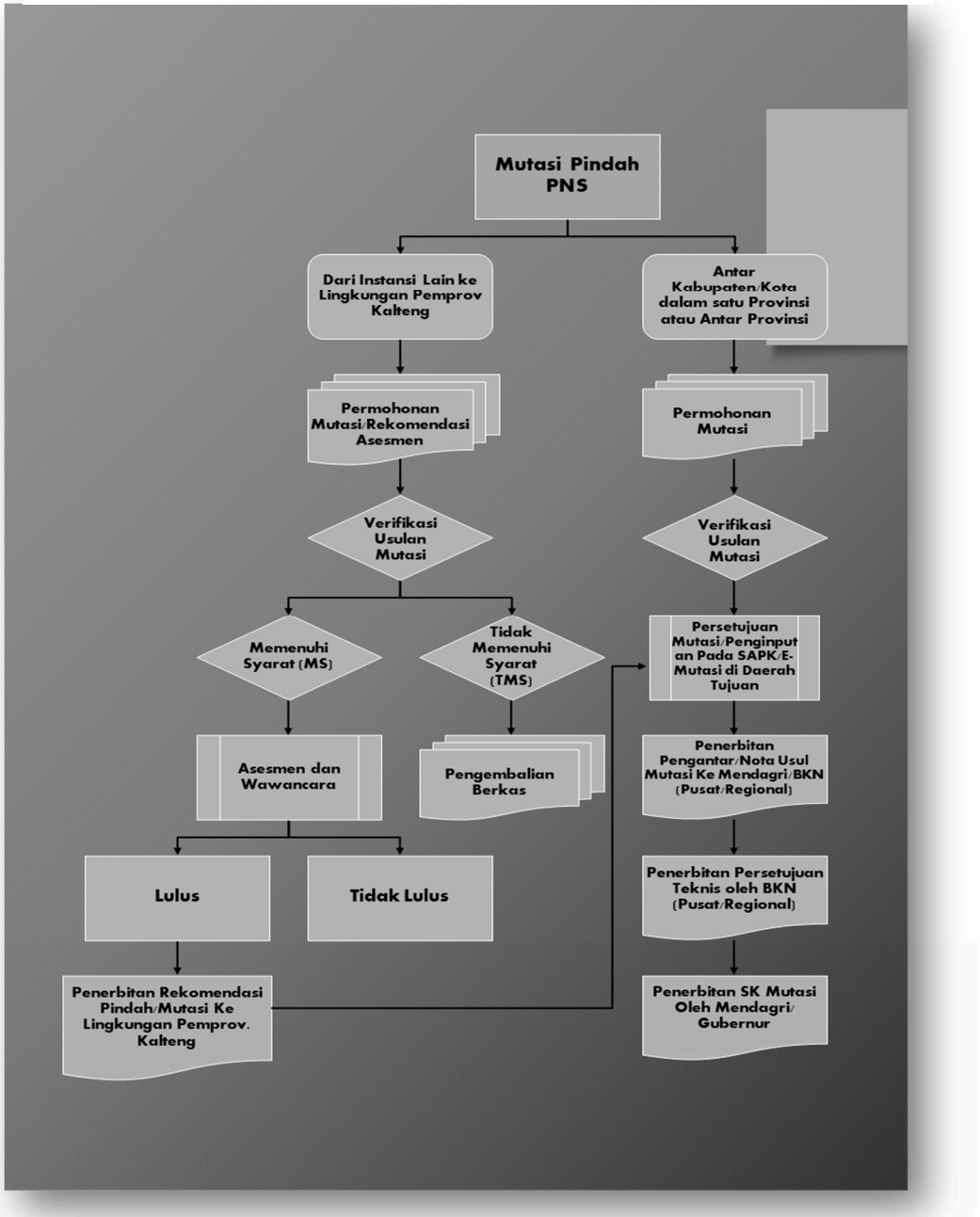

Sumber : Dokumen Peta Proses Bisnis BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Mutasi ASN tidak hanya menjadi unsur pelayanan kepegawaian dalam pemerintahan baik instansi pusat maupun daerah. Mutasi ASN juga merupakan salah satu aspek dalam manajemen pengembangan karir yang karenanya mutasi juga ditentukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah. Kebijakan terbaru mengenai peraturan tentang mutasi ASN ditetapkan berdasarkan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi serta Surat Edaran BKN Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi yang menyebutkan bahwa sebelum SK Mutasi ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Instansi bagi mutasi ASN dalam satu provinsi, antar provinsi, maupun antar instansi pusat harus mendapatkan persetujuan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Hal ini bertujuan agar perencanaan mutasi ASN untuk lebih memperhatikan kompetensi ASN dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karir, kebutuhan organisasi, prinsip larangan konflik kepentingan, serta ketersediaan anggaran. Serta untuk menciptakan harmonisasi kebijakan manajemen ASN secara vertikal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk tahun 2021, rata-rata capaian dari meta indikator Jumlah Penyelesaian SK Mutasi PNS adalah sebesar 68% dengan kategori Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Keterlambatan penyelesaian SK Mutasi pada Tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor, terutama setelah ditelaah sebagian besar pegawai dari Kabupaten/Kota mengusulkan untuk pindah ke Instansi Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut menyebabkan beban kerja pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin bertambah serta Formasi jabatan yang kosong belum tersusun secara berkala. Sehingga perlu pengkajian ulang analisis beban kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga sesuai dengan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian setelah diberlakukannya Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi membuat perpindahan ASN menjadi semakin diperketat.

Kemudian untuk mewujudkan keselarasan kebijakan pemerintah pusat serta untuk mewujudkan profesionalitas ASN dan meningkatkan kualitas manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pemerintah maka Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan asesmen dan uji kompetensi seleksi perpindahan / mutasi bagi PNS yang mengajukan usul mutasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tahapan pelaksanaannya meliputi Uji Kompetensi Dasar (TKD), Uji Kompetensi Bidang (TKB), dan Wawancara.

e. Jumlah penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas dapat diterima tepat waktu

Meta indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas yang dilakukan oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi penyelesaian SK PNS dengan target jumlah penyelesaian SK PNS.

Adapun peta proses bisnis penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas / PNS BUP adalah sebagai berikut :

Gambar 36 Peta Proses Bisnis Penyelesaian SK PNS Yang Memasuki Masa Purna Tugas

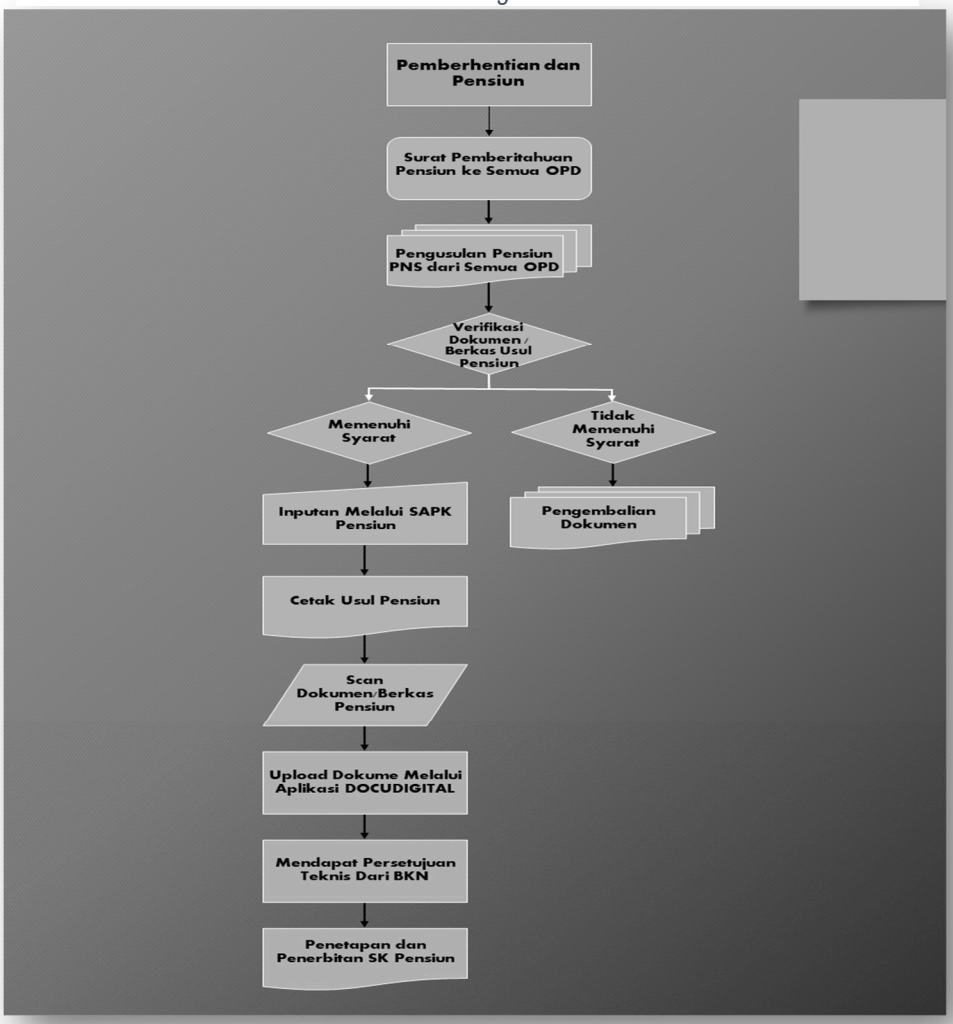

Sumber : Dokumen Peta Proses Bisnis BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Untuk tahun 2021, rata-rata capaian dari meta indikator Jumlah Penyelesaian SK PNS yang memasuki masa purna tugas adalah sebesar 157.67% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah melampaui target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Gambar 37 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jumlah Penyelesaian SK PNS yang Memasuki Masa Purna Tugas 2016-2021

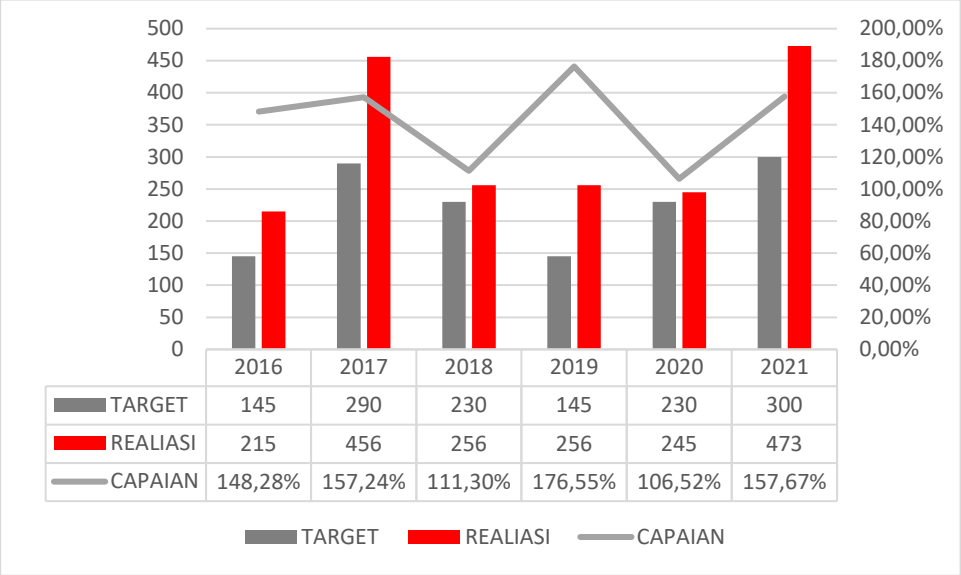

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TARGET	145	290	230	145	230	300
REALIASI	215	456	256	256	245	473
CAPAIAN	148,28%	157,24%	111,30%	176,55%	106,52%	157,67%

Sumber : Data diolah dari Dokumen Laporan Kinerja BKD 2016-2021

Penentuan target ASN yang memasuki masa purna tugas/batas usia pensiun diproyeksikan berdasarkan data ASN pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang akan pensiun pada tahun berjalan pada SIMPEG BKD Provinsi Kalimantan Tengah sehingga BKD memiliki tolok ukur yang lebih pasti untuk menentukan target pada meta indikator ini.

f. Jumlah PNS yang menerima Satyalencana Karya Satya

Meta indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur jumlah SK/ penghargaan Satyalencana Karya Satya yang diperoleh ASN yang memenuhi syarat. Kegiatan yang terkait pencapaian sasaran kinerja yaitu kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.

Gambar 38 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jumlah PNS yang menerima Satyalencana Karya Satya

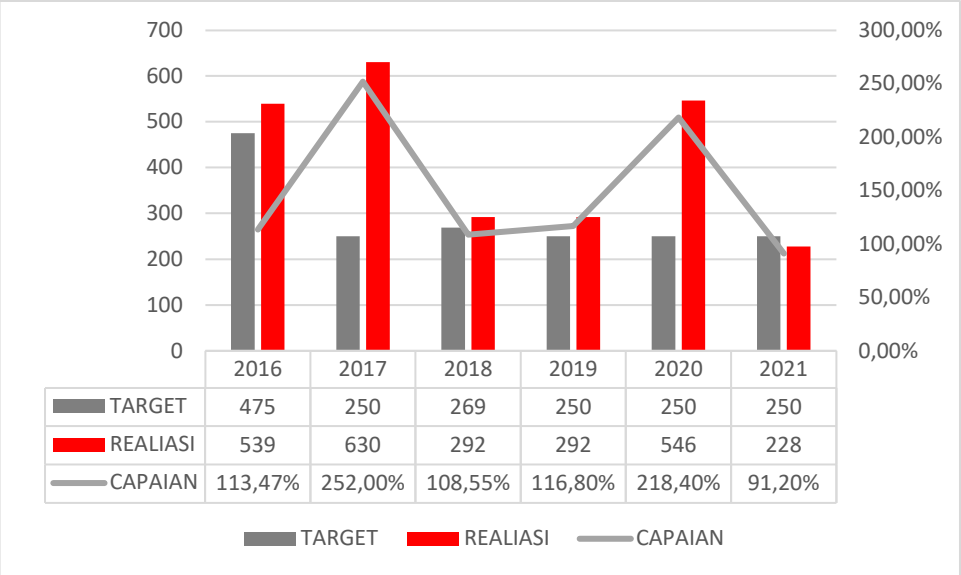

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TARGET	475	250	269	250	250	250
REALIASI	539	630	292	292	546	228
CAPAIAN	113,47%	252,00%	108,55%	116,80%	218,40%	91,20%

Sumber : Data diolah dari Dokumen Laporan Kinerja BKD 2016-2021

Untuk tahun 2021, rata-rata capaian dari meta indikator Jumlah PNS yang menerima Satyalencana Karya Satya adalah sebesar 91.20% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah melampaui target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Dari sisi pencapaian kinerja tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Namun terdapat permasalahan yang telah dilaporkan secara berkala serta solusi pemecahan masalah oleh bidang teknis yaitu Kelengkapan usul Satyalancana Karya Satya yang dilajukan Perangkat Daerah sering tidak lengkap, sehingga selalu membuat surat pengembalian berkas atau melengkapi persyaratan usul SLKS serta urutan berkas yang discan dengan format PDF ukuran tidak sesuai dan urutan berkas tidak sesuai, sehingga selalu dilakukan scan ulang oleh pengelola BKD. Sehingga apabila berkas pengusul tidak memenuhi syarat, berkas dikembalikan kepada instansi pengusul.

Adapun peta proses bisnis kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi adalah sebagai berikut :

Gambar 39 Peta Proses Bisnis Pemberian Penghargaan PNS

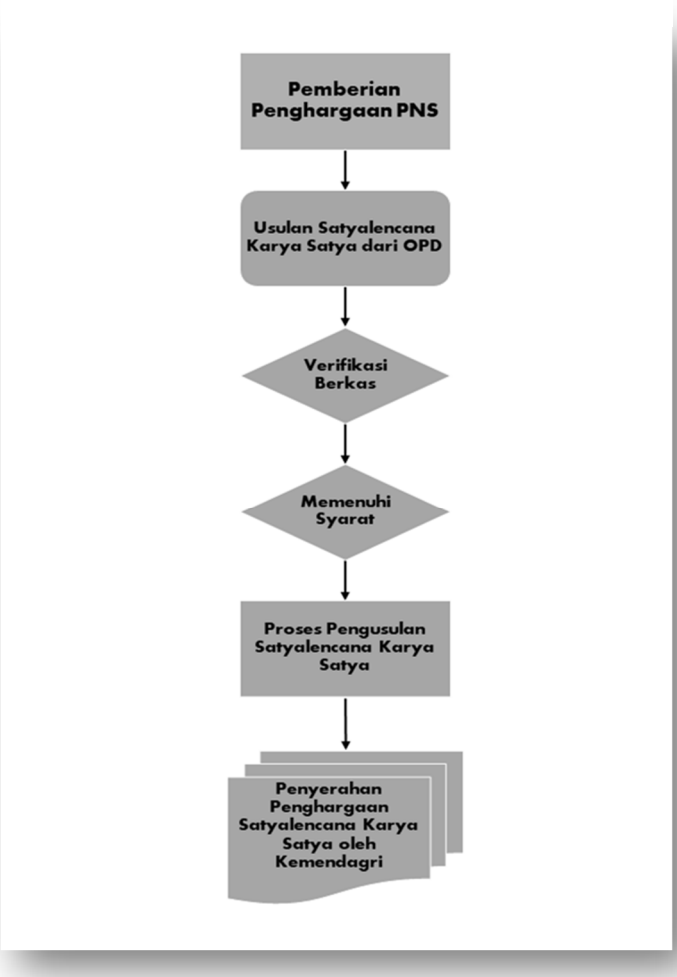

Sumber : Dokumen Peta Proses Bisnis BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

A.2 Sasaran Strategis 2

"MENINGKATNYA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS IT

Dalam rangka berperan melakukan peningkatan sistem informasi kepegawaian berbasis IT, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang paling dominan dalam mengindikasikan ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu "Jumlah Data ASN yang divalidasi secara berkala dalam waktu 1 (satu) tahun".

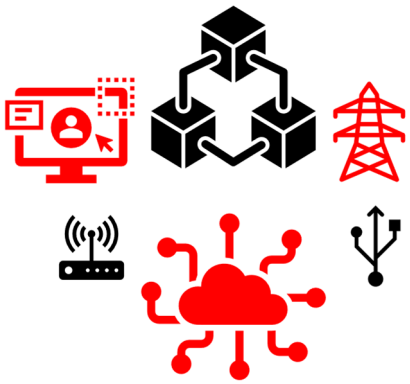

PNS yang terdata secara elektronik bertujuan memudahkan pencarian informasi data terkait pegawai di Kalimantan Tengah, informasi manajemen kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah, maupun berita kepegawaian lainnya.

Keberhasilan pencapaian dari IKU pada sasaran strategis kedua ini, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021(%)
II	**Tersedianya data PNS Pemprov Kalteng yang up to date** **Dengan Meta Indikator :** **Jumlah Data ASN yang divalidasi secara berkala dalam waktu 1 (Satu) tahun**	**Update Data PNS**	**10000**	**9596**	**95.96 (Sangat Tinggi)**

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020, Laporan Kinerja 2021, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Untuk tahun 2020, rata-rata capaian dari indikator kinerja utama Tersedianya Data PNS Pemprov Kalteng yang *up to date* adalah sebesar 95.96% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah melampaui target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 disajikan dalam bentuk grafik berikut ini :

Gambar 40 Grafik Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2016-2021

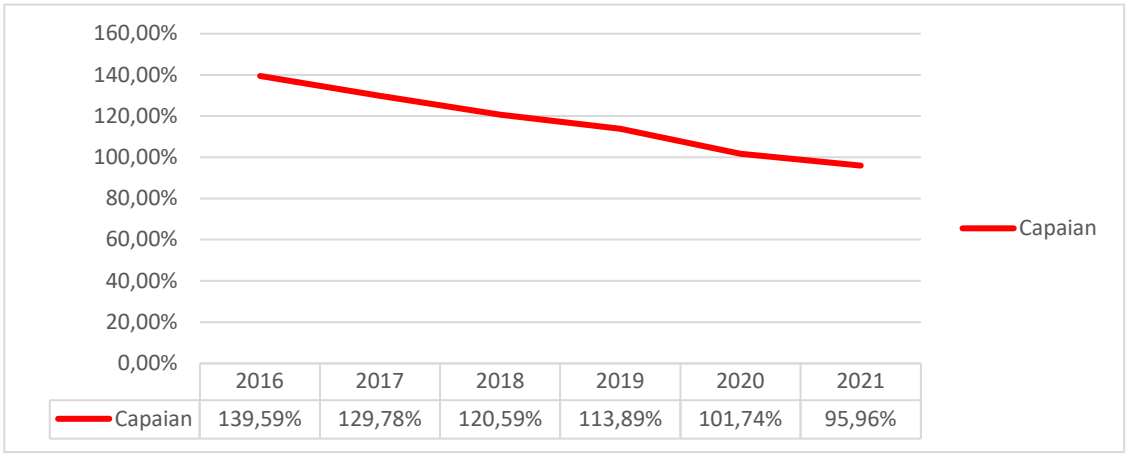

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2019, Laporan Kinerja 2020, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Tabel 12 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2016-2021

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2016	Tersedianya data PNS Pemprov Kalteng yang up to date	Update Data PNS	7000	9771	139,59% (Sangat Tinggi)
2017	Tersedianya data PNS Pemprov Kalteng yang up to date	Update Data PNS	8000	10382	129,78% (Sangat Tinggi)
2018	Tersedianya data PNS Pemprov Kalteng yang up to date	Update Data PNS	8500	10250	120,59% (Sangat Tinggi)
2019	Tersedianya data PNS Pemprov Kalteng yang up to date	Update Data PNS	9000	10250	113,89% (Sangat Tinggi)
2020	Tersedianya data PNS Pemprov Kalteng yang up to date	Update Data PNS	9500	9665	101,74% (Sangat Tinggi)
2021	Tersedianya data PNS Pemprov Kalteng yang up to date	Update Data PNS	10000	9596	95.96% *(Sangat Tinggi)*

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020, Laporan Kinerja 2021, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu (2020) capaian kinerja sasaran strategis 2 mengalami penurunan sebesar 5.78% meskipun masih dalam kategori Sangat Tinggi. Terlihat juga pada grafik capaian kinerja sasaran strategis 2 menunjukan penurunan kinerja dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karna setiap tahun terjadi peningkatan jumlah target yang signifikan disesuaikan dengan perkiraan jumlah ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, namun kenyataan nya rata-rata pertumbuhan ASN Provinsi Kalimantan Tengah sedikit lebih rendah dari target awal yang telah ditentukan.

Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang termasuk dalam sasaran strategis 2 antara lain Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, Proses Input Data Sistem Informasi Kepegawaian, Pengembangan Aplikasi Pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Prov. Kalteng, Penataan Dokumen PNS, PPID BKD, Pengembangan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) Pemprov Kalteng, dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Absensi Terpusat.

Kegiatan-kegiatan yang diklasifikasikan untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Strategis 2 ini merupakan bagian dari proses bisnis pendukung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun peta proses bisnis kegiatan dimaksud dapat terlihat pada bagan berikut :

Gambar 41 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT

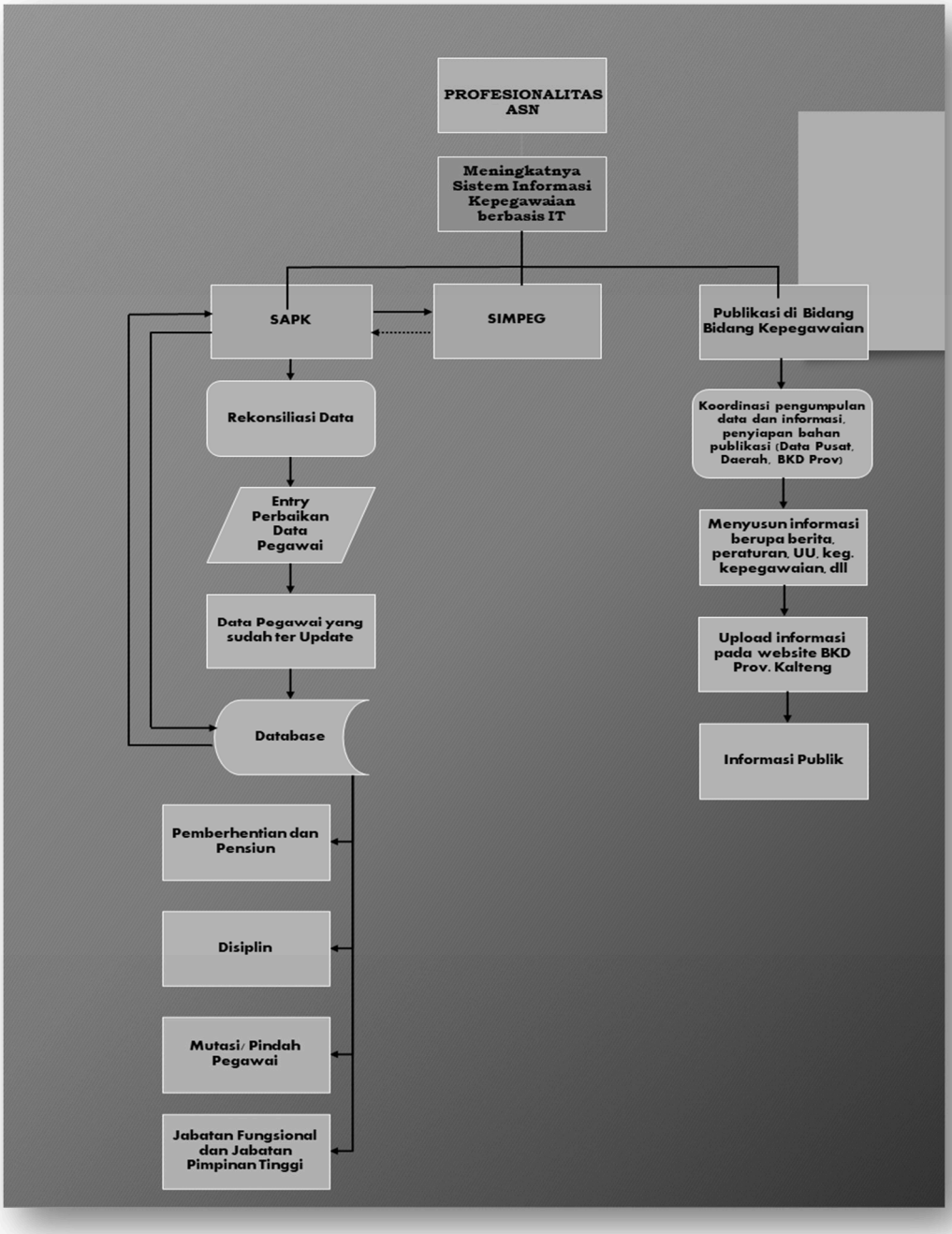

Sumber : Dokumen Peta Proses Bisnis BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan memutakhirkan data PNS yang tersimpan dalam database nasional dalam aplikasi SAPK BKN dengan database dalam aplikasi SIMPEG BKD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

A.3 Sasaran Strategis 3

"MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA"

Sasaran strategis ketiga merupakan penjabaran peran BKD Provinsi Kalimantan Tengah mewujudkan tujuan terciptanya ASN yang kompeten, kompetitif dan profesional. Berkaitan dengan hal tersebut, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan yaitu bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Adapun proses bisnis terkait sasaran strategis 3 dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 42 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia

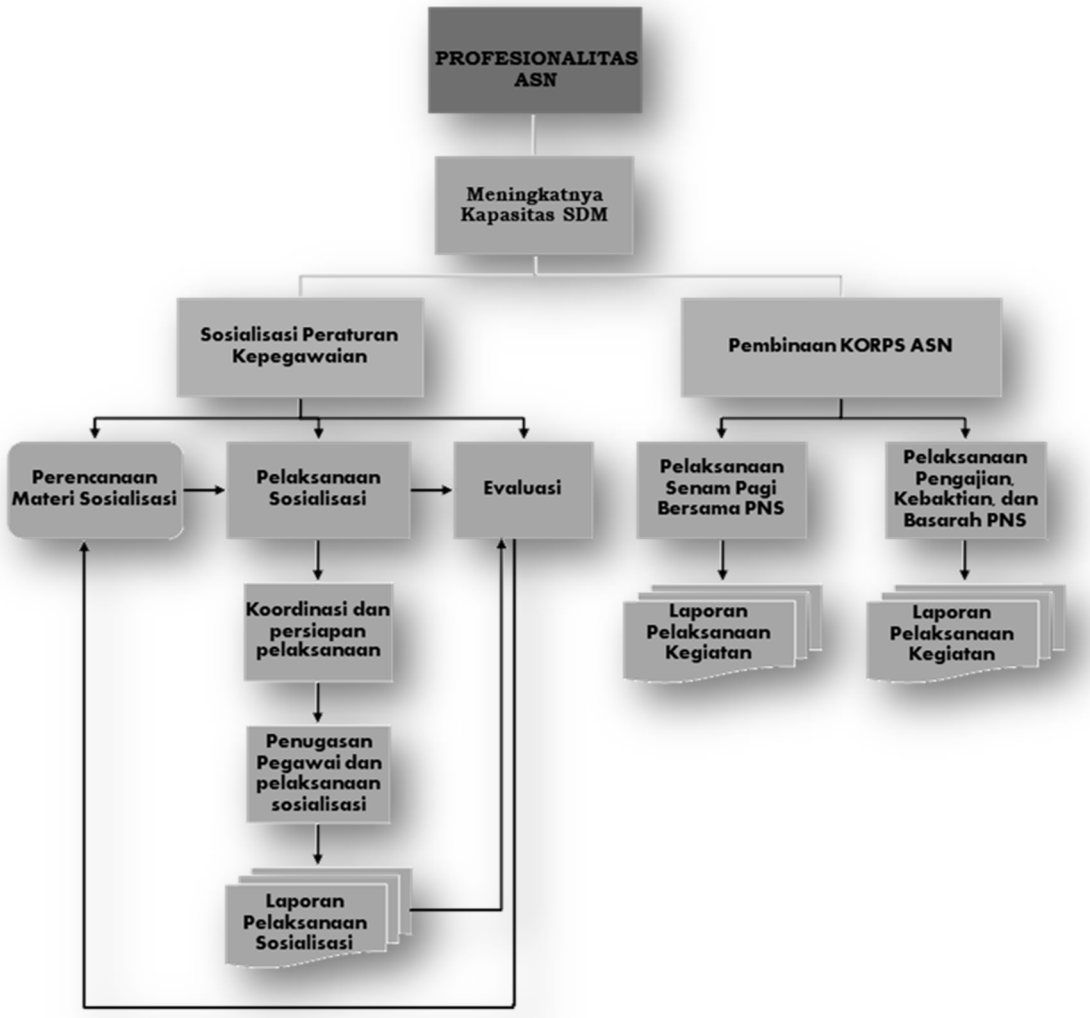

Sumber : Dokumen Peta Proses Bisnis BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Sasaran strategis “Meningkatkan Kapasitas SDM” diindikasikan oleh IKU yang terkait dengan sumber daya manusia. Keberhasilan pencapaian dari masing-masing IKU pada sasaran strategis ketiga ini, tampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
III	**Jumlah PNS yang meningkat kapasitasnya**	**Orang**	**275**	**220**	**80 (Tinggi)**
III.1	Terlaksananya sosialisasi dan meningkatnya kemampuan PNS pengelola kepegawaian pada SKPD	Orang	100	100	100 (Sangat Tinggi)
III.2	Jumlah PNS yang meningkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan profesionalismenya	Orang	175	120	68.57 (Sedang)

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020, Laporan Kinerja 2021, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Untuk tahun 2021, rata-rata capaian dari indikator kinerja utama Terlaksananya sosialisasi dan meningkatnya kemampuan PNS pengelola kepegawaian pada SKPD adalah sebesar 78.18% dengan kategori Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dari sisi pencapaian kinerja sasaran strategis 3 pada tahun 2021 mengalami kendala sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan terkait dengan capaian sasaran strategis 3 merupakan kegiatan yang bersifat konsentrasi massa sehingga kegiatan-kegiatan tersebut ditiadakan dan anggarannya dirasionalisasi.

Dikarenakan hal tersebut, BKD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan perubahan strategi sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring/*online* untuk mengurangi adanya konsentrasi massa.

Grafik perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 3 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 43 Grafik Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2016-2021

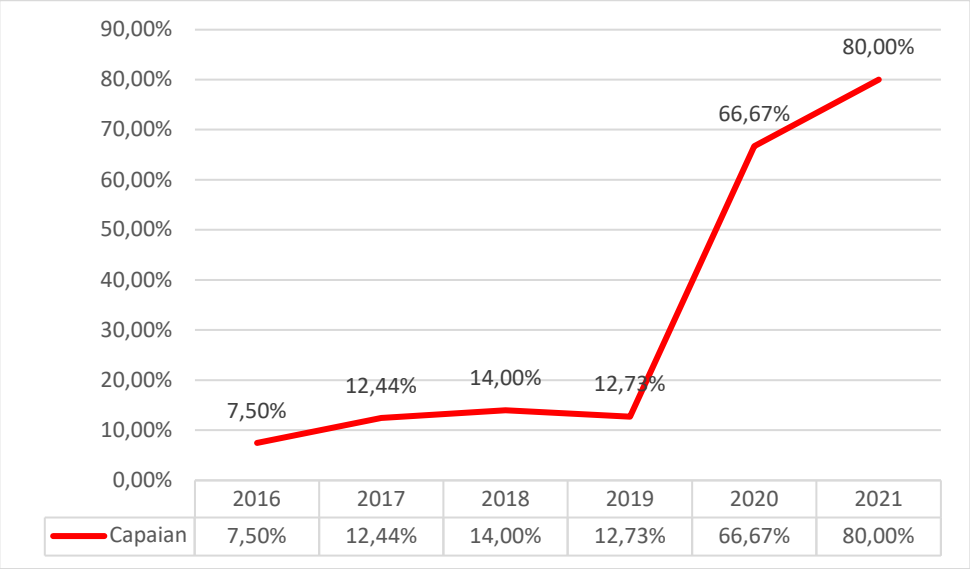

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2019, Laporan Kinerja 2020, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa untuk capaian kinerja sasaran strategis 3 sudah mengalami kenaikan dari tahun -tahun sebelumnya. Secara lebih terperinci, berikut juga ditampilkan tabel rata-rata capaian kinerja sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 berikut ini :

Tabel 14 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2016-2021

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2016	Jumlah PNS yang meningkat kapasitasnya	Orang	200	15	7.50% (Sangat Rendah)
2017	Jumlah PNS yang meningkat kapasitasnya	Orang	225	28	12.44% (Sangat Rendah)
2018	Jumlah PNS yang meningkat kapasitasnya	Orang	250	35	14.00% (Sangat Rendah)
2019	Jumlah PNS yang meningkat kapasitasnya	Orang	275	35	12.73% (Sangat Rendah)
2020	Jumlah PNS yang meningkat kapasitasnya	Orang	300	200	66.67% (Sedang)
2021	Jumlah PNS yang meningkat kapasitasnya	Orang	275	220	80% *(tinggi)*

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020, Laporan Kinerja 2021, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu (2020) capaian kinerja sasaran strategis 3 sudah mengalami kenaikan sebesar 13.33% meskipun begitu capaian kinerja sasaran 3 telah maksimal. Hal ini menjadi suatu tugas tambahan untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbaiki sistem manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian kinerja pada indikator kinerja Jumlah PNS yang meningkat kapasitasnya di tahun 2021 hanya tercapai 80% dari target yang diharapkan. Selain akan dilakukan reviu terhadap penentuan IKU BKD sehingga capaian kinerja sasaran strategis 3 dapat lebih valid dan terarah serta penggunaan media daring sebagai wadah kegiatan sosialisasi dan bimtek pengelola kepegawaian. Tahun 2022 BKD Provinsi Kalimantan Tengah juga akan melakukan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN melalui e-Kinerja sehingga diharapkan akan memacu ASN Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi yang juga akan berdampak pada peningkatan kapasitas SDM.

A.4 Sasaran Strategis 4

Sasaran strategis keempat ini ditetapkan untuk mencapai tujuan aparatur yang profesional dalam kerja baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor seperti yang tertuang dalam visi dan misi pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Sasaran strategis Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Karir Aparatur di tingkat BKD Provinsi Kalimantan Tengah diindikasikan oleh IKU yang terkait penanganan kasus pelanggaran disiplin, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian dinas kenaikan pangkat tingat I dan II, dan seleksi penerimaan Capra IPDN.

MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-Rata Capaian (%)
IV	**Jumlah PNS yang Dibina dan Dikelola**	**Orang**	**1240**	**477**	**38,47%**	
		Persentase	**100**	**100**	**100%**	**76**
	Dengan Meta Indikator :	**SK**	**50**	**44**	**88,00%**	**(Tinggi)**
IV.1	Jumlah Kebutuhan PNS Provinsi dan CPNS Baru sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Persentase Orang	100 400	100 374	100 93.5	96.75 (Sangat Tinggi)
IV.2	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Secara Tepat Waktu	Laporan	50	44	88	88 (Tinggi)
IV.2	Jumlah PNS Yang Bisa Naik Pangkat Karena Lulus Ujian Dinas	Orang	400	65	16.25	16.25 (Sangat Rendah)
IV.3	Jumlah PNS Yang Bisa Naik Pangkat Karena Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	Orang	400	0	0,00	0,00 (Sangat Rendah)
IV.4	Jumlah Capra IPDN Sesuai Alokasi Formasi	Orang	40	38	95	95 (Sangat Tinggi)

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020, Laporan Kinerja 2021, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Pada tabel capaian kinerja sasaran strategis 4 terdapat 2 (dua) meta indikator yang bernilai dalam kategori Sangat Rendah yaitu pada meta indikator Jumlah PNS Yang Bisa Naik Pangkat Karena Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dan meta indikator Jumlah PNS Yang Bisa Naik Pangkat Karena Lulus Ujian Dinas. Hal ini dikarenakan kegiatan yang terkait capaian strategis dimaksud telah dirasionalisasi anggarannya dan Kegiatan Ujian Dinas Tahun 2021 hanya terlaksana pada kabupaten Kotawaringin Barat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara lebih terperinci, berikut juga ditampilkan rata-rata capaian kinerja sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 dalam grafik berikut ini :

Gambar 44 Grafik Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2016-2021

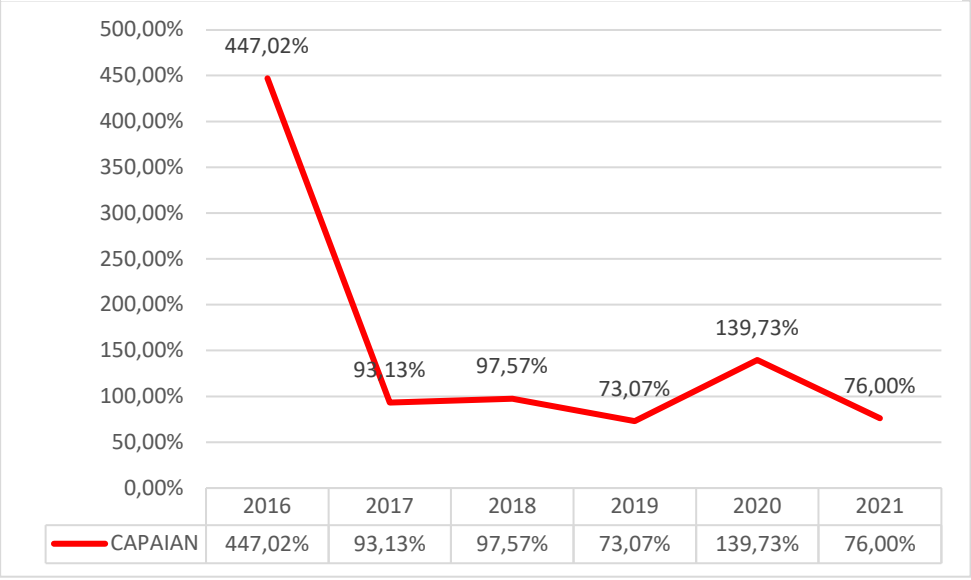

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2019, Laporan Kinerja 2020, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Tabel 16 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2016-2020

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata Capaian (%)
2016	Jumlah PNS yang Dibina dan Dikelola	Orang	840	1126	134.05	447.02 (Sangat Tinggi)
		Surat	10	76	760.00	
2017	Jumlah PNS yang Dibina dan Dikelola	Orang	854	822	96.25	93.13 (Sangat Tinggi)
		SK	10	9	90.00	
2018	Jumlah PNS yang Dibina dan Dikelola	Orang	904	860	95.13	97.57 (Sangat Tinggi)
		SK	14	14	100.00	
2019	Jumlah PNS yang Dibina dan Dikelola	Orang	920	647	70.33	70.16 (Sedang)
		SK	20	14	70.00	
2020	Jumlah PNS yang Dibina dan Dikelola	Orang	955	1284	134.45	139.73 (Sangat Tinggi)
		SK	20	29	145.00	
2021	Jumlah PNS yang Dibina dan Dikelola	Orang	1240	477	38.47	76.00 (Tinggi)
		SK Persentase	50 100	44 100	88 100	

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020, Laporan Kinerja 2021, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Berdasarkan data yang tertera pada tabel, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu (2020) capaian kinerja sasaran strategis 4 sudah mengalami penurunan yang signifikan sebesar 63.73% sehingga saat ini capaian kinerja sasaran strategis 4 termasuk dalam kategori Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian hampir melampaui target dan masih berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Kemudian jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian kinerja pada indikator kinerja PNS yang Dibina dan Dikelola di tahun 2021 tercapai 76.00% dari target yang diharapkan.

Berikut juga ditampilkan Peta Proses Bisnis terkait sasaran strategis 4 :

Gambar 45 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

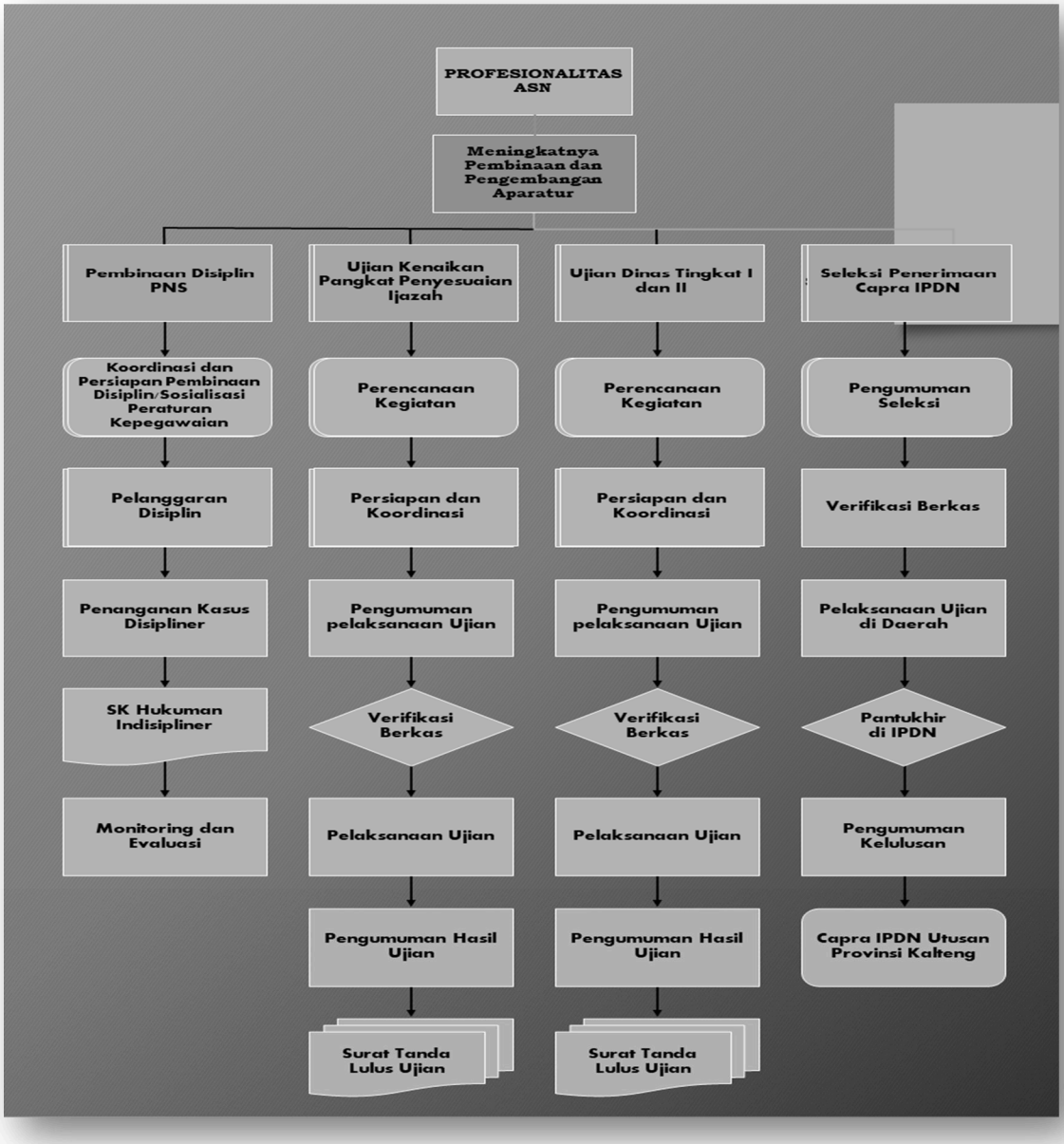

Sumber : Dokumen Peta Proses Bisnis BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2020

Kemudian untuk penerapan sistem merit melalui e-Kinerja direncanakan pada tahun 2021 akan memulai proses perancangan produk hukum, mekanisme, dan prosedur penerapannya. Sehingga diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas/mutu pembinaan dan pengembangan ASN di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun penjelasan masing-masing meta indikator adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Kebutuhan PNS Provinsi dan CPNS Baru sesuai dengan Kebutuhan Daerah

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) merupakan suatu tahap rekrutmen pekerjaan untuk rakyat Indonesia yang berada di usia produktif dan memiliki latar belakang pendidikan memadai untuk ikut serta menjadi mabian penyelenggara negara. Indikator ini tidak setiap tahun dimunculkan dikarenakan kegiatan pengadaan ASN menyesuaikan jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB dengan memperhatikan jumlah kebutuhan ASN Daerah.

Gambar 46 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jumlah Kebutuhan PNS Provinsi dan CPNS Baru Sesuai dengan Kebutuhan Daerah 2016-2021

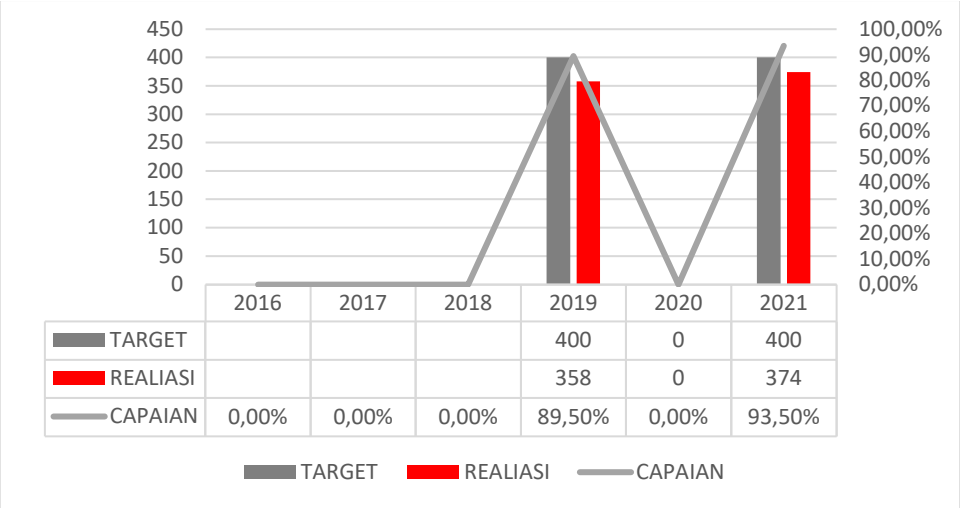

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TARGET				400	0	400
REALIASI				358	0	374
CAPAIAN	0,00%	0,00%	0,00%	89,50%	0,00%	93,50%

Sumber : Data diolah dari Dokumen Laporan Kinerja BKD 2016-2021

Berdasarkan data yang tertera pada tabel, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2019) capaian kinerja sasaran strategis 4 sudah mengalami peningkatan sebesar 4%. Saat ini capaian kinerja sasaran strategis 4 termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah melampaui target dan masih berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Kemudian jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian kinerja pada indikator dimaksud di tahun 2021 tercapai 93.50% dari target yang diharapkan.

b. Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Secara Tepat Waktu

Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah penanganan kasus dibagi jumlah target yang telah ditetapkan.

Gambar 47 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Secara Tepat Waktu 2016-2021

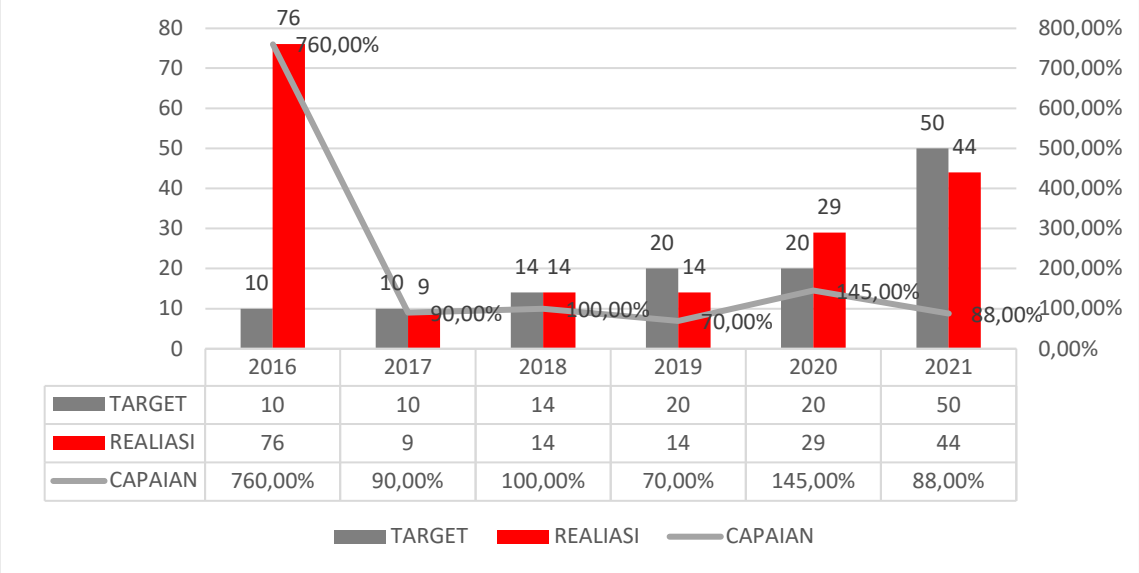

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TARGET	10	10	14	20	20	50
REALIASI	76	9	14	14	29	44
CAPAIAN	760,00%	90,00%	100,00%	70,00%	145,00%	88,00%

Sumber : Data diolah dari Dokumen Laporan Kinerja BKD 2016-2021

Secara keseluruhan, pada tahun 2021 penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu sebanyak 44 SK/Laporan penanganan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran disiplin ASN. Pada tahun 2020, realisasi capaian kinerja mendapatkan hasil sebesar 88% sehingga masuk sebagai kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

c. Jumlah PNS Yang Bisa Naik Pangkat Karena Lulus Ujian Dinas

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I Dan II. Diketahui bahwa peserta ujian dinas yang difasilitasi oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan BKD/BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 65 orang.

Gambar 48 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis Jumlah PNS Yang Bisa Naik Pangkat Karena Lulus Ujian Dinas 2016-2021

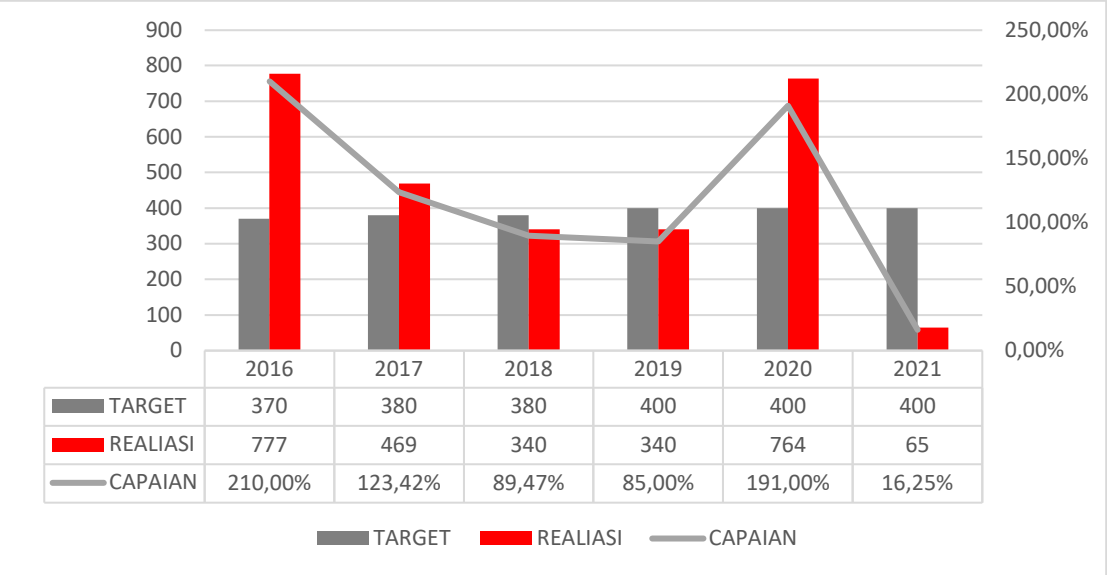

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TARGET	370	380	380	400	400	400
REALIASI	777	469	340	340	764	65
CAPAIAN	210,00%	123,42%	89,47%	85,00%	191,00%	16,25%

Sumber : Data diolah dari Dokumen Laporan Kinerja BKD 2016-2021

Pada tahun 2021 realisasi capaian kinerja pada meta indikator jumlah PNS yang Bisa Naik Pangkat Karena Lulus Ujian Dinas memperoleh hasil sebesar 16.25% sehingga masuk sebagai kategori Sangat Rendah. Hal ini dikarenakan adanya Rasionalisasi Anggaran Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah.

A.5 Sasaran Strategis 5
"MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR"

Sasaran strategis kelima ini ditetapkan untuk pemberian pelayanan kepegawaian di BKD Provinsi Kalimantan Tengah, baik dalam hal birokrasi internal kepegawaian maupun pelayanan eksternal kepada PNS Provinsi Kalimantan Tengah maupun kepada publik pada umumnya.

Sasaran strategis “Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur” diindikasikan oleh IKU yang terkait langsung dengan penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor. Sasaran strategis 5 merupakan bagian dari proses bisnis manajemen. Adapun peta proses bisnis sasaran strategis 5 dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 49 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

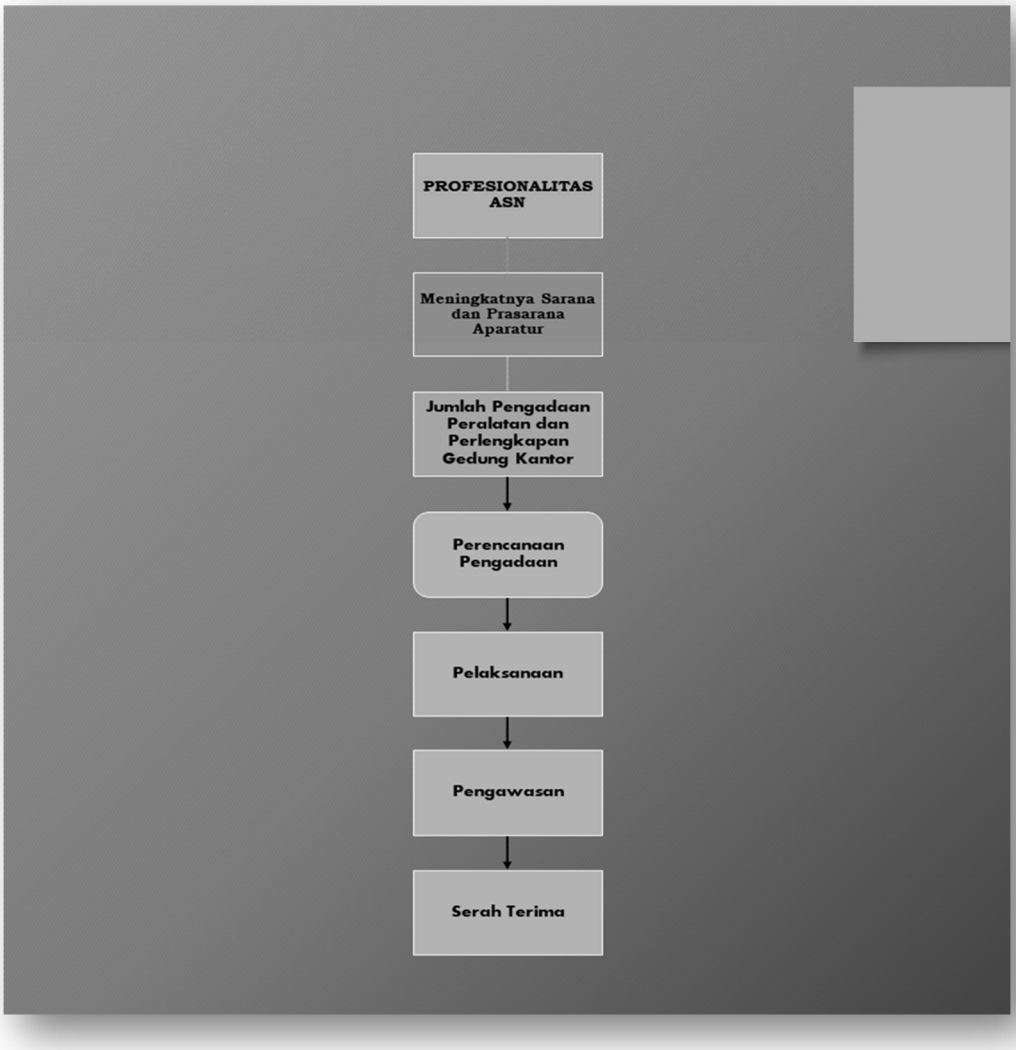

Sumber : Dokumen Peta Proses Bisnis BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis 5 tahun 2021 adalah sebesar 100%. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tabel 17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
V	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	5	5	100 (Sangat Tinggi)

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2019, Laporan Kinerja 2020, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Selengkapnya pencapaian IKU pada sasaran strategis kelima tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tampak sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 18 Tabel Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2016-2021

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2016	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	5	5	100,00% (Sangat Tinggi)
2017	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	6	6	100,00% (Sangat Tinggi)
2018	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	6	6	100,00% (Sangat Tinggi)
2019	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	7	7	100,00% (Sangat Tinggi)
2020	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	7	4	57,14% (Rendah)
2021	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	5	5	100,00% (Sangat Tinggi)

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2019, Laporan Kinerja 2020, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, pada tahun 2021 capaian target telah 100%. Terlepas dari capaian target dimaksud, masih ditemukan kendala atas permasalahan terkait yang dilaporkan telah dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 19 Identifikasi Permasalahan pada Sasaran Strategis 5

NO	URUSAN	PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI
1	Pengelolaan administrasi persuratan.	Pembukuan dan pengarsipan masih dilakukan secara manual.	Secara bertahap melakukan sistem digitalisasi pembukuan dan pengarsipan surat masuk dan keluar.
2	Pengelolaan berkas urusan kepegawaian.	Pengelolaan berkas kepegawaian yang tidak terpadu satu pintu, karena masih ada pegawai yang mengurus berkas tidak sesuai prosedur/langsung menghadap pimpinan.	Perlu adanya komitmen pimpinan secara tegas dilakukan penolakan terhadap berkas yang tidak sesuai prosedur.
3	Urusan ketatausahaan dan pembukuan berkas kepegawaian yang masuk.	Dalam urusan ketatausahaan sering terjadi berkas yang kurang lengkap sehingga menghambat proses pengadminstrasian kepegawaian.	dilakukan pengecekan berkas terlebih dahulu oleh petugas pelayanan front office sehingga proses pengadministrasi kepegawaian dapat dilaksanakan dengan cepat.
4	Urusan rumah tangga kantor.	Ketersediaan dan kelengkapan ATK dan alat penunjang kebersihan.	dilakukan koordinasi dan pelaporan secara berkala terkait permintaan jumlah kebutuhan ATK dan alat penunjang kebersihan.
5	Penyusunan Renstra, Renja	• Perencanaan yang disusun belum optimal berdasarkan pendanaan • SDM yang belum memformulasikan program, kegiatan dan strategi • Minimnya Pagu yang dialokasikan	• Perlunya keterlibatan pimpinan dalam mengambil keputusan • Tim penyusunan anggaran lebih selektif dalam menentukan pagu • Melaksanakan disiplin anggaran dalam mengalokasikan dana
6	Penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD	• Adanya penyesuaian Program dan Kegiatan karena keterbatasan alokasi dana. • Keterlambatan penyusunan RKA • Terjadinya benturan kepentingan	• Perlunya menetapkan Program dan Kegiatan Prioritas sesuai dengan Renstra dan Renja • Pembuatan *time schedule* • Dilaksanakan Pembahasan secara mendalam di setiap bidang
7	Penyusunan LPPD dan LKIP	• Penilaian LPPD dan LKIP yang belum memuaskan SDM yang belum memahami secara terperinci penyusunan LPPD dan LKIP	• Perlunya perbaikan sistem penyusunan LPPD dan kualitas data pendukung • Perlunya peningkatan kualitas SDM dengan pengadaan Bimtek dan Workshop dalam menyusun LPPD dan LKIP
8	Pengelolaan Keuangan (data triwulan)	• Pembagian dana triwulan untuk perjalanan dinas kadang kurang bayar tidak bisa dipertanggung jawabkan sehingga menunggu triwulan berikutnya • Nilai kas tersedianya di triwulan hanya sedikit sehingga banyak berkas yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu	Menyesuaikan dimana kegiatan bidang akan dilaksanakan maka disitulah agak banyak penempatan dananya / tidak harus bagi rata
9	Pengelolaan Aset Kantor	• Sulit melacak/ mencari posisi barang di tiap ruangan	• Barang yang dipegang atau

NO	URUSAN	PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI
		• Sulit melakukan pencarian barang yang dibawa pindah/ mutasi/ pensiun ASN	yang dititipkan harusnya selalu dibawa apabila masuk kerja • Memerlukan tenaga tambahan untuk membantu pengelolaan / merapikan aset BKD

B. Capaian Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan Tahun 2021

Selain indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2020, akan dijabarkan pula indikator kinerja lainnya yang relevan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sebagai berikut:

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
IV	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Dengan Meta Indikator :**				
IV.2	Nilai Manajemen ASN dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	Persentase	100	76.05	76.06 (Tinggi)
IV.3	Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase	100	68,43	68.43 (Sangat Tinggi)

Sumber : Data diolah dari Renstra dan LKIP BKD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2019, Laporan Kinerja 2020, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

B.1 Penilaian Manajemen ASN pada KORSUPGAH Korupsi Terintegrasi

Adapun Capaian Rencana aksi Korsupgah Pemerintah Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 92.92 %. Penilaian Manajemen ASN dengan Badan Kepegawaian Daerah sebagai *leading sector* merupakan salah satu dari 8 (delapan) area intervensi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Penilaian Manajemen ASN pada SI Korsupgah Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 disampaikan pada rapat koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diikuti oleh Korwil II Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI beserta Tim, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, Sekda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektur Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dan Tim *Monitoring Centre For Prevention* (MCP) Korsupgah Kalteng dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 21 Perbandingan Penilaian Manajemen ASN pada Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penilaian Manajemen ASN pada Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi	92.97%	76.05%	Mengalami penurunan 16.47%

Sumber : Data diolah berdasarkan Sistem Informasi Korsupgah Pemberantasan Korupsi, 2021

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Manajemen ASN yang menjadi Kewenangan BKD berada pada capaian 76.05%. Jika Dibandingkan dengan tahun 2020, maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan 16.47%. Faktor penghambat terealisasinya indikator kinerja ini antara lain adanya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN belum terlaksana. Diharapkan akan terlaksana secara menyeluruh pada tahun 2022 sehingga penilaian manajemen ASN pada Korsupgah dapat mencapai 100%.

B.2 Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map RB Tahun 201-2019.

Berdasarkan Surat Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 BKD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/80/LHE/2021/INSP tanggal 16 Juni 2021, Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah difokuskan pada penilaian setiap program dalam komponen pengungkit (proses) yang terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 22 Perbandingan Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2021

No	Area	Komponen Penilaian	Bobot	2020		2021		Rata-Rata Pertumbuhan	Keterangan
				Nilai	%	Nilai	%		
I	**Aspek Pemenuhan**		**14,60**	**9,53**	**65,27**	**13,89**	**95,14**	**29,86%**	**Meningkat**
1	I	Manajemen Perubahan	2,00	1,22		2,00		0,78	Meningkat
2	II	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,50		1,00		0,50	Meningkat
3	III	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,45		2,00		0,55	Meningkat
4	IV	Penataan Tatalaksana	1,00	0,66		1,00		0,34	Meningkat
5	V	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,05		1,27		0,22	Meningkat
6	VI	Penguatan Akuntabilitas	2,50	1,90		2,50		0,60	Meningkat
7	VII	Penguatan Pengawasan	2,20	1,18		1,73		0,55	Meningkat
8	VIII	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,57		2,39		0,82	Meningkat
II	**Aspek Reform**		**21,70**	**15,31**	**70,55**	**19,79**	**91,20**	**20,65%**	**Meningkat**
1	I	Manajemen Perubahan	3,00	2,75		3,00		0,25	Meningkat
2	II	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,50		2,00		0,50	Meningkat
3	III	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50		1,50		0,00	Meningkat
4	IV	Penataan Tatalaksana	3,75	2,46		3,44		0,98	Meningkat
5	V	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,75		2,00		0,25	Meningkat
6	VI	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,07		2,75		-0,32	Menurun
7	VII	Penguatan Pengawasan	1,95	0,60		1,35		0,75	Meningkat
8	VIII	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	1,68		3,75		2,07	Meningkat
Total			**36,30**	**24,84**	**68,43**	**33,68**	**92,78**	**24,35%**	**Meningkat**

Sumber : Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi BKD Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2021

Dari hasil penilaian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang yaitu antara lain :

a. Indeks Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah **33.68** atau **92.78%** kategori **"AA"**.
b. Agar meningkatkan pemutakhiran data kinerja dikelola secara berkala yang selama ini secara tahunan menjadi semester, triwulan, bahkan bulanan.
c. Agar meningkatkan inovasi pelayanan agar mendapatkan pengetahuan secara internasional dan atau nasional dan direplikasi oleh instansi lain.
d. Meningkatkan nilai dari setiap penilaian yang sudah kategori B menjadi A.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan alokasi anggaran BKD Provinsi Kalimantan Tengah pada APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2020, komposisi pagu dan realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan BKD Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat pada grafik dan tabel berikut :

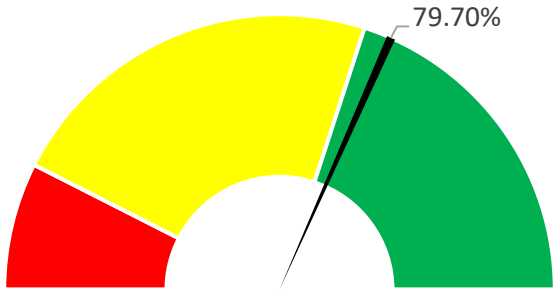

Realisasi Belanja Operasi

Pagu Belanja Langsung	Realisasi	Capaian (%)
12.285.379.084	9.791.974.670	79.70%

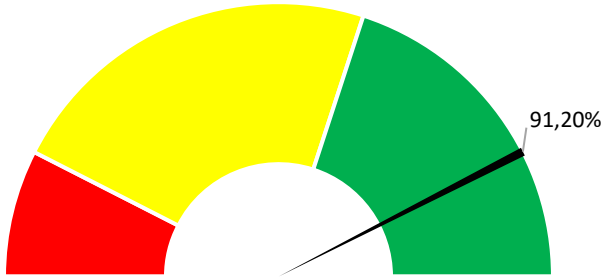

Realisasi Belanja Modal

Pagu Belanja Langsung	Realisasi	Capaian (%)
121.338.000	110.656.364	91,20%

Realisasi Pendapatan BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020
(Sewa Aula dan Gedung CAT)

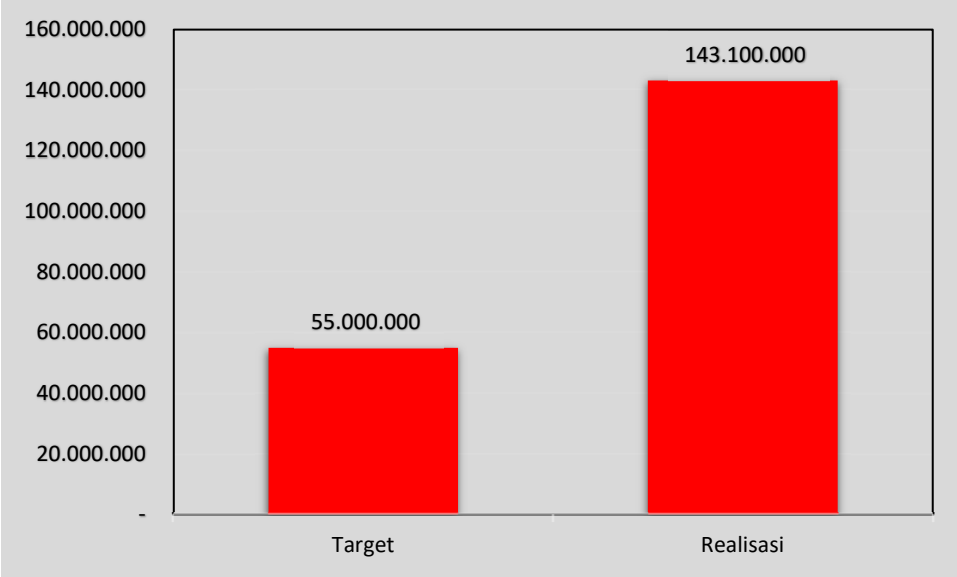

Jenis Pendapatan	Keterangan	Capaian (%)
PAD	*Mengalami surplus sejumlah Rp 88.100.000*	260.18%

Gambar
Realisasi APBD BKD Tahun 2016-2021

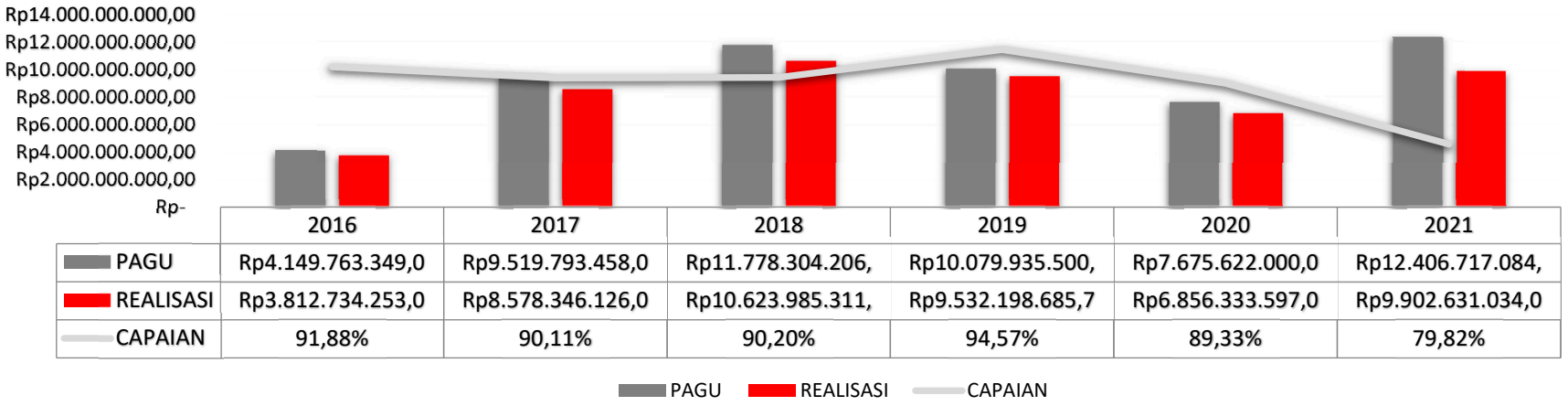

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PAGU	Rp4.149.763.349,0	Rp9.519.793.458,0	Rp11.778.304.206,	Rp10.079.935.500,	Rp7.675.622.000,0	Rp12.406.717.084,
REALISASI	Rp3.812.734.253,0	Rp8.578.346.126,0	Rp10.623.985.311,	Rp9.532.198.685,7	Rp6.856.333.597,0	Rp9.902.631.034,0
CAPAIAN	91,88%	90,11%	90,20%	94,57%	89,33%	79,82%

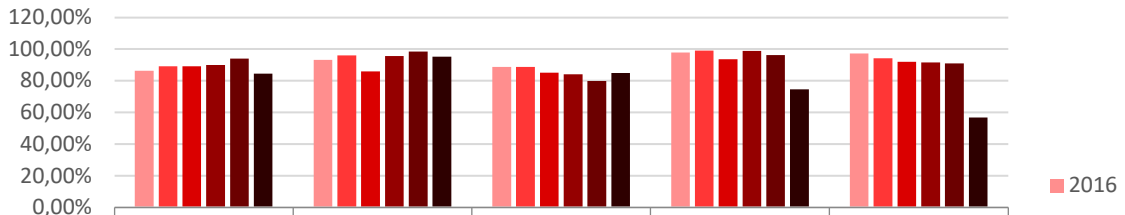

	SEKRETARIAT	PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI	PENGEMBANGAN	MUTASI	DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN
2016	86,30%	93,18%	88,78%	97,86%	97,17%
2017	89,11%	95,88%	88,69%	99,00%	94,07%
2018	89,06%	85,90%	85,08%	93,52%	91,91%
2019	90,00%	95,61%	84,13%	98,81%	91,47%
2020	94,05%	98,44%	79,72%	96,17%	90,92%
2021	84,44%	95,25%	84,89%	74,55%	56,84%

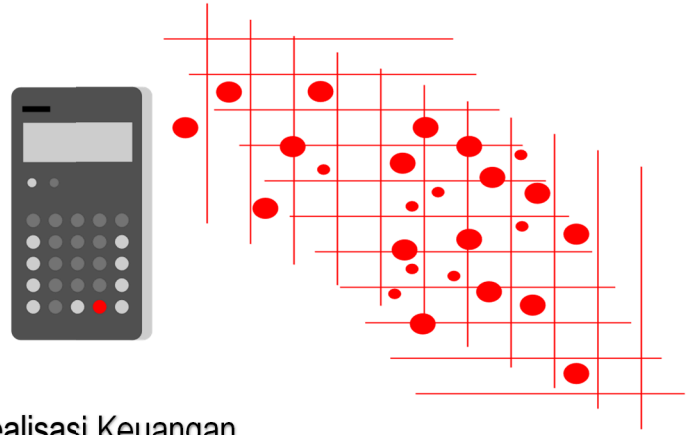

Realisasi Keuangan
APBD BKD 2016-2021 serta berdasarkan
Bidang Teknis Penanggung Jawab
periode 2016-2021

BKD Provinsi Kalimantan Tengah | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alokasi Anggaran Belanja Langsung BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 per Sasaran Strategis antara lain :

Sasaran Strategis	Pagu (Rp)
Meningkatnya Kapasitas SDM	48.855.000
Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian	289.364.000
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.522.866.300
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	9.386.040.034
Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT	159.591.750
Jumlah	**12.406.717.084**

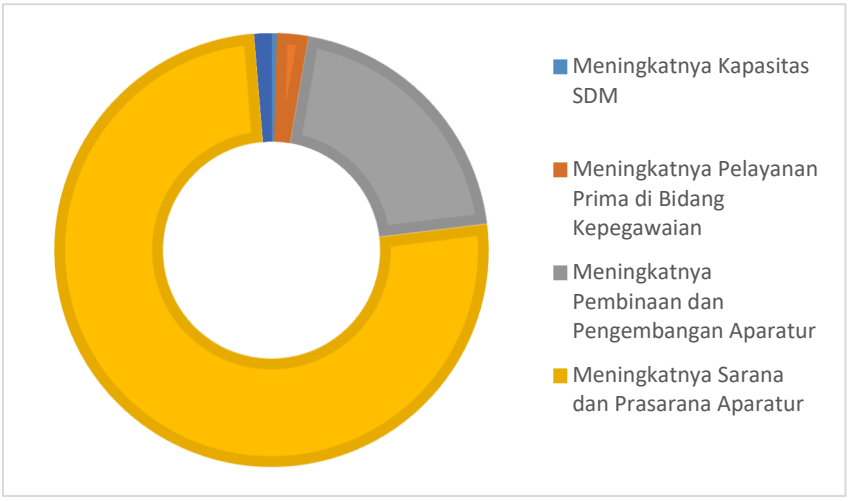

Alokasi Anggaran Belanja Langsung BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 per Bidang Teknis antara lain :

Bidang	Pagu (Rp)
DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN	897.233.500
MUTASI	1.524.544.000
PENGEMBANGAN	439.307.800
PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI	159.591.750
SEKRETARIAT	9.386.040.034
Jumlah	**12.406.717.084**

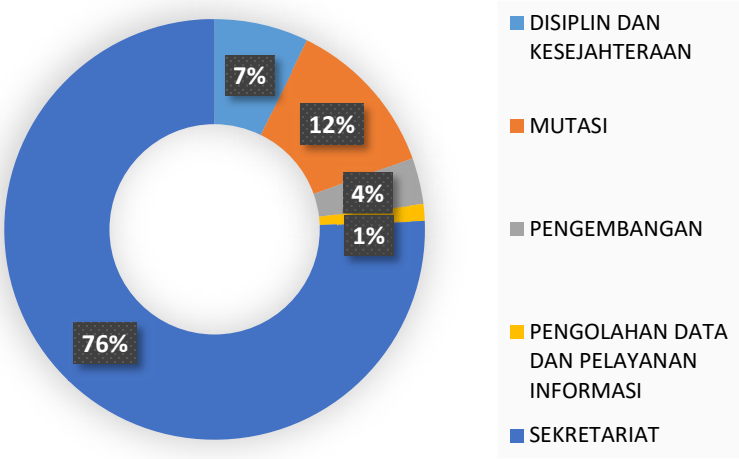

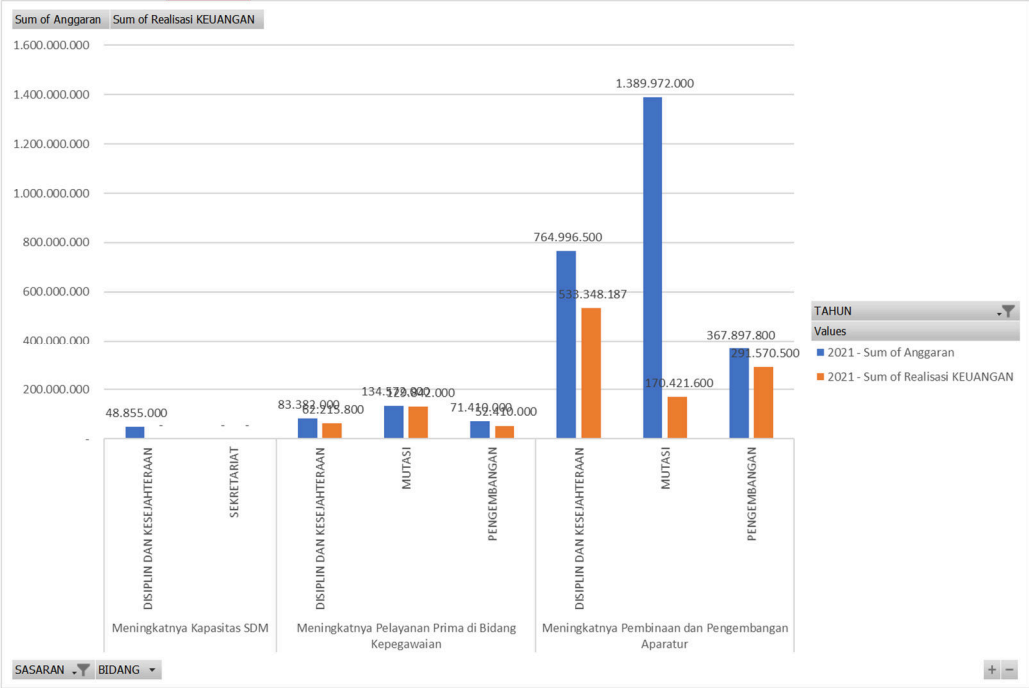

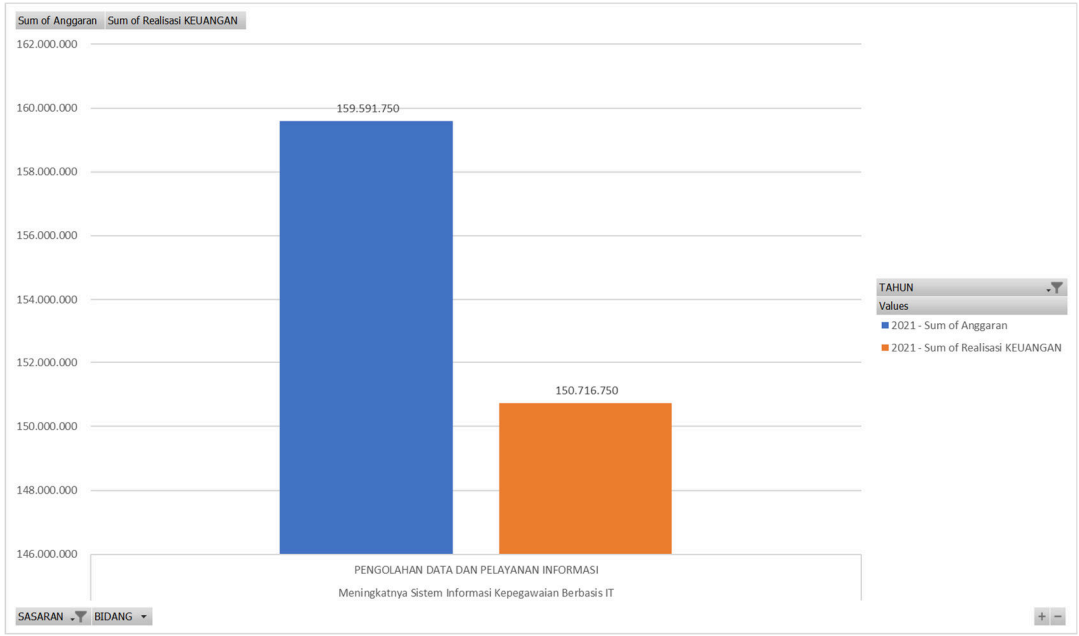

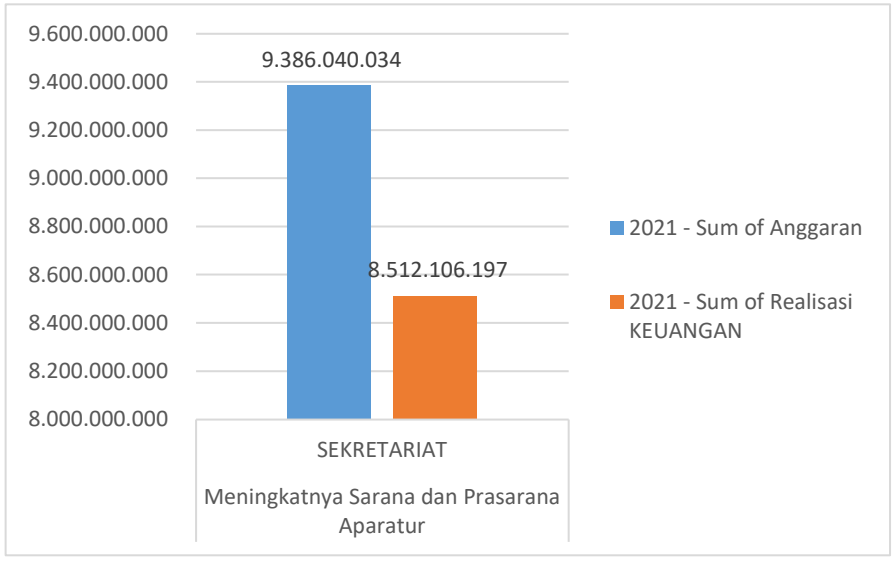

Realisasi Keuangan berdasarkan pemetaan Proses Bisnis Utama, Proses Bisnis Pendukung Lainnya dan Proses Bisnis Manajemen Serta Bidang Teknis Penanggung Jawab

Tabel 23 Realisasi Belanja Langsung APBD BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.718.000	30.539.881	83,17%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.855.000	-	0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.355.277.752	5.840.290.252	91,90%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.025.568.228	932.245.625	90,90%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.790.000	322.297.099	86,92%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.438.855.054	1.232.207.340	85,64%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.831.000	154.526.000	97,29%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	1.540.066.000	301.397.600	19,57%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.168.106.550	865.046.937	74,06%
		Pengembangan Kompetensi ASN	40.175.000	40.153.000	99,95%
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	223.474.500	183.927.300	82,30%
Jumlah			**12.406.717.084**	**9.902.631.034**	**79,82%**

Sumber : SPJ Fungsional per Kegiatan, SIMDA BKD Prov Kalteng 2021

Berdasarkan informasi pada tabel di atas bahwa total dari pagu anggaran belanja langsung APBD Tahun 2021 mencapai realisasi keuangan sebesar 79.82%. Persentase penyerapan belanja langsung tahun 2021 ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun beberapa hal yang menyebabkan realisasi anggaran belanja langsung BKD Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal adalah sebagai berikut :

1. Sisa Anggaran Belanja Langsung yang tidak terealisasi sebesar Rp 2.504.086.050 atau 20.18% antara lain bersumber dari :
   a. Kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal
   b. Efisiensi belanja perjalanan dinas
   c. Efisiensi honorarium
   d. Belanja-belanja lain yang direalisasikan sesuai dengan standar belanja yang ada

2. Terdapat beberapa kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah yang tidak dapat terlaksana secara maksimal antara lain :
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

3. Adapun kendala yang dialami yaitu :
   a. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
      Fasilitasi lembaga profesi ASN salah satunya yaitu pelaksanaan HUT KORPRI. Sehubungan dengan pelaksanaan peringatan HUT KORPRI di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional KORPRI, kemudian berdasarkan surat Edaran Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang HUT ke – 50 KORPRI Tahun 2021 tidak mencantumkan untuk penyelenggaraan HUT KORPRI yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara bendera, ziarah, bakti sosial, olaharaga, perlombaan dan lain-lain, hal ini juga terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan Peringatan HUT KORPRI sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Peringatan HUT ke-50 KORPRI Tahun 2021 dilakukan secara daring yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional KORPRI. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hanya melaksanakan Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Janji pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor

56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Pengelolaan Promosi ASN
Seluruh kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2020 dilarang melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Larangan tersebut tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

4. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah tercapai 126.31% dari target sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp 2.504.086.050 atau 20.18%

D. Inovasi

Inovasi yang saat ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menunjang kinerja pelayanan meliputi :

D.1 Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah berbasis CAT

Bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja ASN di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaiaan Ijazah dan Ujian Dinas Kenaikan Tingkat I dan II.

Inovasi penyelenggaraan ujian dinas dan penyesuaian ijazah yang sebelumnya dilaksanakan dengan ujian tertulis berubah dengan berbasis Computer Assisted Test (CAT). Dengan menggunakan CAT proses pelaksanaan menjadi lebih cepat dan pendekatan ini mengakomodir jumlah peserta yang banyak dalam satu kesempatan tes.

D.2 *BKD's Costumer Satisfaction of Service Index Tree*

Pohon tingkat kepuasan terhadap layanan merupakan salah satu inovasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pelayanan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan dua daun yang terbuat dari kertas, bagi para tamu yang mengurus pelayanan kepegawaian. Kemudian, tamu yang selesai mengurus pelayanan memilih daun yang diingkan dan menulis penilaian terhadap pelayanan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ingin memberikan pelayanan prima sebagai perwujudan dari visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah.

Gambar 50 Pohon Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu BKD

Sumber : Dokumentasi PPID

D.3 Pelaksanaan Asesmen Mutasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan asesmen dan uji kompetensi seleksi perpindahan / mutasi bagi PNS yang mengajukan usul mutasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tahapan pelaksanaannya meliputi Uji Kompetensi Dasar (TKD), Uji Kompetensi Bidang (TKB), dan Wawancara.

D.4 SITAGUH BKD (Sistem Informasi Terampil dan Tangguh)

Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SITAGUH) menggagas perubahan di bidang pelayanan Administrasi Kepegawaian yang diyakini berdampak sistemik terhadap semua aspek pelayanan yang ditangani Badan Kepegawaian Daerah, serta akan membawa manfaat bagi semua ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan disemangati motto “Bagawi Huang Kasanan” SITAGUH mampu menghadirkan layanan kepegawaian mandiri, sehingga lebih memudahkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengakses layanan kepegawaian yang tersedia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

SiTAGUH BKD memiliki kemampuan untuk :

1) Mencetak Surat / SK hasil Layanan Kepegawaian secara mandiri
2) Mencetak Surat tanda terima kiriman berkas secara online
3) Melacak Posisi Usulan Layanan Kepegawaian secara Online dan Real Time
4) Memberikan Informasi seputar kelengkapan berkas pada seluruh Layanan Kepegawaian yang tersedia di Badan Kepegawaian Daerah

Layanan Kepegawaian di SITAGUH dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Layanan Usul

   Layanan Usul merupakan layanan kepegawaian yang bersifat usulan. Seluruh bentuk layanan usul , merupakan layanan yang diteruskan ke luar instansi Provinsi Kalimantan Tengah, misalnya Usul Kenaikan Pangkat. Dengan SITAGUH , ASN tidak perlu lagi mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan berkas fisik atau melacak progress layanan kepegawaian.

2) Layanan Mandiri

Layanan Mandiri merupakan layanan kepegawaian merupakan layanan kepegawaian yang penetapanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, contoh layanan ini adalah Pengajuan Ijin Belajar. Dengan SITAGUH Aparatur Sipil Negara dapat langsung mencetak Surat Ijin Belajar secara online.

Gambar 51 Proses Layanan SITAGUH

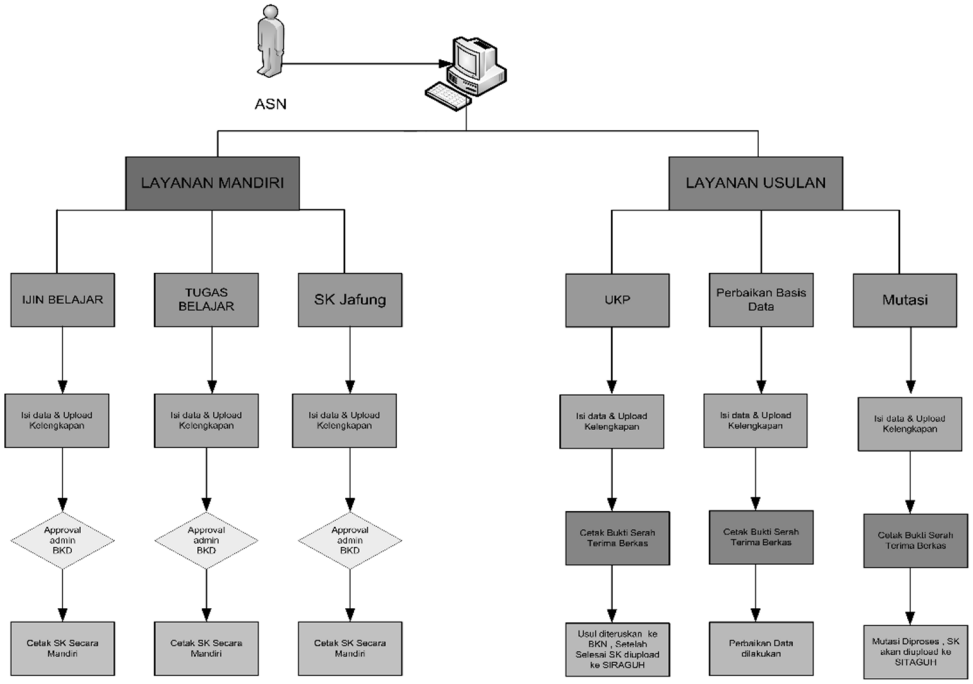

Sumber : Paparan Sosialisasi SiTAGUH, BKD Prov Kalteng 2020

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 disimpulkan sebagai berikut :

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Formasi pegawai belum terpenuhi karena banyaknya pegawai pensiun sehingga terjadi kekurangan pegawai hampir di seluruh SKPD.
2. Kebutuhan pegawai yang banyak tidak sebanding dengan pemberian formasi CPNS dari Kemenpan RB sehingga komposisi pegawai tidak seimbang dengan kebutuhan.
3. Pengembangan kompetensi pegawai kurang menyeluruh dan menyentuh seluruh aparatur yang ada.
4. Pelaksanaan sistem merit yang masih belum optimal.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahn yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan kementerian terkait untuk pemenuhan formasi jabatan sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai, pelaksanaan seleksi administrasi CPNS di tahun 2021, memanfaatkan tenaga bantu (tenaga kontrak), mengelola mutasi pegawai dan mengelola redistribusi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara selektif serta memanfaatkan sumber daya lain sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan SKPD dalam rangka mencari solusi Bersama permasalahan yang ada seperti dalam hal mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan.
3. Perlu dianggarkan kembali pemberian beasiswa Ijin Belajar maupun Tugas Belajar bagi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kompetensinya.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan OPD dan Pemerintah Pusat.
2. Melakukan percepatan penerapan sistem merit ASN melalui e Kinerja pada ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan rneningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
4. Koordinasi dan komunikasi internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara lebih intensif.

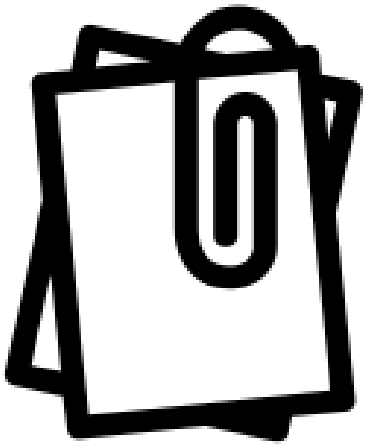

LAMPIRAN

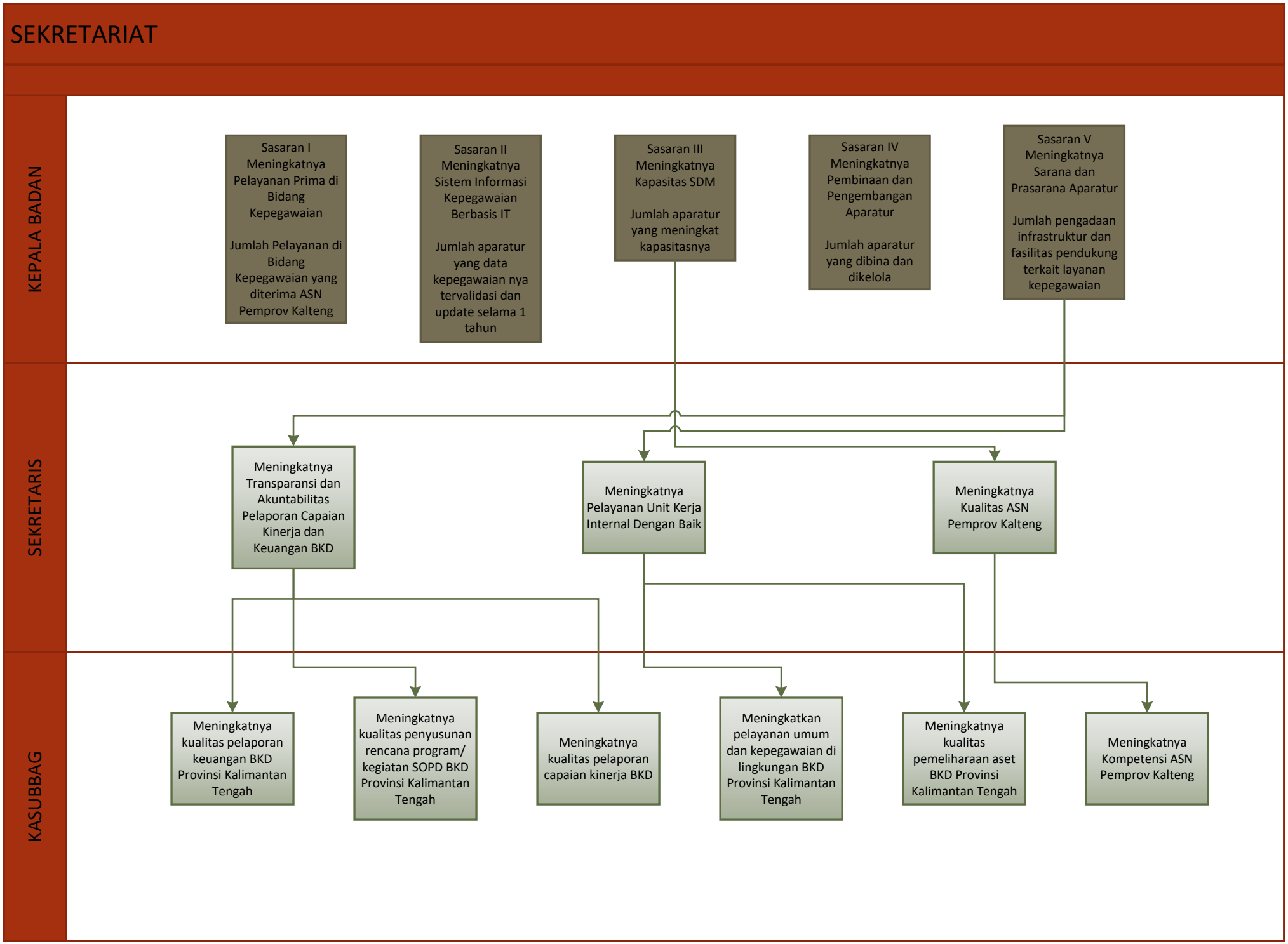
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KASUBBAG
Sasaran I Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian
Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian yang diterima ASN Pemprov Kalteng
Sasaran II Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT
Jumlah aparatur yang data kepegawaian nya tervalidasi dan update selama 1 tahun
Sasaran III Meningkatnya Kapasitas SDM
Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya
Sasaran IV Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah aparatur yang dibina dan dikelola
Sasaran V Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah pengadaan infrastruktur dan fasilitas pendukung terkait layanan kepegawaian
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD
Meningkatnya Pelayanan Unit Kerja Internal Dengan Baik
Meningkatnya Kualitas ASN Pemprov Kalteng
Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan BKD Provinsi Kalimantan Tengah
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program/ kegiatan SOPD BKD Provinsi Kalimantan Tengah
Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja BKD
Meningkatkan pelayanan umum dan kepegawaian di lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Tengah
Meningkatnya kualitas pemeliharaan aset BKD Provinsi Kalimantan Tengah
Meningkatnya Kompetensi ASN Pemprov Kalteng

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI

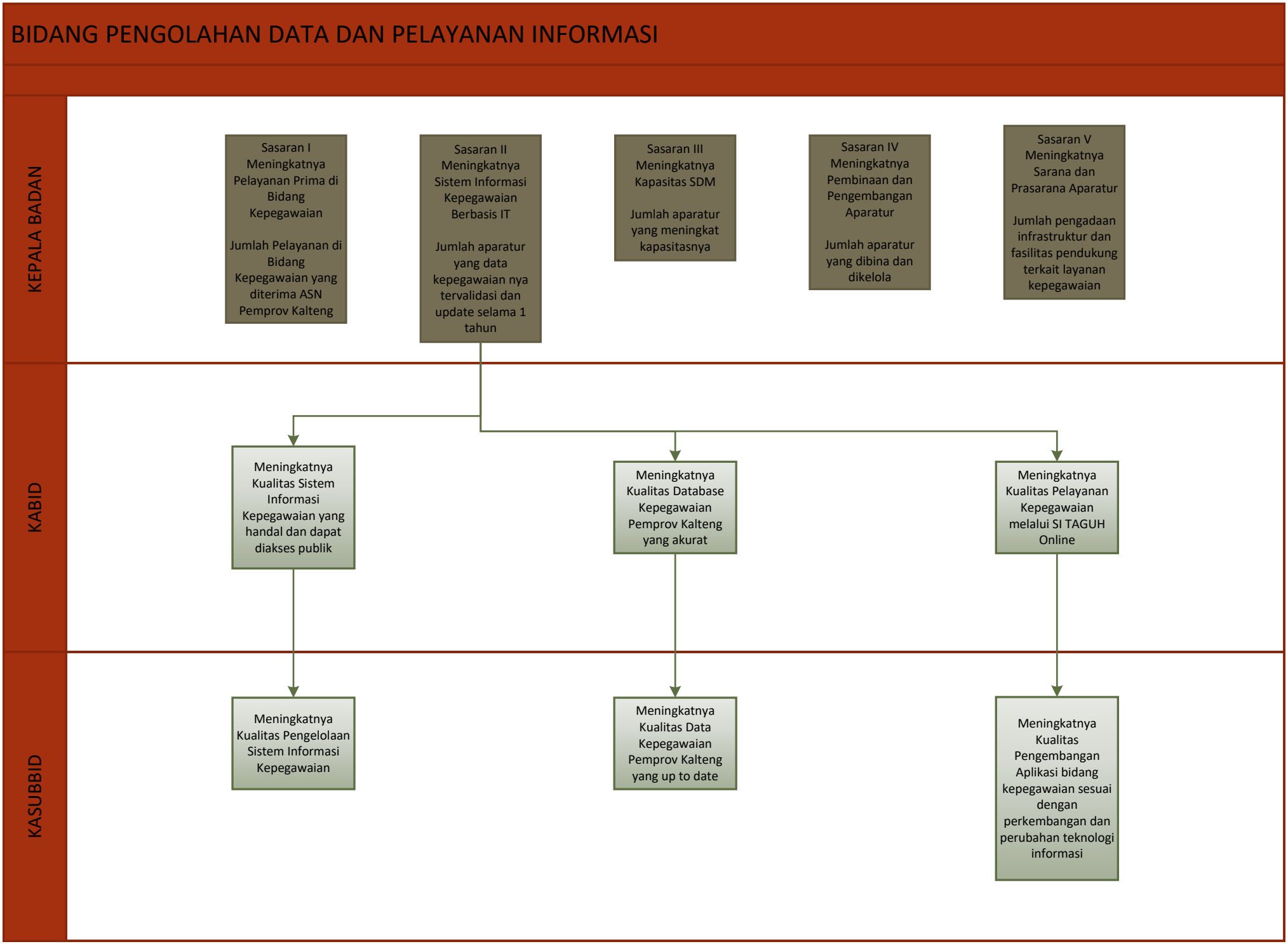

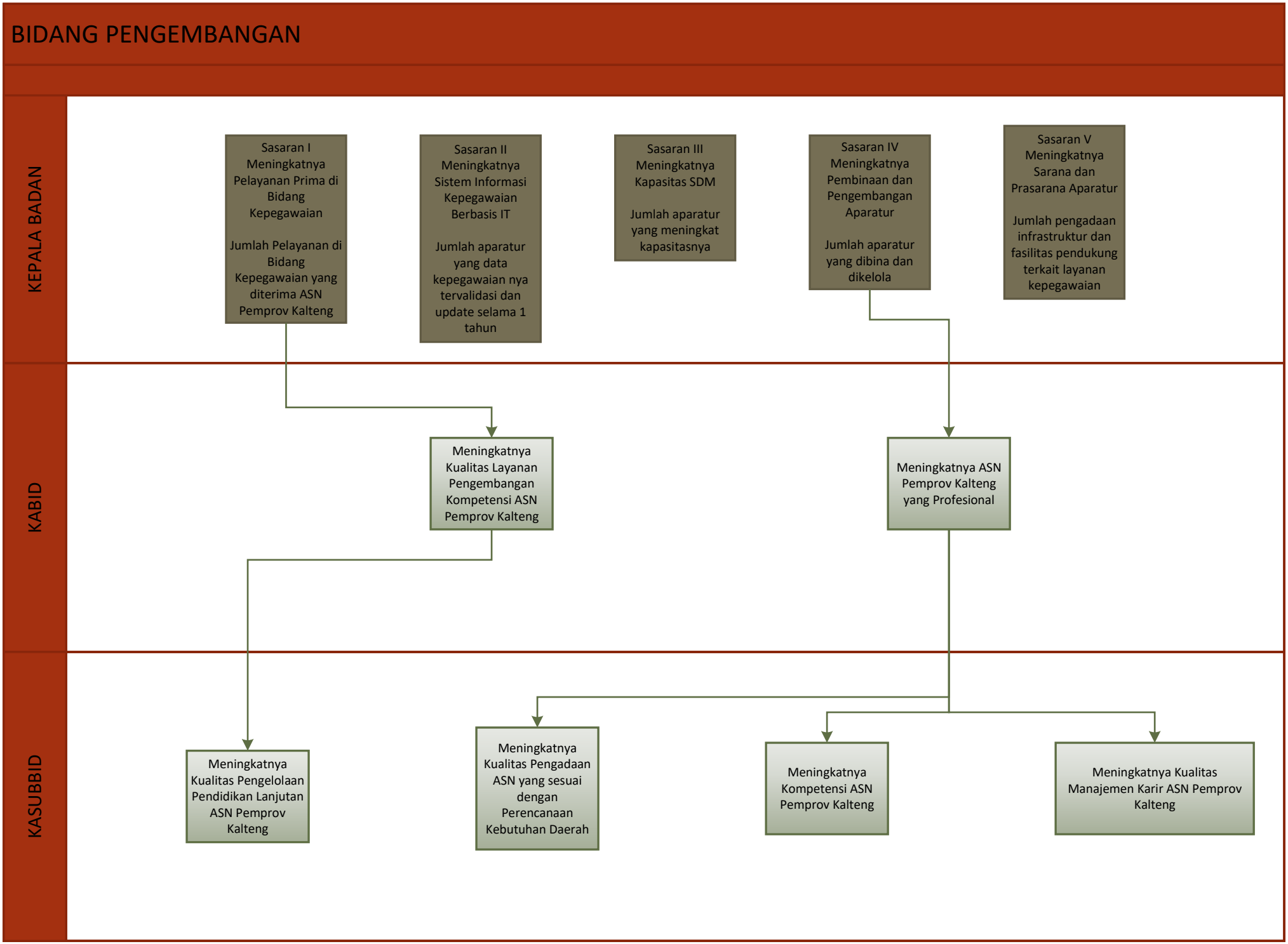
BIDANG PENGEMBANGAN
KEPALA BADAN
KABID
KASUBBID
Sasaran I Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian
Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian yang diterima ASN Pemprov Kalteng
Sasaran II Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT
Jumlah aparatur yang data kepegawaian nya tervalidasi dan update selama 1 tahun
Sasaran III Meningkatnya Kapasitas SDM
Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya
Sasaran IV Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah aparatur yang dibina dan dikelola
Sasaran V Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah pengadaan infrastruktur dan fasilitas pendukung terkait layanan kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengembangan Kompetensi ASN Pemprov Kalteng
Meningkatnya ASN Pemprov Kalteng yang Profesional
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pemprov Kalteng
Meningkatnya Kualitas Pengadaan ASN yang sesuai dengan Perencanaan Kebutuhan Daerah
Meningkatnya Kompetensi ASN Pemprov Kalteng
Meningkatnya Kualitas Manajemen Karir ASN Pemprov Kalteng

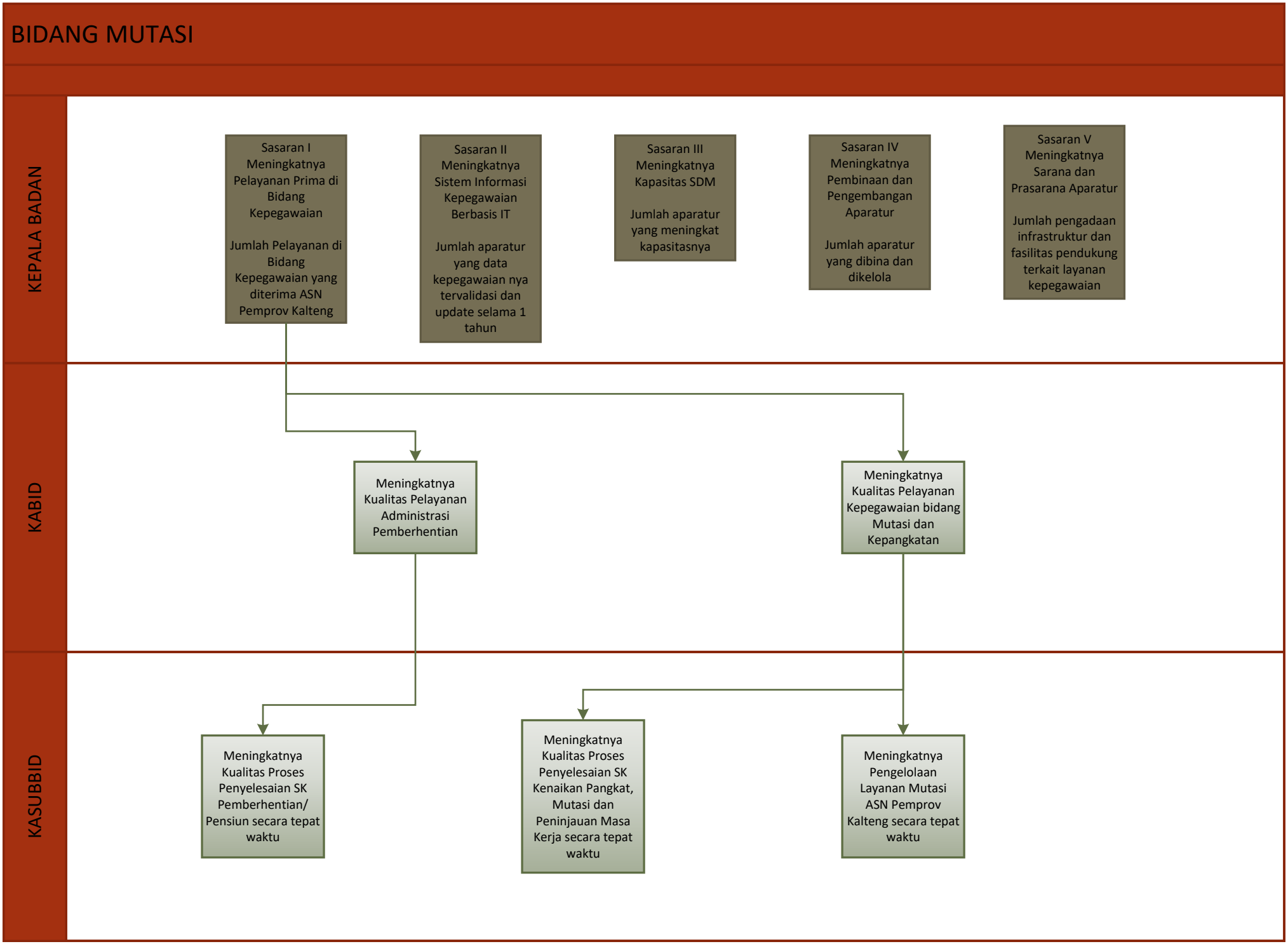
BIDANG MUTASI
KEPALA BADAN
KABID
KASUBBID
Sasaran I Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian
Jumlah Pelayanan di Bidang Kepegawaian yang diterima ASN Pemprov Kalteng
Sasaran II Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT
Jumlah aparatur yang data kepegawaian nya tervalidasi dan update selama 1 tahun
Sasaran III Meningkatnya Kapasitas SDM
Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya
Sasaran IV Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah aparatur yang dibina dan dikelola
Sasaran V Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah pengadaan infrastruktur dan fasilitas pendukung terkait layanan kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pemberhentian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian bidang Mutasi dan Kepangkatan
Meningkatnya Kualitas Proses Penyelesaian SK Pemberhentian/ Pensiun secara tepat waktu
Meningkatnya Kualitas Proses Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat, Mutasi dan Peninjauan Masa Kerja secara tepat waktu
Meningkatnya Pengelolaan Layanan Mutasi ASN Pemprov Kalteng secara tepat waktu

BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN

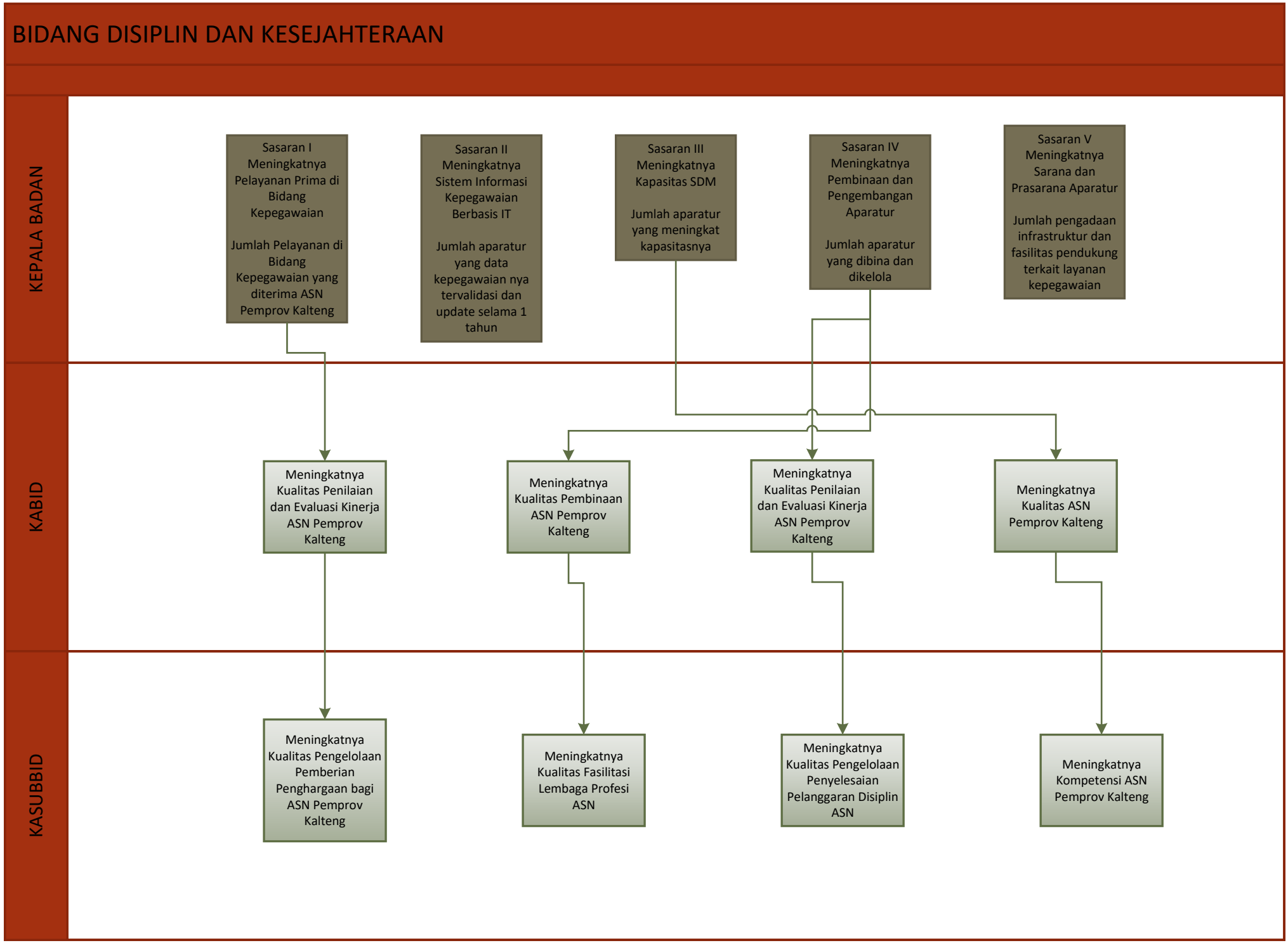

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 DESEMBER 2021

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA				BELANJA TRANSFER				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13	=13/12*1	15	16	17	=17/16*1	19	20=5+9+13+17	21=20/3*100	22
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.406.717.084	12.285.379.084	9.791.974.670	79,70%	85,93%	121.338.000	110.656.364	91,20%	100,00	-				-				9.902.631.034	79,82%	87,77%
	TOTAL	12.406.717.084	12.285.379.084	9.791.974.670	79,70%	85,93%	121.338.000	110.656.364	91,20%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	9.902.631.034	79,82%	87,77%

Pangkalan Bun, Desember 2021
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HERRY ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196809011989112005

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>RP. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 DESEMBER 2021

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	109.838.000	1	100.756.364	1	100.756.364	1	100.756.364	1	100.756.364		

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 DESEMBER 2021

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	-										

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 2,5 MILIAR S/D Rp. 50 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 DESEMBER 2021

NO	NAMA OPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PAMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-										

Keterangan :
- Pemilihan / Pelaksanaan : Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- Hasil Pemilihan : Jumlah paket yang proses pemilihan penyediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- Kontrak : Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- Serah Terima : Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LISDA SURIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196809011989112005

TABEL REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PER 31 DESEMBER 2021

NO	OPD	TARGET TOTAL (Rp)	TOTAL		PENDAPATAN ASLI DAERAH			PENDAPATAN TRANSFER						LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
			REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	TRANSFER PUSAT			TRANSFER ANTAR DAERAH					
								TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	**2**	**3 = 6+9+12**	**4 = 7+10+13**	**5 = 4/3*100%**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**12**	**13**	**14**
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 55.000.000	Rp 143.100.000	260,18%	Rp 55.000.000	Rp 143.100.000	260,18%	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	0
TOTAL		Rp 55.000.000	Rp 143.100.000	260,18%	Rp 55.000.000	Rp 143.100.000	260,18%	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	0

Palangka Raya, Desember 2021
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LISPA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196809011989112005

PROGRES REALISASI APBD TRIWULAN IV TA 2021
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI PER 31 OKTOBER 2021			REALISASI PER 30 NOVEMBER 2021			REALISASI PER 31 DESEMBER 2021		
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK
			Rp	(%)	(%)	Rp	(%)	(%)	Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Tidak Langsung (BTL)	6.328.124.752	4.642.812.056	73,37%	73,37%	5.161.807.165	81,57%	81,57%	5.813.137.252	91,86%	100,00%
2	Belanja Langsung (BL)	6.078.592.332	2.312.687.916	38,05%	38,05%	3.264.542.710	53,71%	53,71%	4.089.493.782	67,28%	85,71%
JUMLAH		12.406.717.084	6.955.499.972	56,06%	56,06%	8.426.349.875	67,92%	67,92%	9.902.631.034	79,82%	87,77%

Palangka Raya, Januari 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ANSHAR ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196809011989112005

TABEL T-B.4.
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/Kegiatan RKPD tahun		Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Satuan	Target RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Tingkat Realisasi (%)	Target RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan I tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target s/d triwulan I tahun 2021 (%)	
	URUSAN PENUNJANG																
	BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN																
	PROGRAM	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**														
5.03.01.1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah	7	Dokumen	5	5	100,00%	5	5	100,00%	7	Dokumen	7	100,00%	BKD
5.03.01.1.01.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Realisasi Kinerja SKPD	10	Dokumen	10	10	100,00%	10	10	100,00%	10	Dokumen	10	100,00%	BKD
5.03.01.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	Tahun	1	100,00%	BKD
5.03.01.1.02.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25	25	100,00%	25	25	100,00%	1	Laporan	1	100,00%	BKD
5.03.01.1.02.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1	Laporan	25	25	100,00%	25	25	100,00%	1	Laporan	1	100,00%	BKD
5.03.01.1.03.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarkannya Asuransi Aset SKPD	100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.01.1.05.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai BKD	150	Stel	-	-		70	70	100,00%	150	Stel	-	0,00%	BKD (rasionalisasi anggaran/kegiatan dihilangkan)
5.03.01.1.05.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	Orang	50	50	100,00%	-	0		100	Orang	-	0,00%	BKD (rasionalisasi anggaran/kegiatan dihilangkan)
5.03.01.1.05.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas PNS mengikuti Bimtek	10	Orang	40	6	15,00%	40	10	25,00%	10	Orang	10	100,00%	BKD
5.03.01.1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.01.1.06.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/Kegiatan RKPD tahun		Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Satuan	Target RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Tingkat Realisasi (%)	Target RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan I tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target s/d triwulan I tahun 2021 (%)	
5.03.01.1.06.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.01.1.06.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan	100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.01.1.06.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.01.1.07.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi instalasi listrik kantor	100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.01.1.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.01.1.08.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.01.1.08.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.01.1.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarkannya pajak kendaraan dinas bermotor milik SKPD	30	Unit	5	5	100,00%	8	8	100,00%	30	Unit	100	333,33%	BKD
5.03.01.1.09.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.01.1.09.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	100	Persen	100	100	100,00%				100	Persen	100	100,00%	BKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/Kegiatan RKPD tahun		Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Satuan	Target RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Tingkat Realisasi (%)	Target RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan I tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target s/d triwulan I tahun 2021 (%)	
5.03.01.1.09.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya secara rutin AC milik SKPD	100	Persen	100	100	100,00%				100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.02.1.01.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Capra IPDN yang lulus tes	40	Orang	155	40	25,81%	-	0		40	Orang	38	95,00%	BKD
5.03.02.1.01.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS dan PPPK Provinsi yang lulus test	300	Orang	200	-	0,00%	200	381	190,50%	300	Orang	374	124,67%	BKD
5.03.02.1.01.06	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian pegawai purna tugas BUP	300	SK	145	298	205,52%	300	337	112,33%	300	SK	473	157,67%	BKD
5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya kegiatan kebugaran jasmani PN	10	Kali	11	11	100,00%	11	3	27,27%	10	Kali	1	10,00%	BKD
5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian PNS	30	Kali	33	33	100,00%	33	9	27,27%	30	Kali	10	33,33%	BKD
5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Publikasi Hari KORPRI	1	Kali	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	Kali	-	0,00%	BKD
5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Rapat Kerja DPP KORPRI	1	Kali	1	1	100,00%	-	0		1	Kali	-	0,00%	BKD
5.03.02.1.01.10	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya PPID BKD Provinsi Kalimantan Tengah	1	Laporan	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	Laporan	1	100,00%	BKD
5.03.02.1.01.10	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tertatanya dokumen kepegawaian PNS Provinsi Kalimantan Tengah	100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.02.1.01.10	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terpublikasinya Informasi Kepegawaian Secara Online	100	Informasi	-	-		-	0		100	Informasi	154	154,00%	BKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/Kegiatan RKPD tahun		Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Satuan	Target RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Tingkat Realisasi (%)	Target RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan I tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target s/d triwulan I tahun 2021 (%)	
5.03.02.1.01.11	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya dan terkelolanya Data PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang up to date	10000	Data PNS	9.000	10.059	111,77%	9.000	9556	106,18%	10000	Data PNS	9.596	95,96%	BKD
5.03.02.1.01.11	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya Program/Aplikasi Kepegawaian SiTaguh online Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1	Aplikasi	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	Aplikasi	1	100,00%	BKD
5.03.02.1.02.01	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Assesmen Mutasi PNS	2	Kali	-	-		1	1	100,00%	2	Kali	1	50,00%	BKD
5.03.02.1.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS naik pangkat periode April dan Oktober	4000	SK	2.100	3.413	162,52%	2.100	2554	121,62%	4000	SK	5.599	139,98%	BKD
5.03.02.1.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I dan II	400	Orang	400	449	112,25%	400	1284	321,00%	400	Orang	65	16,25%	BKD
5.03.02.1.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	400	Orang	400	197	49,25%	-	0		400	Orang	396	99,00%	BKD
5.03.02.1.02.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Assesmen Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	1	Kali	1	1	100,00%	-	0		1	Kali	1	100,00%	BKD
5.03.02.1.02.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pelantikan Jabatan Struktural	1	Kali	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	Kali	2	200,00%	BKD
5.03.02.1.02.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kali	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	Kali	1	100,00%	BKD
5.03.02.1.03.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Seleksi dan Monitoring Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100	Persen	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	Persen	100	100,00%	BKD
5.03.02.1.03.13	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pejabat Fungsional Yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	1000	SK	500	496	99,20%	500	997	199,40%	1000	SK	973	97,30%	BKD
5.03.02.1.04.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS penerima Satyalancana Karya Satya Provinsi Kalimantan Tengah	250	PNS	250	387	154,80%	250	546	218,40%	250	PNS	228	91,20%	BKD
5.03.02.1.04.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS yang membuat SKP Eselon II Provinsi Kalimantan Tengah	44	Orang	44	44	100,00%	44	44	100,00%	44	Orang	44	100,00%	BKD
5.03.02.1.04.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS	2	Kegiatan	1	1	100,00%	2	2	100,00%	2	Kegiatan	1	50,00%	BKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/Kegiatan RKPD tahun		Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Satuan	Target RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Tingkat Realisasi (%)	Target RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan I tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target s/d triwulan I tahun 2021 (%)	
5.03.02.1.04.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terselesaikannya laporan yang berkaitan dengan tindak disiplin PNS dan perceraian PNS	50	Laporan	20	28	140,00%	20	34	170,00%	50	Laporan	24	48,00%	BKD

Palangka Raya, Januari 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

[illegible] ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196809011989112005

Tabel T-C.19

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (TW IV 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW IV 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan IV 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) (Triwulan IV)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3			4	5		6		7		8		9 = 8/7 X100%		10 = 6+8		11 = 10/5X100%			13
		Urusan				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	BKD	
				Urusan Penunjang																	
				Bidang Urusan Kepegawaian																	
1	5.03.01.1.01.01		Perencanaan, Pen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah	100%	110.574.288	78,75%	3.150.000	100%	48.982.288	100%	48.857.500	100%	48.857.500	47,03%	52.007.500	47,03%	52.007.500	BKD	
2	5.03.01.1.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Realisasi Kinerja SKPD	100%	118.108.712	99,50%	188.602.000	100%	109.848.712	96%	105.668.500	96%	105.668.500	249,15%	294.270.500	249,15%	294.270.500	BKD	
3	5.03.01.1.02.01		Administrasi Keua	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.085.464.252	87,51%	6.272.635.047	100%	6.328.124.752	92%	5.813.137.252	92%	5.813.137.252	198,60%	12.085.772.299	198,60%	12.085.772.299	BKD	
4	5.03.01.1.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	13.864.000	99,44%	31.184.250	100%	13.864.000	100%	13.864.000	100%	13.864.000	324,93%	45.048.250	324,93%	45.048.250	BKD	
5	5.03.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	100%	13.289.000	98,69%	19.811.500	100%	13.289.000	100%	13.289.000	100%	13.289.000	249,08%	33.100.500	249,08%	33.100.500	BKD	
6	5.03.01.1.03.02		Administrasi Bara	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarkannya Asuransi Aset SKPD	100%	36.718.000	85,38%	19.372.383	100%	36.718.000	83%	30.539.881	83%	30.539.881	135,93%	49.912.264	135,93%	49.912.264	BKD	
7	5.03.01.1.05.02		Administrasi Kepe	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai BKD	100%	-	100,00%	51.170.000	100%	-		-		-		51.170.000		51.170.000	BKD	
8	5.03.01.1.05.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	48.855.000		-	100%	48.855.000	0%	-	0%	-	0,00%	-	0,00%	-	BKD	
9	5.03.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas PNS mengikuti Bimtek	100%	100.000.000	100,00%	6.900.000		-		-		-	6,90%	6.900.000	6,90%	6.900.000	BKD	
10	5.03.01.1.06.01		Administrasi Umu	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100%	30.000.000	99,96%	14.984.000	100%	30.000.000	96%	28.675.000	96%	28.675.000	145,53%	43.659.000	145,53%	43.659.000	BKD	
11	5.03.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	312.980.000	99,62%	116.260.000	100%	222.726.000	92%	205.133.864	92%	205.133.864	102,69%	321.393.864	102,69%	321.393.864	BKD	
12	5.03.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	48.500.000	100,00%	19.105.000	100%	48.500.000	100%	48.500.000	100%	48.500.000	139,39%	67.605.000	139,39%	67.605.000	BKD	
13	5.03.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan	100%	55.000.000	91,48%	28.360.000	100%	55.000.000	49%	27.120.000	49%	27.120.000	100,87%	55.480.000	100,87%	55.480.000	BKD	
14	5.03.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	418.050.000	99,57%	365.304.400	100%	669.342.228	93%	622.816.761	93%	622.816.761	236,36%	988.121.161	236,36%	988.121.161	BKD	
15	5.03.01.1.07.10		Pengadaan Barang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi instalasi listrik kantor	100%	75.151.000		-		-		-		-	0,00%	-	0,00%	-	BKD	
16	5.03.01.1.08.01		Penyediaan Jasa P	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	10.000.000	99,78%	14.748.275	100%	10.000.000	14%	1.370.500	14%	1.370.500	161,19%	16.118.775	161,19%	16.118.775	BKD	
17	5.03.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	380.000.000	69,60%	273.816.545	100%	380.000.000	68%	260.027.690	68%	260.027.690	140,49%	533.844.235	140,49%	533.844.235	BKD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (TW IV 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW IV 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan IV 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) (Triwulan IV)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
18	5.03.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	1.151.443.870	91,50%	1.136.343.400	100%	1.048.855.054	93%	970.809.150	93%	970.809.150	183,00%	2.107.152.550	183,00%	2.107.152.550	BKD	
19	5.03.01.1.09.01	Pemeliharaan Bar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarkannya pajak kendaraan dinas bermotor milik SKPD	100%	268.360.000	83,62%	217.486.900	100%	268.360.000	86%	230.819.099	86%	230.819.099	167,05%	448.305.999	167,05%	448.305.999	BKD	
20	5.03.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	27.420.000	98,00%	14.700.000	100%	27.420.000	82%	22.450.000	82%	22.450.000	135,49%	37.150.000	135,49%	37.150.000	BKD	
21	5.03.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	100%	250.000.000	99,18%	56.444.200	100%	50.000.000	100%	49.875.000	100%	49.875.000	42,53%	106.319.200	42,53%	106.319.200	BKD	
22	5.03.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya secara rutin AC milik SKPD	100%	25.010.000	95,60%	23.900.000	100%	25.010.000	77%	19.153.000	77%	19.153.000	172,14%	43.053.000	172,14%	43.053.000	BKD	
23	5.03.02.1.01.03	Pengadaan, Pembo	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Capra IPDN yang lulus tes	100%	382.108.800	95,26%	298.559.600	100%	349.782.800	78%	273.477.500	78%	273.477.500	149,71%	572.037.100	149,71%	572.037.100	BKD	
24	5.03.02.1.01.03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS dan PPPK Provinsi yang lulus test																
25	5.03.02.1.01.06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian pegawai purna tugas BUP	100%	78.182.000	90,48%	29.215.250	100%	33.828.000	86%	29.216.000	86%	29.216.000	74,74%	58.431.250	74,74%	58.431.250	BKD	
26	5.03.02.1.01.08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya kegiatan kebugaran jasmani PNS	100%	489.675.000	100,00%	103.041.200	100%	624.904.000	66%	411.636.687	66%	411.636.687	105,11%	514.677.887	105,11%	514.677.887	BKD	
				Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian PNS																
				Terlaksananya Publikasi Hari KORPRI																
				Terlaksananya Rapat Kerja DPP KORPRI																
27	5.03.02.1.01.10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya PPID BKD Provinsi Kalimantan Tengah	100%	97.503.000	98,11%	66.995.250	100%	66.178.000	100%	66.178.000	100%	66.178.000	136,58%	133.173.250	136,58%	133.173.250	BKD	
				Tertatanya dokumen kepegawaian PNS Provinsi Kalimantan Tengah																
				Terpublikasinya Informasi Kepegawaian Secara Online																
28	5.03.02.1.01.11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya dan terkelolanya Data PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang up to date	100%	171.981.000	98,69%	240.382.600	100%	93.413.750	90%	84.538.750	90%	84.538.750	188,93%	324.921.350	188,93%	324.921.350	BKD	
				Tersedianya Program/Aplikasi Kepegawaian SiTaguh online Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah																
29	5.03.02.1.02.01	Mutasi dan Promo	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Assesmen Mutasi PNS	100%	104.478.000	98,46%	31.880.450	100%	75.714.000	100%	75.698.000	100%	75.698.000	102,97%	107.578.450	102,97%	107.578.450	BKD	
30	5.03.02.1.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS naik pangkat periode April dan Oktober	100%	189.998.000	82,72%	101.827.300	100%	74.380.000	74%	55.278.000	74%	55.278.000	82,69%	157.105.300	82,69%	157.105.300	BKD	

I KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (TW IV 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW IV 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan IV 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) (Triwulan IV)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
		PROGRAM	Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I dan II																
			Terlaksananya Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah																
31	5.03.02.1.02.03		Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Assesmen Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	100%	1.002.776.000	61,67%	61.991.500	100%	1.389.972.000	12%	170.421.600	12%	170.421.600	23,18%	232.413.100	23,18%	232.413.100	BKD	
				Terlaksananya Pelantikan Jabatan Struktural																
				Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama																
32	5.03.02.1.03.04	Pengembangan Ko	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Seleksi dan Monitoring Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100%	27.300.000	75,37%	45.726.500	100%	22.060.000	100%	22.060.000	100%	22.060.000	248,30%	67.786.500	248,30%	67.786.500	BKD	
33	5.03.02.1.03.13		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pejabat Fungsional Yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	100%	18.115.000	80,24%	58.052.900	100%	18.115.000	100%	18.093.000	100%	18.093.000	420,35%	76.145.900	420,35%	76.145.900	BKD	
34	5.03.02.1.04.04	Penilaian dan Eva	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS penerima Satyalancana Karya Satya Provinsi Kalimantan Tengah	100%	130.192.000	79,82%	66.042.850	100%	83.382.000	75%	62.215.000	75%	62.215.000	98,51%	128.257.850	98,51%	128.257.850	BKD	
				PNS yang membuat SKP Eselon II Provinsi Kalimantan Tengah																
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS																
35	5.03.02.1.04.08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terselesaikannya laporan yang berkaitan dengan tindak disiplin PNS dan perceraian PNS	100%	322.488.500	94,98%	107.376.000	100%	140.092.500	87%	121.711.000	87%	121.711.000	71,04%	229.087.000	71,04%	229.087.000	BKD	

Jumlah Anggaran Keseluruhan 12.406.717.084
Jumlah Realisasi Dari Seluruh Program 9.902.629.734
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan (%) 79,82%
Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Provinsi berikutnya :

Palangka Raya, Januari 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LISDA [illegible]IYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196809011989112005

TABEL E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PERANGKAT DAERAH

TABEL E.19
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi :

1 - Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) / 2020		Target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi / 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan**																								
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				**100%**	**12.593.585.422**	**83,39%**	**10.085.369.300**	**100%**	**12.406.717.084**	**8,63%**	**1.070.768.301**	**23,91%**	**2.965.835.525**	**15,79%**	**1.959.115.956**	**31,49%**	**3.906.911.252**	**79,82%**	**9.902.631.039**		**19.988.000.339**		**158,72%**	BKD
		5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**		**100%**	**9.904.196.422**	**81,11%**	**8.874.277.900**	**100%**	**9.434.895.034**	**11,35%**	**1.070.768.301**	**28,94%**	**2.730.109.825**	**18,31%**	**1.727.521.156**	**31,62%**	**2.983.706.915**	**90,22%**	**8.512.106.202**		**17.386.384.102**		**175,55%**	BKD
		5.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Pengelolan Aset/Barang Daerah**	**100%**	**250.000.000**	**89,12%**	**191.752.000**	**100%**	**158.831.000**	**0,00%**	**0**	**17,38%**	**27.604.750,00**	**25,67%**	**40.775.750**	**54,24%**	**86.145.500**	**97,29%**	**154.526.000**		**346.278.000**		**138,51%**	BKD
		5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah	100%	125.000.000	78,75%	3.150.000	100%	48.982.288	0,00%	-	20,17%	9.880.000	0,00%	0	**79,57%**	38.977.500	99,75%	48.857.500		52.007.500		41,61%	BKD
		5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Realisasi Kinerja SKPD	100%	125.000.000	99,50%	188.602.000	100%	109.848.712	0,00%	-	16,14%	17.724.750	230,05%	40.775.750	**42,94%**	47.168.000	96,19%	105.668.500		294.270.500		235,42%	BKD
		5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Pengelolan Aset/Barang Daerah**	100%	**6.112.617.252**	**95,21%**	**6.323.630.797**	**100%**	**6.355.277.752**	**11,25%**	**714.720.409**	**34,55%**	2.195.738.312	**59,33%**	**1.302.678.393**	**25,60%**	**1.627.153.138**	**91,90%**	**5.840.290.252**		**12.163.921.049**		**199,00%**	BKD
		5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.085.464.252	87,51%	6.272.635.047	100%	6.328.124.752	11,29%	714.720.409	34,70%	2.195.738.312		1.302.678.393	**25,28%**	1.600.000.138	91,86%	5.813.137.252		12.085.772.299		198,60%	BKD
		5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	13.289.000	99,44%	31.184.250	100%	13.864.000	0,00%	-	0,00%	-		-	**100,00%**	13.864.000	100,00%	13.864.000		45.048.250		338,99%	BKD
		5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	100%	13.864.000	98,69%	19.811.500	100%	13.289.000	0,00%	-	0,00%	-		-	**100,00%**	13.289.000	100,00%	13.289.000		33.100.500		238,75%	BKD
		5.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen Pengelolan Aset/Barang Daerah**	100%	**36.718.000**	**85,38%**	**19.372.383**	**100%**	**36.718.000**	**0,00%**	-	**20,35%**	**7.471.000**			**62,83%**	**23.068.881**	**83,17%**	**30.539.881**		**49.912.264**		**135,93%**	BKD
		5.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarkannya Asuransi Aset SKPD	100%	36.718.000	85,38%	19.372.383	100%	36.718.000	0,00%	-	20,35%	7.471.000		-	**62,83%**	23.068.881	83,17%	30.539.881		49.912.264		135,93%	BKD
		5.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya**	100%	**335.000.000**	**100,00%**	**58.070.000**	**100%**	**48.855.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**					**0,00%**	**-**		**58.070.000**		**17,33%**	BKD
		5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai BKD	100%	155.000.000	100,00%	51.170.000	0%										0,00%	-		51.170.000		33,01%	BKD
		5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	125.000.000		-	100%	48.855.000	0,00%	-	0,00%	-		-		-	0,00%	-		-		0,00%	BKD
		5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas PNS mengikuti Bimtek	100%	55.000.000	100,00%	6.900.000	100%											-		6.900.000		12,55%	BKD
		5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik**	100%	**915.000.000**	**98,13%**	**544.013.400**	**100%**	**1.025.568.228**	**9,46%**	**97.040.600**	**6,21%**	**63.662.000**	**7,14%**	**73.185.000**	**68,09%**	**698.358.025**	**90,90%**	**932.245.629**		**1.476.259.029**		**161,34%**	BKD
		5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100%	30.000.000	99,96%	14.984.000	100%	30.000.000	0,00%	-	29,42%	8.825.000	0,00%	-	**66,17%**	19.850.000	95,58%	28.675.001		43.659.001		145,53%	BKD
		5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	350.000.000	99,62%	116.260.000	100%	222.726.000	10,63%	23.670.000	6,80%	15.142.000	11,12%	24.767.000	**63,56%**	141.554.864	92,10%	205.133.865		321.393.865		91,83%	BKD
		5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	55.000.000	100,00%	19.105.000	100%	48.500.000	11,60%	5.625.000	28,40%	13.775.000	1,81%	880.000	**58,19%**	28.220.000	100,00%	48.500.001		67.605.001		122,92%	BKD
		5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan	100%	55.000.000	91,48%	28.360.000	100%	55.000.000	0,44%	240.000	11,78%	6.480.000	12,44%	6.840.000	**24,65%**	13.560.000	49,31%	27.120.000		55.480.000		100,87%	BKD
		5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	425.000.000	99,57%	365.304.400	100%	669.342.228	10,09%	67.505.600	2,90%	19.440.000	6,08%	40.698.000	**73,98%**	495.173.161	93,05%	622.816.762		988.121.162		232,50%	BKD
		5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal**	100%	**75.000.000**	**0%**	**-**	**100%**															**0,00%**	BKD
		5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi instalasi listrik kantor	100%	75.000.000	0%	-	100%															0,00%	BKD
		5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik**	100%	**1.559.861.170**	**86,96%**	**1.424.908.220**	**100%**	**1.438.855.054**	**14,51%**	**208.803.392**	**26,90%**	**387.048.363**	**17,87%**	**257.093.713**	**26,36%**	**379.261.872**	**85,64%**	**1.232.207.340**		**2.657.115.560**		**170,34%**	BKD
		5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa administrasi surat menyurat	100%	15.000.000	99,78%	14.748.275	100%	10.000.000	0,00%	-	0,00%	-	9,91%	990.500	**3,80%**	380.000	13,71%	1.370.500		16.118.775		107,46%	BKD
		5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	380.000.000	69,60%	273.816.545	100%	380.000.000	16,49%	62.662.592	16,51%	62.726.763	16,35%	62.113.413	**115,74%**	72.524.922	68,43%	260.027.690		533.844.235		140,49%	BKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) / 2020		Target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi / 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
		5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.164.861.170	91,50%	1.136.343.400	100%	1.048.855.054	13,93%	146.140.800	30,92%	324.321.600	18,50%	193.989.800	**29,21%**	306.356.950	92,56%	970.809.150		2.107.152.550		180,89%	BKD
		5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik**	100%	**620.000.000**	**94,10%**	**312.531.100**	**100%**	**370.790.000**	**13,54%**	**50.203.900**	**13,10%**	**48.585.400**	**14,51%**	**53.788.300**	**45,77%**	**169.719.499**	**86,92%**	**322.297.100**		**634.828.200**		**102,39%**	BKD
		5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarkannya pajak kendaraan dinas bermotor milik SKPD	100%	300.000.000	83,62%	217.486.900	100%	268.360.000	18,71%	50.203.900	18,01%	48.335.400	12,73%	34.175.300	**36,56%**	98.104.499	86,01%	230.819.100		448.306.000		149,44%	BKD
		5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan milik SKPD	100%	45.000.000	98,00%	14.700.000	100%	27.420.000	0,00%	-	0,91%	250.000	37,20%	10.200.000	**43,76%**	12.000.000	81,87%	22.450.000		37.150.000		82,56%	BKD
		5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	100%	250.000.000	99,18%	56.444.200	100%	50.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	**99,75%**	49.875.000	99,75%	49.875.000		106.319.200		42,53%	BKD
		5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya secara rutin AC milik SKPD	100%	25.000.000	95,60%	23.900.000	100%	25.010.000	0,00%	-	0,00%	-	37,64%	9.413.000	**38,94%**	9.740.000	76,58%	19.153.000		43.053.000		172,21%	BKD
		5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**100%**	**2.689.389.000**	**85,66%**	**1.211.091.400**	**100%**	**2.971.822.050**	**0,00%**	**-**	**7,93%**	**235.725.700**	**7,79%**	**231.594.800**	**31,07%**	**923.204.337**	**46,79%**	**1.390.524.838**		**2.601.616.238**		**96,74%**	BKD
		5.03.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya**	**100%**	**1.380.661.000**	**96,51%**	**738.193.900**	**100%**	**1.168.106.550**	**0,00%**	**-**	**4,08%**	**47.701.000**	**4,01%**	**46.850.000**	**65,96%**	**770.495.937**	**74,06%**	**865.046.938**		**1.603.240.838**		**116,12%**	BKD
		5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Capra IPDN yang lulus tes	100%	395.000.000	95,26%	298.559.600	100%	349.782.800	0,00%	-	0,00%	-	12,88%	45.050.000	**65,31%**	228.427.500	78,18%	273.477.500		572.037.100		144,82%	BKD
				Jumlah CPNS dan PPPK Provinsi yang lulus test																					
		5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian pegawai purna tugas BUP	100%	136.844.000	90,48%	29.215.250	100%	33.828.000	0,00%	-	48,79%	16.503.000	0,00%	-	**37,58%**	12.713.000	86,37%	29.216.000		58.431.250		42,70%	BKD
		5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya kegiatan kebugaran jasmani PN	100%	477.225.000	100,00%	103.041.200	100%	624.904.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	**65,87%**	411.636.687	65,87%	411.636.688		514.677.888		107,85%	BKD
				Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian PNS																					
				Terlaksananya Publikasi Hari KORPRI																					
				Terlaksananya Rapat Kerja DPP KORPRI																					
		5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	100%	150.000.000	98,11%	66.995.250	100%	66.178.000	0,00%	-	17,05%	11.283.000	0,00%	-	**82,95%**	54.895.000	100,00%	66.178.000		133.173.250		88,78%	BKD
				Terlaksananya PPID BKD Provinsi Kalimantan Tengah																					
				Tersedianya data PNS yang up to date																					
				Tertatanya dokumen kepegawaian PNS Provinsi Kalimantan Tengah																					
		5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya dan terkelolanya Data PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang up to date	100%	221.592.000	98,69%	240.382.600	100%	93.413.750	0,00%	-	21,32%	19.915.000	1,93%	1.800.000	**67,25%**	62.823.750	90,50%	84.538.750		324.921.350		146,63%	BKD
				Tersedianya Program/Aplikasi Kepegawaian SITaguh online Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah																					
		5.03.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya**	**100%**	**788.963.000**	**80,95%**	**195.699.250**	**100%**	**1.540.066.000**	**0,00%**	**-**	**5,40%**	**83.098.000**	**8,53%**	**131.390.600**	**5,64%**	**86.909.000**	**19,57%**	**301.397.600**		**497.096.850**		**63,01%**	BKD
		5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Assesmen Mutasi PNS	100%	150.000.000	98,46%	31.880.450	100%	75.714.000	0,00%	-	39,39%	29.822.000	13,93%	10.548.000	**46,66%**	35.328.000	99,98%	75.698.000		107.578.450		71,72%	BKD
		5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS naik pangkat periode April dan Oktober	100%	230.682.000	82,72%	101.827.300	100%	74.380.000	0,00%	-	35,23%	26.203.000	33,80%	25.140.000	**5,29%**	3.935.000	74,32%	55.278.000		157.105.300		68,10%	BKD
				Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I dan II																					
				Terlaksananya Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah																					
		5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Assesmen Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	100%	408.281.000	61,67%	61.991.500	100%	1.389.972.000	0,00%	-	1,95%	27.073.000	6,89%	95.702.600	**3,43%**	47.646.000	12,26%	170.421.600		232.413.100		**56,92%**	BKD
				Terlaksananya Pelantikan Jabatan Struktural												-									
				Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama												-									
		5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya**	**100%**	**60.000.000**	**77,80%**	**103.779.400**	**100%**	**40.175.000**	**0,00%**	**-**	**65,07%**	**26.143.000**	**-**	**-**	**34,87%**	**14.010.000**	**99,95%**	**40.153.000**		**143.932.400**		**239,89%**	BKD
		5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Seleksi dan Monitoring Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100%	35.000.000	75,37%	45.726.500	100%	22.060.000	0,00%	-	50,32%	11.100.000	0,00%	-	**49,68%**	10.960.000	100,00%	22.060.000		67.786.500		193,68%	BKD
		5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pejabat Fungsional Yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	100%	25.000.000	80,24%	58.052.900	100%	18.115.000	0,00%	-	83,04%	15.043.000	0,00%	-	**16,84%**	3.050.000	99,88%	18.093.000		76.145.900		304,58%	BKD
		5.03.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya**	**100%**	**459.765.000**	**87,40%**	**173.418.850**	**100%**	**223.474.500**	**0,00%**	**-**	**35,25%**	**78.783.700**	**23,87%**	**53.354.200**	**23,17%**	**51.789.400**	**82,30%**	**183.927.300**		**357.346.150**		**77,72%**	BKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) / 2020		Target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi / 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
		5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS penerima Satyalancana Karya Satya Provinsi Kalimantan Tengah	100%	137.276.500	79,82%	66.042.850	100%	83.382.000	0,00%	-	29,83%	24.872.200	36,10%	30.104.200	**8,68%**	7.239.400	74,62%	62.215.800		128.258.650		93,43%	BKD
				PNS yang membuat SKP Eselon II Provinsi Kalimantan Tengah																					
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS																					
		5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terselesaikannya laporan yang berkaitan dengan tindak disiplin PNS dan perceraian PNS	100%	322.488.500	94,98%	107.376.000	100%	140.092.500	0,00%	-	38,48%	53.911.500	16,60%	23.250.000	**31,80%**	44.550.000	86,88%	121.711.500		229.087.500		71,04%	BKD
										Rata-rata Capaian Kinerja	**79,82%**													
										Predikat Kinerja															

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Sumber Daya Manusia Aparatur yang handal dan update teknologi informasi

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Rasionalisasi Anggaran sebagai dampak dari pandemi COVID-19

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Fasilitasi dan Optimalisasi Layanan Kepegawaian secara digital dan paperless melalui aplikasi si TAGUH BKD

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Optimalisasi Kinerja ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui sistem Merit (e-kinerja)

Palangka Raya, Januari 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HENDRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196809011989112005

BKD
Provinsi Kalimantan Tengah
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS TAHUN 2021

BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Willem AS No. 11 Palangka Raya 73111
07:00 - 15:30
www.bkd.kalteng.go.id
bkd@kalteng.go.id
+625363235428
@bkdprovkalteng
@bkdprovkalteng
DataInfo BKDProvKalteng

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERIANTO, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM	**HERIANTO, S.Sos**
NIP. 19661022 199308 1 001	NIP. 19630813 198603 1 021

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian di lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase	100
		Meningkatnya kualitas pemeliharaan aset BKD Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase	100
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan BKD Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase	100
		Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program/kegiatan SOPD BKD Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase	100
		Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja BKD	Persentase	100

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 36.718.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 246.100.000	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.825.117.252	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 864.591.496	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 570.790.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 75.151.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.543.238.916	
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 238.540.288	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM
NIP. 19661022 199308 1 001

Pihak Pertama,

HERIANTO, S.Sos
NIP. 19630813 198603 1 021

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPRIHATIN, S.STP, MAP**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERIANTO, S.Sos**

Jabatan : SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
HERIANTO, S.Sos	**SUPRIHATIN, S.STP,MAP**
NIP. 19630813 198603 1 021	NIP. 19840402 200212 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pemeliharaan aset BKD Provinsi Kalimantan Tengah	Terasuransikannya dan tertatanya aset dan inventarisasi BKD Prov Kalteng	Unit	1.491
		Tergunakannya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1
		Terlaksananya pelayanan umum kantor dan informasi publik	Tahun	1
		Terpeliharanya kendaraan bermotor dan Terbayarkannya pajak kendaraan bermotor selama 1 tahun	Unit	30
		Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai berupa koran dan peraturan perundang undangan selama 1 tahun	Media	2
2	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan BKD Provinsi Kalimantan Tengah	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1
		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
		Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan semesteran aset	Laporan	1

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 36.718.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.825.117.252	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 55.000.000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 268.360.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.533.238.916	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

HERIANTO, S.Sos
NIP. 19630813 198603 1 021

Pihak Pertama,

SUPRIHATIN, S.STP,MAP
NIP. 19840402 200212 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**M. NASRULLAH, SP**
Jabatan	:	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**HERIANTO, S.Sos**
Jabatan	:	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
HERIANTO, S.Sos	**M. NASRULLAH, SP**
NIP. 19630813 198603 1 021	NIP. 19790820 201001 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian di lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Tengah	Perbaikan perlengkapan kerja yang rusak	Unit	200
		Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya program dan kegiatan kepegawaian dan tersedianya makan minum rapat koordinasi pegawai selama 1 tahun	Instansi (Kab/ Kota dan Pusat)	17
		Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	Gedung	2
		Terlaksananya peningkatan kapasitas PNS mengikuti Bimtek	Orang	10
		Terlaksananya rehabilitasi instalasi listrik kantor	Persen	100
		Terpeliharanya secara rutin/berkala prasarana pendukung gedung kantor	Unit	37
		Tersedianya alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Jenis	4
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Lembar	200.000
		Tersedianya jasa surat menyurat	Tahun	1
		Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Tahun	1
		Tersedianya pakaian dinas pegawai BKD	Stel	150

No	Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	246.100.000	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	809.591.496	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	302.430.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	75.151.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	10.000.000	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

HERIANTO, S.Sos
NIP. 19630813 198603 1 021

Pihak Pertama,

M. NASRULLAH, SP
NIP. 19790820 201001 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**PRIYANTO, ST, M.Si**
Jabatan	:	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**HERIANTO, S.Sos**
Jabatan	:	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
HERIANTO, S.Sos	**PRIYANTO, ST, M.Si**
NIP. 19630813 198603 1 021	**NIP. 19800405 201001 1 009**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. MUKROMIN, S.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM	**M. MUKROMIN, S.Kom**
NIP. 19661022 199308 1 001	NIP. 19680708 199803 1 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian yang handal dan dapat diakses publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase	100
2	Meningkatnya Kualitas Database Kepegawaian Pemprov Kalteng yang akurat	Meningkatnya Kualitas Data Kepegawaian Pemprov Kalteng yang up to date	Persentase	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian melalui SI TAGUH Online	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Aplikasi bidang kepegawaian sesuai dengan perkembangan dan perubahan teknologi informasi	Persentase	100

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 271.409.000	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM
NIP. 19661022 199308 1 001

Pihak Pertama,

M. MUKROMIN, S.Kom
NIP. 19680708 199803 1 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**ADE TERESIA TIMBUNG, S.Sos, MAP**
Jabatan	:	KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**M. MUKROMIN, S.Kom**
Jabatan	:	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
M. MUKROMIN, S.Kom	**ADE TERESIA TIMBUNG, S.Sos, MAP**
NIP. 19680708 199803 1 009	NIP. 19820207 200903 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Data Kepegawaian Pemprov Kalteng yang *up to date*	Tersedianya dan terkelolanya Data PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang *up to date*	Data PNS	10000
2	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Aplikasi bidang kepegawaian sesuai dengan perkembangan dan perubahan teknologi informasi	Tersedianya Program/Aplikasi Kepegawaian SiTaguh online Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Aplikasi	1

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 171.981.000	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

M. MUKROMIN, S.Kom
NIP. 19680708 199803 1 009

Pihak Pertama,

ADE TERESIA TIMBUNG, S.Sos, MAP
NIP. 19820207 200903 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**RUSTANTINI, S.Sos**
Jabatan	:	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN INFORMASI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**M. MUKROMIN, S.Kom**
Jabatan	:	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
M. MUKROMIN, S.Kom	**RUSTANTINI, S.Sos**
NIP. 19680708 199803 1 009	NIP. 19760529 201001 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN INFORMASI

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya PPID BKD Provinsi Kalimantan Tengah	Laporan	1
		Tertatanya dokumen kepegawaian PNS Provinsi Kalimantan Tengah	Persen	100
		Terpublikasinya Informasi Kepegawaian Secara Online	Informasi	100

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 99.428.000	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

M. MUKROMIN, S.Kom
NIP. 19680708 199803 1 009

Pihak Pertama,

RUSTANTINI, S.Sos
NIP. 19760529 201001 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SUHUFI IBRAHIM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM	**Drs. SUHUFI IBRAHIM**
NIP. 19661022 199308 1 001	NIP. 19630421 199403 1 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas ASN Pemprov Kalteng	Meningkatnya Kualitas Pengadaan ASN yang sesuai dengan Perencanaan Kebutuhan Daerah	Persentase	100
		Meningkatnya Kompetensi ASN Pemprov Kalteng	Persentase	100
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Karir ASN Pemprov Kalteng	Persentase	100

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 1.002.776.000	
2	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 382.108.800	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 109.145.000	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM
NIP. 19661022 199308 1 001

Pihak Pertama,

Drs. SUHUFI IBRAHIM
NIP. 19630421 199403 1 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JEFI HENDRA, SE**

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG JABATAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SUHUFI IBRAHIM**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Drs. SUHUFI IBRAHIM
NIP. 19630421 199403 1 004

Pihak Pertama,

JEFI HENDRA, SE
NIP. 19800122 201212 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SUB BIDANG JABATAN

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemprov Kalteng	Terlaksananya Assesmen Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Orang	70
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Karir ASN Pemprov Kalteng	Terlaksananya Pelantikan Jabatan Struktural	Kali	1
		Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	70
		Tertatanya Jabatan Fungsional di Pemprov Kalteng	SK	1000

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 1.002.776.000	
2	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 18.115.000	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Drs. SUHUFI IBRAHIM
NIP. 19630421 199403 1 004

Pihak Pertama,

JEFI HENDRA, SE
NIP. 19800122 201212 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWI SETYAWATI, S.AP**

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG FORMASI, SELEKSI, DAN KADER

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SUHUFI IBRAHIM**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. SUHUFI IBRAHIM	**DEWI SETYAWATI, S.AP**
NIP. 19630421 199403 1 004	**NIP. 19840410 201101 2 001**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BIDANG FORMASI, SELEKSI, DAN KADER

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengadaan ASN yang sesuai dengan Perencanaan Kebutuhan Daerah	Jumlah Capra IPDN yang lulus tes	Orang	40
		Jumlah CPNS dan PPPK Provinsi yang lulus test	Orang	300
2	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemprov Kalteng	Terlaksananya Seleksi dan Monitoring Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Tahun	1
		Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I dan II	Orang	400
		Terlaksananya Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	Orang	400

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 143.950.000	
2	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 382.108.800	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 91.030.000	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Drs. SUHUFI IBRAHIM
NIP. 19630421 199403 1 004

Pihak Pertama,

DEWI SETYAWATI, S.AP
NIP. 19840410 201101 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BASTIAH, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM	**BASTIAH, SE**
NIP. 19661022 199308 1 001	NIP. 19670706 199003 2 010

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG MUTASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas ASN Pemprov Kalteng	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemprov Kalteng	Persentase	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pemberhentian	Meningkatnya Kualitas Proses Penyelesaian SK Pemberhentian/Pensiun secara tepat waktu	Persentase	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian bidang Mutasi dan Kepangkatan	Meningkatnya Kualitas Proses Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat, Mutasi dan Peninjauan Masa Kerja secara tepat waktu	Persentase	100

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 194.010.000	
2	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 78.182.000	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM
NIP. 19661022 199308 1 001

Pihak Pertama,

BASTIAH, SE
NIP. 19670706 199003 2 010

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAMDHAN DWI PUTRA, SE**

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG MUTASI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BASTIAH, SE**

Jabatan : KEPALA BIDANG MUTASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BASTIAH, SE	**RAMDHAN DWI PUTRA, SE**
NIP. 19670706 199003 2 010	NIP. 19750922 201001 1 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SUB BIDANG MUTASI

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemprov Kalteng	Terlaksananya Assesmen Mutasi PNS	Kali	2
2	Meningkatnya Kualitas Proses Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat, Mutasi dan Peninjauan Masa Kerja secara tepat waktu	Jumlah PNS naik pangkat periode April dan Oktober	SK	4000

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 194.010 000	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

BASTIAH, SE
NIP. 19670706 199003 2 010

Pihak Pertama,

RAMDHAN DWI PUTRA, SE
NIP. 19750922 201001 1 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**MIMI HARTASIAH**
Jabatan	:	KEPALA SUB BIDANG PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**BASTIAH, SE**
Jabatan	:	KEPALA BIDANG MUTASI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BASTIAH, SE	**MIMI HARTASIAH**
NIP. 19670706 199003 2 010	NIP. 19631003 198503 2 007

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BIDANG PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Proses Penyelesaian SK Pemberhentian/Pensiun secara tepat waktu	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian pegawai purna tugas BUP	SK	300

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 78.182.000	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BASTIAH, SE	**MIMI HARTASIAH**
NIP. 19670706 199003 2 010	NIP. 19631003 198503 2 007

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NIKARTHER, SSTP, M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM	**NIKARTHER, SSTP, M.AP**
NIP. 19661022 199308 1 001	NIP. 19801001 199810 1 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas ASN Pemprov Kalteng	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemprov Kalteng	Persentase	100
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan ASN Pemprov Kalteng	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase	100
3	Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN Pemprov Kalteng	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi ASN Pemprov Kalteng	Persentase	100
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase	100

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 48.855.000	
2	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 489.675.000	
3	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 477.606.500	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

H. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM
NIP. 19661022 199308 1 001

Pihak Pertama,

NIKARTHER, SSTP, M.AP
NIP. 19801001 199810 1 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMAD AGUS SALAHUDDIN, SE**

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NIKARTHER, SSTP, M.AP**

Jabatan : KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
NIKARTHER, SSTP, M.AP	**MUHAMAD AGUS SALAHUDDIN, SE**
NIP. 19801001 199810 1 009	NIP. 19720830 199403 1 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya kegiatan kebugaran jasmani PN	Kali	10
		Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian PNS	Kali	30
		Terlaksananya Publikasi Hari KORPRI	Kali	1
		Terlaksananya Rapat Kerja DPP KORPRI	Kali	1
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi ASN Pemprov Kalteng	PNS penerima Satyalancana Karya Satya Provinsi Kalimantan Tengah	PNS	250
		PNS yang membuat SKP Eselon II Provinsi Kalimantan Tengah	Orang	44
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS	Kegiatan	2

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 489.675.000	
2	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 130.192.000	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

NIKARTHER, SSTP, M.AP
NIP. 19801001 199810 1 009

Pihak Pertama,

MUHAMAD AGUS SALAHUDDIN, SE
NIP. 19720830 199403 1 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**MUHAMMAD AGUS PRIANTO, SH, MA**
Jabatan	:	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**NIKARTHER, SSTP, M.AP**
Jabatan	:	KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
NIKARTHER, SSTP, M.AP	**MUHAMMAD AGUS PRIANTO, SH, MA**
NIP. 19801001 199810 1 009	NIP. 19710812 200604 1 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 – Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3220942 dan Faks. (0536) 3235428

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemprov Kalteng	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	100
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terselesaikannya laporan yang berkaitan dengan tindak disiplin PNS dan perceraian PNS	Laporan	50

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 48.855.000	
2	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 347.414.500	

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

NIKARTHER, SSTP, M.AP
NIP. 19801001 199810 1 009

Pihak Pertama,

MUHAMMAD AGUS PRIANTO, SH, MA
NIP. 19710812 200604 1 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Nomor SOP	800/53/Sekr.7/BKD
	Tanggal Pembuatan	19-Jan-21
	Tanggal Revisi	19-Jan-21
	Tanggal Efektif	19-Jan-21
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah **H. Muhamad Katma F. Dirun, SE., MM** **NIP. 19661022 199308 1 001**
SEKRETARIAT	Nama SOP	**Pengumpulan Data Kinerja**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja	1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui Tugas dan Fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan 2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1. Berkas Persyaratan 2. Komputer dan perlengkapan lainnya
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubbag Penyusunan Program	Kasubbid	Staf Penyusun Evaluasi Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengumpulkan data laporan kinerja triwulan kepada subbag/subbid, OPD dan Instansi terkait						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi	15 menit	Disposisi	
2	Merekap laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Kinerja Aksi	30 menit	Lembar disposisi	
3	Mengolah data laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Progress bulanan	2 menit	draft laporan kinerja	
4	Menyusun laporan kinerja triwulan						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	30 menit	draft laporan kinerja	
5	Mensosialisasikan laporan kinerja triwulan kepada pejabat terkait						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	30 menit	draft laporan kinerja	
6	Merekap laporan kinerja triwulan untuk menyusun laporan tahunan				Ya		catatan pembagian tugas	2 hari	disposisi	
7	Menyusun laporan kinerja tahunan		Ya		Tidak		Data Laporan Kinerja triwulan	120 hari	Lembar disposisi	
8	Mensosialisasikan laporan kinerja tahunan kepada pejabat terkait		Tidak				Hasil Koreksi Laporan Kinerja triwulan	60 menit	draft laporan kinerja	
9	Menyusun laporan Kinerja Tahunan secara final		Ya	Selesai			Laporan Kinerja Triwulan	satu hari	draft laporan kinerja	

BKD
Provinsi Kalimantan Tengah

BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH

"if you can't measure it,
you can't manage it."

- Peter Drucker -